



LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2025

Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Bandung



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke-hadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2025 ini dapat berjalan lancar dan laporan tahunan dapat disusun tepat pada waktunya.

Laporan Tahunan 2025 ini disusun dengan tujuan untuk melakukan evaluasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan evaluasi kinerja dan penyusunan program kerja tahun yang akan datang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum / Para Ketua Tim Kerja / Kepala Wilayah Kerja yang telah bekerja keras dan selalu berkoordinasi dengan baik dengan seluruh stafnya.
2. Seluruh pelaksana program kegiatan yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme dalam melaksanakan setiap kegiatan.
3. Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, Pelabuhan, Bandara dan Wilayah Kerja dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung.

Dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, tentunya banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar laporan tahunan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Bandung, 20 Februari 2026

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung,

dr. Sedya Dwisangka, M.Epid

NIP 196901042002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN LALU	1
1.1 HAMBATAN TAHUN LALU	1
1.2 KELEMBAGAAN	8
1.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	8
1.2.2 SARANA DAN PRASARANA	12
1.2.3 DANA	14
BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN KERJA	21
2.1 DASAR HUKUM	21
2.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR	22
2.2.1 TUJUAN	22
2.2.2 SASARAN	23
2.2.3 INDIKATOR	24
BAB 3 STRATEGI PELAKSANAAN	32
3.1 STRATEGI PELAKSANAAN	32
3.2 HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN	35
3.3 TEROBOSAN YANG DILAKUKAN	36
BAB 4 HASIL KERJA	38
4.1 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	38
4.2 PENCAPAIAN KINERJA	135
4.3 REALISASI ANGGARAN	135
4.4 UPAYA UNTUK MERAH WTP DAN REFORMASI BIROKRASI	136
BAB 5 137	
PENUTUP	137
5.1 KESIMPULAN	137
5.2 SARAN	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu	10
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum.....	11
Tabel 1.3 Kuantitas Luas Tanah dan Bangunan berdasarkan lokasi di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Per 31 Desember 2025	12
Tabel 1.4 Jenis dan Jumlah Barang Bergerak Bandung Per 31 Desember 2025	13
Tabel 1.5 Jumlah dan Lokasi Barang Bergerak Di BKK Bandung	13
Tabel 1.6 Realisasi Anggaran BKK Kelas I Bandung TA 2025 berdasarkan Pagu Keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2025	15
Tabel 1.7 Realisasi Anggaran BKK Kelas I Bandung TA 2025 berdasarkan Pagu Efektif sampai dengan 31 Desember 2025.....	16
Tabel 1.8 Alokasi Anggaran dan Target Fisik Output Beserta Realisasi Anggaran dan Realisasi Output dari Masing-Masing Output pada DIPA Tahun 2025.....	18
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja BKK Kelas I Bandung Tahun 2025	24
Tabel 2.2 Matriks RAK Tahun 2020 – 2024.....	25
Tabel 4.1 Pencapaian Kegiatan BKK Kelas I Bandung Tahun 2025	38
Tabel 4.2 Pagu Anggaran BKK Kelas I Bandung Tahun 2025.....	39
Tabel 4.3 Capaian Output BKK Kelas I Bandung Tahun 2025	39
Tabel 4.4 Jumlah Jamaah Haji dan Kloter Embarkasi Haji JKS dan KJT Tahun 1446 H/2025 M ..	81
Tabel 4.5 Kebutuhan SDM Embarkasi Haji JKS dan KJT Tahun 2025	82
Tabel 4.6 SDM yang ditugaskan di Asrama Haji Embarkasi Debarkasi.....	83
Tabel 4.7 Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi pelayanan kesehatan	90
Tabel 4.8 Verifikasi Naskah Dinas	129
Tabel 4.9 Naskah Masuk	129
Tabel 4.10 Pemberkasan Arsip Aktif	130
Tabel 4.11 Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar	131
Tabel 4.12 Penandatanganan Naskah Elektronik.....	132
Tabel 4.13 Pencapaian Kinerja BKK Kelas I Bandung Tahun 2025	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Pengelola Keuangan BKK Kelas I Bandung	15
Gambar 4.1 Pelaksanaan Sosialisasi di Wilayah Kerja	45
Gambar 4.2 Pelaksanaan Sosialisasi.....	46
Gambar 4.3 Pelaksanaan Persiapan Posko Mudik	47
Gambar 4.4 Pengawasan Penerbitan ICV di Rumah Sakit/Klinik Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan	49
Gambar 4.5 Inspeksi Kesehatan Lingkungan Asrama Haji.....	49
Gambar 4.6 Uji Petik Keamanan Pangan di Pelabuhan dan Bandara	51
Gambar 4.7 Pengawasan dan Penyehatan Sarana Air di Pelabuhan dan Bandara	53
Gambar 4.8 Pengawasan dan Penyehatan Tempat Umum di Pelabuhan dan Bandara.....	54
Gambar 4.9 Pengelolaan Limbah Medis	55
Gambar 4.10 Dukungan Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kota Bandung	55
Gambar 4.11 Pengawasan faktor risiko masuknya vektor penyakit PES ke dalam alat angkut dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk	59
Gambar 4.12 Pengawasan sarana air bersih/ barang lainnya yang akan diangkut ke dalam alat angkut Pelaksanaan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk.....	59
Gambar 4.13 Pengambilan sampel air bersih pada alat angkut dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk	60
Gambar 4.14 Kegiatan pengawasan faktor risiko pada alat angkut	61
Gambar 4.15 Kegiatan verifikasi pembubuhan tanda tangan elektronik pada dokumen kekarantinaan kesehatan di kapal dan implementasi aplikasi Tangkap di Wilker Pelabuhan Patimban dan Wilker Indramayu	61
Gambar 4.16 Verifikasi Rumor / Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi KLB/Wabah di Pintu Masuk/Wilayah	62
Gambar 4.17 Surveilans Epidemiologi dalam Rangka Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit/Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan/Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pintu Masuk/Wilayah .	64
Gambar 4.18 Pengumpulan Data Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk	65
Gambar 4.19 Pelaksanaan Teknis SOP Identifikasi/Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi	66
Gambar 4.20 Surveilans Epidemiologi Faktor Risiko Penyakit Potensial Wabah Pada Pelaku Perjalanan Internasional	66
Gambar 4.21 Evaluasi program tim kerja 4 khususnya pemeriksaan ABK di Pelabuhan Patimban	67

Gambar 4.22 Koordinasi dan Konsultasi Identifikasi Potensi Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Ke Pusat	68
Gambar 4.23 Konsultasi Program Surveilans Epidemiologi ke Pusat.....	68
Gambar 4.24 Koordinasi Surveilans Epidemiologi di Wilayah	69
Gambar 4.25 Koordinasi dalam Rangka Identifikasi dan Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan/Surveilans Epidemiologi ke Wilker	69
Gambar 4.26 Konsultasi Identifikasi dan Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi dari Wilker ke Induk.....	70
Gambar 4.27 Koordinasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang dengan LS/ LP di Pintu Masuk.....	71
Gambar 4.28 Kegiatan koordinasi pengawasan faktor risiko kesehatan.....	71
Gambar 4.29 Koordinasi dengan lintas sektor/ lintas program terhadap alur pengawasan barang bawaan jemaah haji di Asrama haji Indramayu	72
Gambar 4.30 Monev dan bimbingan teknis terhadap penyusunan SOP pengawasan lalu lintas jenazah di wilayah kerja Bandara Kertajati - Kab. Majalengka	73
Gambar 4.31 Kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja tugas dan fungsi tim kerja 2	73
Gambar 4.32 Kegiatan konsultasi terkait dengan pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang	74
Gambar 4.33 Pelaksanaan surveilans epidemiologi pasca debarkasi pada jemaah haji Jawa Barat di Kabupaten Cirebon, Sumedang, Cianjur, Bandung, Bekasi, Subang, Kota Bogor pada Bulan September.	76
Gambar 4.34 Pelayan posko Nataru pengendalian Faktor resiko penyakit diwilker (kertajati, cirebon, indramayu, pelabuhan ratu, patimban dan posko bandara huseuin)	77
Gambar 4.35 Kegiatan pengendalian faktor risiko DBD	77
Gambar 4.36 Skrining HIV AIDS	79
Gambar 4.37 Skrining TB.....	80
Gambar 4.38 Pelaksanaan Embarkasi Haji.....	82
Gambar 4.39 Alat Pelindung Diri.....	84
Gambar 4.40 Kegiatan Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional (PIEN) ke 12 di Yogyakarta	89
Gambar 4.41 Pelatihan Sea - Survival di Bogor	89
Gambar 4.42 Diklat/Workshop Surveilans Epidemiologi/Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional.....	91
Gambar 4.43 Laporan Penyusunan BMN.....	92
Gambar 4.44 Penghapusan dan Pemusnahan BMN	93
Gambar 4.45 Penyelesaian masalah BMN.....	94
Gambar 4.46 CHR RKBMN	95
Gambar 4.47 Jejaring Komunikasi Kehumasan dan Peningkatan Pelayanan Publik	96
Gambar 4.48 Pengelolaan Informasi Publikasi dan Media Monitoring	97

Gambar 4.49 Rapat review dan finalisasi artikel.....	98
Gambar 4.50 Buletin Web MEDIKA 2025.....	98
Gambar 4.51 Implementasi Keterbukaan Informasi Publik.....	99
Gambar 4.52 Harmonisasi PPID dan Walidata di Kemenkes dan Kilas Laporan Hasil Monev Internal PPID Pelaksana Tahun 2025	100
Gambar 4.53 Kegiatan monitoring SOP AP	102
Gambar 4.54 Pengelolaan Kantor BERHIAS	103
Gambar 4.55 Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.....	104
Gambar 4.56 Kegiatan Penyusunan Profil	105
Gambar 4.57 Kegiatan Pelantikan	109
Gambar 4.58 Peningkatan Kompetensi Administrasi Manajemen	109
Gambar 4.59 Peningkatan Kapasitas Administrasi Umum	111
Gambar 4. 60 Pelatihan Jarak Jauh Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Pertama Dalam Lingkup Tugas Selaku Chief Operational Officer (COO) Angkatan I Tahun 2025.....	111
Gambar 4.61 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	112
Gambar 4.62 Penyusunan RKA KL.....	113
Gambar 4.63 Evaluasi Laporan Kinerja (LAKIP)	114
Gambar 4.64 Reviu SKI terhadap LAKIP tahun 2024.....	114
Gambar 4.65 Kegiatan rapat persiapan penyusunan LAKIP semester I tahun 2025	115
Gambar 4.66 Kegiatan rapat internal penyusunan LAKIP semester I tahun 2025	115
Gambar 4.67 Kegiatan rapat persiapan penilaian inovasi oleh Eselon I pada tanggal 14 Februari 2025.....	116
Gambar 4.68 Pertemuan Evaluasi SAKIP TA 2024 Desk Satker Pusat dan UPT.....	117
Gambar 4.69 Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di daerah dalam rangka tindaklanjut akuntabilitas kinerja di BKK Kelas I Bandung	117
Gambar 4.70 Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited	119
Gambar 4.71 Koordinasi dengan Pengelola PNBW Wilker BKK Kelas I Bandung terkait pencocokan data PNBW.....	120
Gambar 4.72 Sosialisasi Peraturan dan Koordinasi Pengelolaan PNBW Pada Pihak Internal dan Eksternal UPT.....	121
Gambar 4. 73 Konsultasi Permasalahan Pengelolaan/Pelaporan PNBW Ke Pusat	121
Gambar 4. 74 Penyusunan Realisasi Anggaran.....	123
Gambar 4.75 Pencetakan media KIE WBK	123
Gambar 4.76 Koordinasi via WA Grup Pusat	124
Gambar 4.77 Kegiatan Koordinasi/ konsultasi ke Pusat dalam rangka pembangunan zona integritas	125
Gambar 4.78 Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System	126

Gambar 4.79 Program Pengendalian Gratifikasi	126
Gambar 4.80 Sosialisasi Hasil e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (PPG) Tahun 2025	127
Gambar 4.81 Kegiatan Sosialisasi tentang 7 (Tujuh) Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi yang Wajib dan Tidak Wajib Dilaporkan	127
Gambar 4.82 Kegiatan sosialisasi Antikorupsi dan UPG	128
Gambar 4.83 Kegiatan sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi	128
Gambar 4.84 Sosialisasi Anti Korupsi pada saat Kedatangan Jemaah Calon Haji Jawa Barat di Asrama Haji Embarkasi.....	129
Gambar 4.85 Pemberkasan Arsip Aktif	131
Gambar 4.86 Pengelolaan Alih Media Arsip.....	133
Gambar 4.87 Bimtek dan Konsultasi terkait Pengelolaan Arsip BKK Kelas I Bandung	134

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Distribusi Pegawai di Lingkungan BKK Kelas I Bandung Tahun 2025	8
Grafik 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	9
Grafik 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	9
Grafik 4.1 Tren kedatangan kapal dan pesawat dari luar negeri masuk ke wilayah kerja BKK Bandung selama tahun 2025	58

BAB I

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN LALU

1.1 HAMBATAN TAHUN LALU

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahtraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahtraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2024 memuat Visi Indonesia Emas 2045 sebagai “*Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Agenda Pembangunan 2045. sebagai berikut:

- 1) Transformasi Sosial
- 2) Transformasi Ekonomi
- 3) Transformasi Tata Kelola
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- 8) Kestinambungan Pembangunan

Dalam RPJPN 2025-2045, pembangunan kesehatan masuk ke dalam Agenda Transformasi Sosial, yang bertujuan untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.

RPJMN 2025-2029 telah mengidentifikasi dan memetakan peran signifikan Kementerian Kesehatan dalam mengkoordinasikan berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, yang hampir seluruhnya berada di bawah Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Prioritas Nasional 4 dan berkaitan dengan peran kunci Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk berbasis siklus hidup mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia dengan penekanan pada penguatan edukasi, peningkatan cakupan, kualitas, dan tata laksana layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat. Hal tersebut dilakukan melalui:
 - a) penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak;
 - b) pencegahan dan penurunan stunting, dengan meningkatkan cakupan dan kualitas serta integrasi intervensi kunci yang berfokus pada penguatan faktor determinan di masing-masing kelompok sasaran;
 - c) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; serta
 - d) penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis.
- 2) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan deteksi dini faktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan. Hal tersebut dilakukan melalui:
 - a) Penuntasan tuberkulosis;
 - b) Eliminasi penyakit kusta dan schistosomiasis;
 - c) Pengendalian penyakit menular lainnya terutama HIV/AIDS dan eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya seperti malaria;
 - d) Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa;
 - e) Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat aktivitas fisik; serta
 - f) Penyehatan lingkungan.
- 3) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit *emerging* dan *re-emerging*, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat. Hal tersebut dilakukan melalui:

- a) Penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara;
 - b) Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; serta
 - c) Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan.
- 4) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah hingga tingkat desa, afirmasi bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk peran kader kesehatan, mendorong inovasi pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui:
- a) Investasi pelayanan kesehatan primer;
 - b) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/ kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses termasuk pengembangan layanan berbasis kompetensi terutama kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak;
 - c) Produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan, antara lain melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - d) penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan termasuk reaktivasi peserta non-aktif, penguatan kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional, serta pengembangan skema pendanaan inovatif untuk kesehatan; serta
 - e) penguatan tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan, termasuk peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan kesehatan.

Arah kebijakan tersebut selaras dengan Visi Pembangunan Kesehatan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029, yang bertujuan untuk memastikan masyarakat yang sehat dan produktif sebagai modal dasar pembangunan dalam menyongsong visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. RIBK 2025-2029 akan mewujudkan peningkatan angka harapan hidup, peningkatan angka harapan hidup sehat, peningkatan indeks cakupan layanan kesehatan semesta, dan pemeliharaan angka fertilitas total yang ideal. RIBK 2025-2029 mengusung enam (6) sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Sehat;
- 2) Komunitas Gaya Hidup Sehat;

- 3) Layanan Kesehatan yang Baik, Adil dan Terjangkau;
- 4) Sistem dan Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan Responsif;
- 5) Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang Efektif;
- 6) Teknologi Kesehatan yang Maju.

Sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan, Ditjen Penanggulangan Penyakit menetapkan strategi pelaksanaan program sebagai berikut:

- 1) Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat yang efektif tentang faktor risiko penyakit dan pencegahannya
- 2) Meningkatkan kapasitas, sumber daya, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman penyakit.
- 3) Mendorong praktik higiene yang baik di antara masyarakat
- 4) Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menerapkan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit secara efektif.
- 5) Mendorong gerakan masyarakat yang kuat untuk mengubah perilaku yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit
- 6) Mendorong inovasi berbasis bukti dalam pencegahan dan pengendalian penyakit
- 7) Kolaborasi dengan sektor kesehatan hewan, lingkungan hidup dan sektor lainnya dengan pendekatan *One Health*

Sehingga sasaran strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2025 – 2029 yaitu:

- 1) Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah
- 2) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pada awal tahun Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Indikator Kinerja Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, yaitu:

- 1) Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN dengan capaian sebesar 0,97 dari target 0,96 (101,04%).
- 2) Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan capaian sebesar 100% dari target 98 (102,04%).
- 3) Indeks Pengendalian Faktor risiko di di Pelabuhan/Bandara/PLBN dengan capaian sebesar 1 dari target 0,97 (103,09%).

- 4) Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 99,32 dari target 82 (121,12%).
- 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan capaian sebesar 100 dari target 93 (107,53%).
- 6) Kinerja implementasi WBK satker dengan capaian sebesar 84,25 dari target 84 (100,30%).
- 7) Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya dengan capaian sebesar 98,97% dari target 80% (123,71%).
- 8) Persentase Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar 77,76% dari target sebesar 96% (81%).

Pagu anggaran Tahun 2025 BKK Kelas I Bandung sejumlah Rp. 28.103.396.000,- dengan nilai Pagu Blokir sebesar Rp. 6.170.995.000,- sehingga Pagu Efektif sebesar Rp. 21.932.401.000,- dan realisasi akhir tahun 2025 sejumlah Rp. 21.854.117.027,- Rata – rata capaian kinerja Tahun 2025 di BKK Kelas I Bandung sebesar 104,98%.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dapat terlihat dari keberhasilan dalam pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun lalu ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan dalam pencapaian indikator kinerja diantaranya :

1) Dampak kebijakan Efisiensi Belanja Tahun 2025

Pada awal tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia telah mengumumkan pemberlakuan efisiensi anggaran negara. Efisiensi tersebut dilakukan dengan mengurangi anggaran beberapa instansi dan biaya program tertentu. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan anggaran tersebut ke beberapa program yang menjadi prioritas pemerintah. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia tahun 2025 tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Menindaklanjuti Inpres Presiden Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/706/2025 tentang Strategi Pengendalian Belanja dalam Rangka Efisiensi Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025. surat Edaran tersebut berlaku bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pimpinan satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis, serta seluruh pegawai di lingkungan Kemenkes. Efisiensi anggaran mulai diterapkan pada 25 Februari 2025 dan berlaku untuk semua sumber pendanaan, termasuk Rupiah Murni (RM), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), dan Hibah Dalam Negeri (HDN). Kebijakan ini berlaku di seluruh unit kerja dan satuan kerja

Kemenkes, baik di kantor pusat maupun di daerah. Adapun strategi pengendalian belanja dalam rangka efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025, terdiri atas: 1. pembatasan belanja operasional 2. pembatasan operasional sarana prasarana pendukung kantor; 3. pembatasan kendaraan dinas; dan 4. pembatasan belanja perjalanan dinas.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal penanggulangan Penyakit melakukan penghematan/ Efisiensi anggaran belanja sebesar Rp. 6,254,085,000,-. Kebijakan efisiensi ini menjadi tantangan bagi BKK Kelas I Bandung bagaimana untuk menggunakan anggaran yang diberikan secara efektif untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pokok agar dapat mencukupi kebutuhan operasional maupun non operasional di BKK Kelas I Bandung Tahun 2025.

2) Pemberlakuan vaksin polio tujuan Arab Saudi

Arab Saudi merupakan tempat penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, menjadi tempat berkumpulnya orang dari seluruh dunia termasuk negara-negara endemis penyakit menular tertentu, sehingga perlu diberikan perlindungan bagi pelaku perjalanan tujuan Arab Saudi dengan imunisasi tertentu.

Selanjutnya berdasarkan Health Requirements and Recommendations For Travelers to Saudi Arabia for Umrah and Visit during 1446 H (2025) dan Health Requirements and Recommendations For Travelers to Saudi Arabia for Hajj 1446 H (2025) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi, telah ditetapkan kebijakan bahwa pelaku perjalanan dari Indonesia diwajibkan mendapatkan imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis untuk jemaah haji, serta imunisasi Meningitis Meningokokus dan Poliomyelitis untuk jemaah umrah dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi.

Oleh karenanya jemaah haji dan umrah serta pelaku perjalanan ke Arab Saudi asal Indonesia diwajibkan mendapatkan imunisasi sebagaimana kebijakan Pemerintah Arab Saudi kemenkes juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/A/1206/2025 Tentang Pelaksanaan Imunisasi Bagi Jemaah Haji dan Umroh tanggal 25 april 2025 dimana UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas untuk :

- a) melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umrah, jemaah haji dan umrah, dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi tentang pentingnya imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis;
- b) melaksanakan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional pada wilayah kerjanya;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap jemaah haji dan umrah, serta pelaku perjalanan ke atau dari Arab Saudi pada saat keberangkatan dan saat kepulangan, dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota; dan

d) melaksanakan layanan vaksinasi internasional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan imunisasi Meningitis Meningokokus dan Poliomyelitis bagi jemaah umrah dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi dapat dilakukan secara mandiri di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional. Sejak Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengeluarkan persyaratan dan rekomendasi kesehatan bagi jemaah haji tahun 1446/2025. Banyak pengguna jasa/jemaah umroh yang datang ke BKK Bandung untuk melakukan vaksinasi poliomyelitis. Pada bulan Juni, BKK Bandung mendapat dropping vaksin poliomyelitis dari pusat, sehingga kunjungan poliklinik vaksinasi naik sebesar 33%. Total kunjungan poliklinik selama 2025 sebanyak 13.109 orang dengan permohonan vaksin meningitis 9.313 orang, vaksin polio 7.013 orang, vaksin yellow fever 324 orang.

3) Operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati

Sejak operasional penerbangan komersial Bandara Husein Sastranegara Bandung dialihkan ke BIJB Kertajati pada bulan Oktober 2023, lalu lintas pelaku perjalanan lewat jalur udara di wilayah BKK Bandung terus menurun. Ada beberapa peningkatan terutama di masa mudik lebaran, masa embarkasi dan debarkasi haji, namun setelah itu trennya selalu menurun dan sejauh ini belum ada tanda-tanda peningkatan yang signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh sepi penumpang yang memilih melakukan perjalanan dari BIJB Kertajati, yang membuat maskapai enggan untuk membuka banyak rute penerbangan meskipun akses ke bandara ini sudah lebih baik yaitu dengan adanya akses tol Cisumdawu yang langsung menuju gerbang masuk BIJB Kertajati.

4) Pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG)

Kegiatan cek kesehatan gratis di Balai Kekarantinaan Kesehatan merupakan bagian dari implementasi program promotif dan preventif Kementerian Kesehatan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit dan penguatan pengawasan kesehatan di pintu masuk negara. Kegiatan ini mendukung fungsi kekarantinaan kesehatan dalam cegah tangkal penyakit menular maupun tidak menular, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan skrining kesehatan secara gratis. Sesuai dengan surat dari Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, nomor : YP.01.04/B.V/490/2025, perihal : Permohonan Fasilitas dalam Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Komunitas oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa BKK diwajibkan untuk melakukan kegiatan Cek Kesehatan Gratis dalam mendukung program pemerintah di wilayah sekitar pintu masuk negara dan sekitarnya dengan sasaran pelaku perjalanan, pelaku usaha, perkantoran serta Masyarakat sekitar.

Dalam pelaksanaannya BKK Kelas I Bandung melakukan kegiatan CKG ke pelaku perjalanan di Bandara dan Pelabuhan, sekolah, perkantoran, Masyarakat sekitar, di tahun

2025 dengan pencapaian sebanyak 2.726 orang. Dalam pelaksanaan kegiatan BKK Kelas I Bandung dapat dukungan langsung dari pusat berupa alat dan stik pemeriksaan Gula Darah sebanyak 2500 stik untuk menunjang kegiatan serta link pendaftaran ASIK dari Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer.

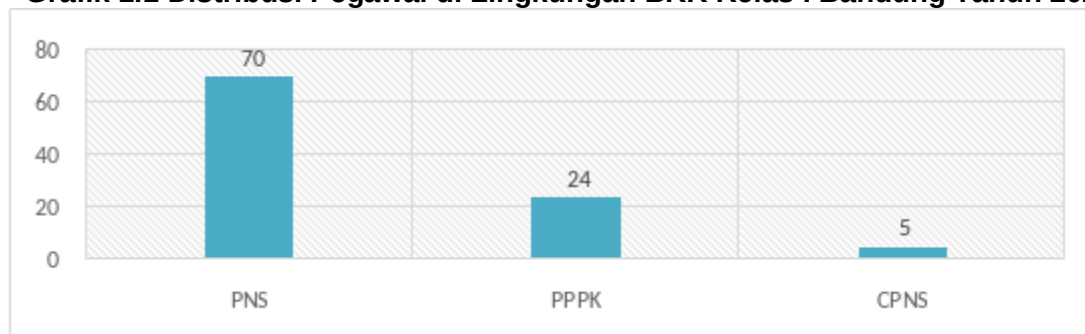
Dalam pelaksanaanya ada beberapa kendala diantaranya dukungan bahan pemeriksaan Gula Darah dari pusat dikirimnya telat sehingga pada kegiatan menggunakan bahan yangtersedia di BKK, Bahan pemeriksaan hanya ada Gula darah sedangkan dilapangan membutuhkan pemerikssan Cholesterol dan asam urat, serta kurang SDM dikarenakan berbarengan dengan kegiatan lain.

1.2 KELEMBAGAAN

1.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

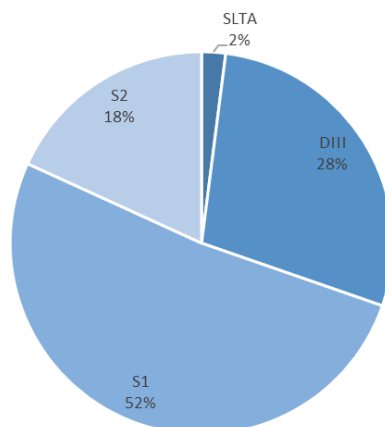
Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di BKK Kelas I Bandung diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran. Distribusi pegawai BKK Kelas I Bandung berdasarkan wilayah kerja, pendidikan dan jabatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1.1 Distribusi Pegawai di Lingkungan BKK Kelas I Bandung Tahun 2025



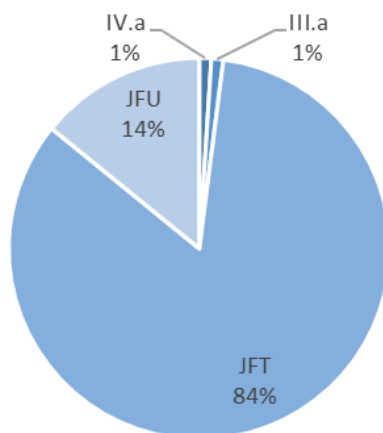
Jumlah Sumber Daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh BKK Kelas I Bandung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 70 orang PNS, 24 PPPK dan 5 orang CPNS sehingga total menjadi 99 pegawai yang tersebar baik di induk maupun wilayah kerja.

Grafik 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025



ASN BKK Kelas I Bandung memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Berdasarkan kualifikasi jenjang pendidikan, pegawai BKK Kelas I Bandung didominasi oleh pegawai dengan jenjang pendidikan S1 (51%), D3 (28%), S2 (18%), AKADEMI (2%) dan SLTA (2%).

Grafik 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025



Pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung didominasi oleh kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 84% diikuti Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 14%, Eselon III,a 1% dan IV,a sebesar 1%.

1. Jabatan Struktural

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi yaitu Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor dan Pejabat eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.

2. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Dari 71 orang dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terdiri atas :

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	2
2	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1
6	Arsiparis Ahli Muda	1
7	Arsiparis Ahli Pertama	2
8	Asisten Apoteker Terampil	1
9	Dokter Ahli Madya	3
10	Dokter Ahli Muda	3
11	Dokter Ahli Pertama	3
12	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	4
13	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1
14	Entomolog Kesehatan Mahir	2
15	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	6
16	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	7
17	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	3
18	Epidemiolog Kesehatan Mahir	2
19	Epidemiolog Kesehatan Terampil	2
20	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1

21	Perawat Ahli Muda	1
22	Perawat Ahli Pertama	1
23	Perawat Mahir	4
24	Perawat Penyelia	2
25	Perawat Terampil	8
26	Perencana Ahli Pertama	2
27	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	2
28	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
29	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
30	Pranata Komputer Terampil	1
31	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	2
32	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	1
33	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
34	Sanitarian Ahli Madya	2
35	Sanitarian Ahli Muda	1
36	Sanitarian Mahir	2
37	Sanitarian Penyelia	1
38	Sanitarian Terampil	3

3. Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari 8 orang dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU) terdiri dari:

Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Arsiparis / Pranata Kearsipan	2

2	Entomolog Kesehatan Ahli	1
3	Epidemiolog Kesehatan Ahli	1
4	Pembimbing Kesehatan Kerja / Analis Kesehatan Kerja	1
5	Penata Kelola Layanan Kesehatan	5
6	Pengelola Barang Milik Negara	1
7	Perawat / Pengelola Keperawatan	2
8	Sanitarian / Pengelola Penyehatan Lingkungan	1

1.2.2 SARANA DAN PRASARANA

A. Barang Tidak Bergerak

Aset tidak bergerak di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung per 31 Desember 2025 berupa Bangunan Kantor, Rumah Dinas, Luas Tanah, Alat Kesehatan Besar, dan Alat Perlengkapan Kantor.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung memiliki sarana prasarana barang tidak bergerak berupa tanah seluas 5.973 m² dan bangunan seluas 3.594 m². Kuantitas luas tanah dan bangunan berdasarkan lokasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Kuantitas Luas Tanah dan Bangunan berdasarkan lokasi di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS PER 31 DESEMBER 2025	KET
1	Tanah		
	- Tanah bangunan rumah negara gol II (Cirebon)	200 m ²	
	- Tanah untuk Wilker Indramayu	528 m ²	
	- Tanah untuk Wilker Cirebon	1000 m ²	
	- Tanah untuk Wilker Kertajati	1626 m ²	
	- Tanah untuk Wilker Pelabuhan Ratu	1060 m ²	
	- Tanah untuk Kantor Induk (Cikapayang)	780 m ²	
	- Tanah untuk Wilker Patimban	779 m ²	
2	Gedung dan Bangunan		

a. Bangunan Gedung Kantor Permanen		
1) Bangunan Gedung Kantor di Wilker Cirebon	212 m2	
b. Bangunan Gedung Garasi di Wilker Cirebon	80 m2	
c. Rumah Negara di Cirebon Gol II Tipe A Permanen	130 m2	
d. Bangunan Gedung Kantor Permanen Induk (Cikapayang)	1.529 m2	
e. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker Cirebon	615 m2	
f. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker Indramayu	309 m2	
g. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker Pelabuhan Ratu	305 m2	
h. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker Kertajati	414 m2	

B. Barang Bergerak

Sarana prasarana berupa barang bergerak di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung per 31 Desember 2025 sebanyak 52 unit yang terdiri dari 32 unit kendaraan roda 4 dan 20 unit kendaraan roda 2.

Tabel 1.4 Jenis dan Jumlah Barang Bergerak Bandung Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	KUANTITAS PER 31 DESEMBER 2024	KET
1	Roda 4 (Empat)		
	a. Minibus	14 unit	
	b. Pick up	4 unit	
	c. Ambulance	11 unit	
	d. Mobil Listrik	3 unit	
2	Roda 2 (Dua)		
	a. Sepeda Motor	19 unit	
	b. Sepeda Motor Listrik	1 unit	

Berdasarkan lokasi, jenis dan jumlah barang bergerak sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Jumlah dan Lokasi Barang Bergerak Di BKK Bandung

Tabel 2.10 Jumlah dan Lokasi Barang Bergepok di BKR Bandung							
NO	LOKASI	JENIS KENDARAAN					JUMLAH
		RODA EMPAT				ROD A DUA	
		MINI BUS	AMBULANC E	PICKU P	MOBIL LISTRIK		
1	Kantor Induk (Bandung)	10	3	3	3	13	32

2	Wilker Cirebon	2	2	1	0	2	7
3	Wilker Indramayu Balongan	1	1	0	0	2	4
4	Wilker Palabuhan Ratu	0	1	0	0	1	2
5	Wilker Kertajati	0	2	0	0	2	4
6	Bandara Husein	0	1	0	0	0	1
7	Wilker Patimban	1	1	0	0	0	2
JUMLAH		14	11	4	3	20	52

1.2.3 DANA

Anggaran disusun dan dikelola berdasarkan rencana kebutuhan yang ada serta dengan mempertimbangkan pagu anggaran yang tersedia dan juga tidak terlepas dari peraturan perundangan yang berlaku.

a. Struktur Pengelola Keuangan

Tata kelola keuangan pada Sub Bagian Administrasi Umum Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung meliputi pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, pembayaran gaji dan tunjangan, melaksanakan perbendaharaan, melakukan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, melakukan penatausahaan dokumen keuangan dan pelaporan pajak. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan mempertimbangkan pagu anggaran yang tersedia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan anggaran pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara yang ditunjuk oleh Kepala Balai dan memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan. Adapun struktur pejabat perbendaharaan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 Struktur Pengelola Keuangan BKK Kelas I Bandung



b. Pagu Anggaran

Sumber dana Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung berasal dari APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun 2025. pada awal tahun BKK Kelas I Bandung memperoleh dana sebesar Rp. 27.314.205.000,- (DIPA No. SP DIPA- 024.05.2.415712/2025). Pada tahun 2025 adanya efisiensi pada anggaran yang bersumber dari RM dan PNBPN sebesar Rp. 6.254.085.000,- namun pada bulan Juli terdapat relaksasi Blokir anggaran sehingga blokir terakhir sebesar Rp. 6.170.995.000,- dan pada bulan Oktober ada revisi penambahan anggaran atas kelebihan target penerimaan PNBPN untuk belanja modal dan belanja jasa sebesar Rp. 789.191.000,- sehingga pagu keseluruhan tahun 2025 bertambah menjadi Rp. 28.103.396.000,-

Tabel 1.6 Realisasi Anggaran BKK Kelas I Bandung TA 2025 berdasarkan Pagu Keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2025

No	Kode Output	Nama Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	6.949.809.000	2.787.563.650	40.11
2	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	21.153.587.000	19.066.553.377	90.13
TOTAL			28.103.396.000	21.854.117.027	77.76

Dilihat dari tabel di atas capaian Persentase Realisasi Anggaran tidak memenuhi target persentase sebesar 96% jika menggunakan Pagu Keseluruhan, namun jika menggunakan pagu Efektif dimana Pagu Keseluruhan dalam DIPA telah dikurangi oleh PAGU Blokir, maka capaian realisasi anggaran BKK Kelas I Bandung sebesar 99,64% dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.7 Realisasi Anggaran BKK Kelas I Bandung TA 2025 berdasarkan Pagu Efektif sampai dengan 31 Desember 2025

No	Kode Output	Nama Output	Alokasi Anggaran	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran	%
1	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	6.949.809.000	4.127.711.000	2.822.098.000	2.787.563.650	98.78
2	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	21.153.587.000	2.043.284.000	19.110.303.000	19.066.553.377	99.77
TOTAL			28.103.396.000	6.170.995.000	21.932.401.000	21.854.117.027	99.64

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pagu anggaran BKK Kelas I Bandung pada Tahun 2025 sebesar Rp. 28.103.396.000 .- dengan Blokir sebesar Rp. 6.170.995.000,- sehingga Pagu efektif sebesar Rp. 21.932.401.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 21.854.117.027,- dengan capaian 99,64% dari pagu anggaran. Untuk pagu anggaran Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Rp. 6.949.809.000.- dengan Blokir sebesar Rp. 4.127.711.000,- sehingga Pagu efektif sebesar Rp. 2.822.098.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.787.563.650,- dengan capaian 98,78% dan pagu anggaran Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit sebesar Rp. 21.153.587.000.- dengan Pagu Blokir sebesar Rp. 2.043.284.000,- sehingga Pagu Efektif sebesar Rp. 19.110.303.000,- telah realisasi sebesar Rp. 19.066.553.377,- dengan capaian 99,77%.

Pada tahun anggaran 2025, DIPA BKK Kelas I Bandung mengalami revisi DIPA sampai dengan 12 (dua belas) kali, yaitu:

1) DIPA Revisi 0

DIPA KKP Bandung awal terbit pada tanggal 2 Desember 2024 dengan jumlah Pagu Rp. 27.314.205.000,- sumber anggaran dari Rupiah Murni sebesar Rp. 25.843.162.000,- dan

PNBP sebesar Rp. 1.471.043.000,- serta adanya Blokir terkait Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp. 2.331.850.000,-

2) DIPA Revisi I

DIPA KKP Bandung Revisi I (Kanwil) terbit pada tanggal 13 Februari 2025 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

3) DIPA Revisi II

DIPA KKP Bandung Revisi II (Kanwil) terbit pada tanggal 21 Februari 2025 dikarenakan adanya Surat Edaran Efisiensi Anggaran Belanja terkait Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp. 6.254.085.000,-

4) DIPA Revisi III

DIPA KKP Bandung Revisi III (Kanwil) terbit pada tanggal 22 April 2025 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

5) DIPA Revisi IV

DIPA KKP Bandung Revisi IV (Kanwil) terbit pada tanggal 30 Juni 2025 dikarenakan adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap serta perubahan ralat karena kesalahan administrasi dan adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

6) DIPA Revisi V

DIPA KKP Bandung Revisi V (Kanwil) terbit pada tanggal 8 Juli 2025 dikarenakan adanya pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan, satu satker, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA.

7) DIPA Revisi VI

DIPA KKP Bandung Revisi VI (DJA) terbit pada tanggal 31 Juli 2025 dikarenakan adanya Relaksasi Blokir Kode A sesuai surat Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit nomor PR.04.02/C/2339/2025 tanggal 7 Juli 2025 hal Penetapan Distribusi Pagu pada Revisi DJA Tahap 4 Relaksasi Blokir Kode A Satker di Lingkungan Ditjen Penanggulangan Penyakit TA. 2025

8) DIPA Revisi VII

DIPA KKP Bandung Revisi VII (KPA) terbit pada tanggal 28 Agustus 2025 dikarenakan adanya pemutakhiran data hasil revisi POK terkait Pergeseran Anggaran dalam hal pagu tetap Uang Makan dan Lembur PPNPN.

9) DIPA Revisi VIII

DIPA KKP Bandung Revisi VIII (Kanwil) terbit pada tanggal 17 Oktober 2025 dikarenakan adanya pergeseran Anggaran Belanja Operasional kedalam Belanja Pegawai, serta adanya penyesuaian Rencana Penarikan Dana atau Rencana Penerimaan dalam halaman III DIPA

dan Revisi Penambahan pagu PNBPN dalam hal penggunaan realisasi penerimaan atas target PNBPN sebesar Rp. 789.191.000,-

10) DIPA Revisi IX

DIPA KKP Bandung Revisi IX (Pemutakhiran KPA) terbit pada tanggal 30 Oktober 2025 dikarenakan adanya Pemutakhiran data hasil revisi POK.

11) DIPA Revisi X

DIPA KKP Bandung Revisi X (Kanwil) terbit pada tanggal 17 November 2025 dikarenakan adanya Pemutakhiran Hasil Revisi POK terkait Belanja Pegawai.

12) DIPA Revisi XI

DIPA KKP Bandung Revisi XI (Pemutakhiran KPA) terbit pada tanggal 11 Desember 2025 dikarenakan adanya Pergeseran Anggaran dalam hal Pagu tetap Tunkin, Uang Makan dan Lembur PNS serta P3K.

13) DIPA Revisi XII

DIPA KKP Bandung Revisi XII (Pemutakhiran KPA) terbit pada tanggal 29 Desember 2025 dikarenakan adanya Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK dan Pagu Minus Belanja Pegawai.

DIPA BKK Kelas I Bandung pada Tahun 2025 mengalami 12 (dua belas) kali perubahan. Berikut ini alokasi anggaran dan target fisik output beserta realisasi anggaran dan realisasi output dari masing-masing output pada DIPA perubahan terakhir (DIPA revisi XII) di BKK Kelas I Bandung Tahun 2025.

Tabel 1.8 Alokasi Anggaran dan Target Fisik Output Beserta Realisasi Anggaran dan Realisasi Output dari Masing-Masing Output pada DIPA Tahun 2025

No	Rincian Output	Alokasi Anggaran (.)	Blokir Anggaran (.)	Target Fisik Output		Realisasi Anggaran (.)	Realisasi Fisik Output	
1.	001 Sosialisasi dan Diseminasi (HS)	66.000.000	66.000.000	165	Orang	0	165	Orang
2.	012 Pelayanan kesehatan di pelabuhan/ bandara/ lintas batas (orang)	317.600.000	259.196.000	1.700	Orang	58.274.119	1.700	Orang
3.	016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (layanan)	644.920.000	538.452.000	16	Layanan	157.860.724	16	Layanan
4.	017 layanan pemeriksaan orang.	1.470.568.000	1.111.199.000	21	Layanan	359.044.955	21	Layanan

No	Rincian Output	Alokasi Anggaran (.)	Blokir Anggaran (.)	Target Fisik Output		Realisasi Anggaran (.)	Realisasi Fisik Output	
	barang. alat angkut (layanan)							
5.	U04 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (layanan)	32.000.000	0	20	Layanan	32.000.000	20	Layanan
6.	U07 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	14.448.000	9.498.000	12	Layanan	4.925.800	12	Layanan
7.	U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes (layanan)	19.775.000	9.912.000	7	Layanan	9.861.000	7	Layanan
8.	U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare (Layanan)	8.622.000	5.284.000	18	Layanan	3.332.000	18	Layanan
9.	U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (layanan)	39.420.000	21.600.000	30	Layanan	17.736.000	30	Layanan
10.	U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB (layanan)	109.100.000	94.000.000	20	Layanan	15.060.000	20	Layanan
11.	U27 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori III	1.102.000.000	538.200.000	8	Layanan	56.3645.940	8	Layanan
12.	U30 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori III	637.000.000	310.500.000	5	Layanan	326.418.170	5	Layanan
13.	001 Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk (paket)	2.208.734.000	956.178.000	14	Paket	1.219.100.388	14	Paket
14.	001 Pelatihan kesehatan (orang)	228.122.000	207.692.000	44	Orang	20.304.554	44	Orang
15.	956 Layanan BMN	18.382.000	16.703.000	2	Layanan	1.678.500	2	Layanan
16.	958 Layanan Hubungan Masyarakat (Layanan)	7.120.000	7.120.000	3	Layanan	0	3	Layanan

No	Rincian Output	Alokasi Anggaran (.)	Blokir Anggaran (.)	Target Fisik Output		Realisasi Anggaran (.)	Realisasi Fisik Output	
17.	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	11.240.000	10.710.000	4	Layanan	530.000	4	Layanan
18.	962 Layanan Umum (Layanan)	281.120.000	62.113.000	6	Layanan	210.611.474	6	Layanan
19.	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	5.600.000	5.600.000	2	Layanan	0	2	Layanan
20.	994 Layanan Perkantoran (bulan)	20.422.197.000	1.554.706.000	13	Layanan	18.832.138.903	13	Layanan
21.	954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	7.814.000	7.814.000	4	Orang	0	4	Orang
22.	996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	28.414.000	27.949.000	5	Orang	465.000	5	Orang
23.	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan)	141.874.000	141.874.000	2	Dokumen	00	2	Dokumen
24.	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	81.360.000	81.360.000	10	Dokumen	0	10	Dokumen
25.	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	110.871.000	96.774.000	7	Dokumen	14.096.500	7	Dokumen
26.	961 Layanan Reformasi Kinerja	16.080.000	11.080.000	4	Dokumen	5.000.000	4	Dokumen
27.	974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Dokumen)	21.515.000	19.481.000	1	Dokumen	2.033.000	1	Dokumen

Dari kesimpulan tabel di atas, capaian output anggaran BKK Kelas I Bandung Tahun 2025 tercapai 100% meskipun adanya kebijakan pemblokiran anggaran sebesar Rp. 6.170.995.000,- dari pagu keseluruhan sebesar Rp. 28.103.396.000,- dengan strategi sebagai berikut :

- Memaksimalkan anggaran yang tersedia
- Menyesuaikan jumlah SDM yang tersedia
- Koordinasi dengan Lintas Sektor/Lintas Program
- Melaksanakan kegiatan secara daring
- Integrasi kegiatan yang bisa dilakukan di waktu yang sama

BAB 2

TUJUAN DAN SASARAN KERJA

2.1 DASAR HUKUM

Adapun Peraturan yang menjadi acuan dalam pembuatan Laporan Tahunan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung adalah :

- 1 *International Health Regulation (IHR)* tahun 2005;
- 2 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 4 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
- 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitaah Kesehatan Jemaah Haji;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional;
- 12 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- 13 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunoeficiency virus, acquired immunodeficiency syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual;
- 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- 16 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;

- 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029
- 19 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
- 20 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 21 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025;
- 22 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- 23 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/508/2024 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji
- 24 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/2016/2024 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- 25 Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- 26 Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- 27 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan Atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik.
- 28 Rencana Aksi Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2025 - 2029.

2.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

2.2.3 TUJUAN

Tujuan Umum

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 6 tujuan Kementerian Kesehatan dengan 6 indikator tujuan untuk tahun 2025-2029 yaitu:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
2. Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau

3. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsive
4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan
5. Teknologi Kesehatan yang maju
6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien

2.2.2 SASARAN

Arah kebijakan tersebut selaras dengan Visi Pembangunan Kesehatan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029, yang bertujuan untuk memastikan masyarakat yang sehat dan produktif sebagai modal dasar pembangunan dalam menyongsong visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. RIBK 2025-2029 akan mewujudkan peningkatan angka harapan hidup, peningkatan angka harapan hidup sehat, peningkatan indeks cakupan layanan kesehatan semesta, dan pemeliharaan angka fertilitas total yang ideal. RIBK 2025-2029 mengusung enam (6) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Masyarakat Sehat
2. Komunitas Gaya Hidup Sehat.
3. Layanan Kesehatan yang Baik, Adil dan Terjangkau
4. Sistem dan Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan Responsif
5. Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang Efektif.
6. Teknologi Kesehatan yang Maju.

Sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan, Ditjen Penanggulangan Penyakit menetapkan strategi pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat yang efektif tentang faktor risiko penyakit dan pencegahannya
2. Meningkatkan kapasitas, sumber daya, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman penyakit.
3. Mendorong praktik higiene yang baik di antara masyarakat
4. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menerapkan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit secara efektif.
5. Mendorong gerakan masyarakat yang kuat untuk mengubah perilaku yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit
6. Mendorong inovasi berbasis bukti dalam pencegahan dan pengendalian penyakit
7. Kolaborasi dengan sektor kesehatan hewan, lingkungan hidup dan sektor lainnya dengan pendekatan *One Health*

Sehingga sasaran strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2025 – 2029 yaitu:

1. Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah
2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2.2.3 INDIKATOR

Indikator kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja BKK Kelas I Bandung Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBN	0,96
		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	98%
		Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/ bandara/ PLBN	0,97
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	82
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		Kinerja implementasi WBK satker	84
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%
		Persentase realisasi anggaran	96%

Tabel 2.2 Matriks RAK Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Strategi Pencapaian	Lokus (Wilker/Pos)	Tahun	Kegiatan	Anggaran				
						2025	2026	2027	2028	2029
1.	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	a. Penambahan SDM kekarantinaan	3 wilker dan 3 pos pelabuhan/bandara (Wilker Cirebon, Palabuhanratu dan Indramayu, pos pelabuhan patimban, BIJB kertajati dan Bandara Husein Sastranegara Bandung)	2025 s.d 2029	a. Rekrutmen PPPK untuk melaksanakan pengawasan di pelabuhan/ bandara	4,940,728	5,039,543	5,190,729	5,346,451	5,613,773
		b. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko.			b. Pemeriksaan orang (pelaku perjalanan, kunjungan poliklinik bukan penumpang, skrining TB/ HIV, pemeriksaan penjamah makanan), pemeriksaan alat angkut (kapal dan pesawat), pemeriksaan barang (jenazah), dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, Air, dan Vektor)					
		c. Pelaksanaan sosialisasi melalui berbagai media			c. Ketersediaan mobil <i>boarding clearance</i> , mobil evakuasi, alat pelindung diri (APD), <i>thermal scanner</i> , dokumen rencana kontingensi, dan alat pengolah data					
		d. Peningkatan sarana prasarana cegah tangkal penyakit.			d. Terjalannya jejaring kerja dan koordinasi dengan lintas sektor terkait di pelabuhan dan bandara dalam rangka pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan					

		e. Penguatan jejaring kerja lintas program dan sektoral.			e. Terjalannya jejaring kerja dan koordinasi dengan lintas sektor terkait di pelabuhan dan bandara dalam rangka pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan					
2.	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	a. Review penyusunan rencana kerja faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	3 wilker dan 3 pos pelabuhan/bandara (Wilker Cirebon, Palabuhanratu dan Indramayu, pos pelabuhan patimban, BIJB kertajati dan Bandara Husein Sastranegara Bandung)	2025 s.d 2029	a. Pelaksanaan pengendalian faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	831,868	848,505	873,961	900,179	945,188
		b. Penguatan jejaring kerja lintas sektoral dan lintas program			b. Koordinasi lintas sektor dan lintas program					
		c. Pengadaan alat dan bahan yang memadai untuk menunjang pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan			c. Pengadaan alat dan bahan yang memadai untuk menunjang pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan					
		d. Pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan penyakit berpotensi KLB			d. Penyuluhan kesehatan/ skrining penyakit menular					
		e. Peningkatan dokumentasi pencatatan dan pelaporan pengendalian faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan			e. Peningkatan dokumentasi pencatatan dan pelaporan pengendalian faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan					

		f. Peningkatan pengetahuan kapasitas SDM terkait faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan			f. Pelatihan SDM terkait faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan					
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	a. Peningkatan respon sinyal SKD KLB dan bencana	3 wilker dan 3 pos pelabuhan/bandara (Wilker Cirebon, Palabuhanratu dan Indramayu, pos pelabuhan patimban, BIJB kertajati dan Bandara Husein Sastranegara Bandung)	2025 s.d 2029	a. Koordinasi mengenai sinyal SKD KLB dan bencana	1,599	1,631	1,680	1,730	1,817
		b. Pembinaan pelabuhan dan bandara sehat			b. Kegiatan survei dan pengendalian tikus dan pinjal, survei larva Anopheles, survei dan pengendalian populasi kecoa dan lalat, survei dan pengendalian Aedes di wilayah perimeter dan buffer, pengawasan Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Sarana Air Bersih (SAB), pemeriksaan bakteriologis makanan, usap alat dan usap tangan penjamah TPM, pemeriksaan kimia lengkap dan bakteriologis kualitas air bersi di wilayah Pelabuhan/ bandara					
		c. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan sektoral dalam rangka program penyehatan lingkungan dan pengendalian vektor			c. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan sektoral dalam rangka program penyehatan lingkungan dan pengendalian vektor di Pelabuhan/bandara					

		e. Optimalisasi kegiatan deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara			d. Optimalisasi kegiatan deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara					
		e. Optimalisasi pelaksanaan pengendalian faktor risiko lingkungan dan vektor di wilayah pelabuhan dan bandara			e. Kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan dan vektor di wilayah Pelabuhan dan bandara berupa pemberian surat rekomendasi, spraying, fogging, larvasidasi, disinfeksi, deratisasi/ fumigasi dan kegiatan pengendalian lainnya.					
		f. Optimalisasi sumber daya dalam kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan			f. Peningkatan kapasitas SDM di bidang Kesehatan lingkungan dan vektor					
4	Nilai kinerja anggaran	Melakukan koordinasi antar Substansi agar Realisasi Kinerja Anggaran Sesuai dengan rencana Pelaksanaan Kegiatan dan rencana penarikan dana yang disusun awal tahun. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Peningkatan capaian output dan efisiensi anggaran. Penyusunan rencana program dan anggaran. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui aplikasi monev SMART DJA dan monev bappenas.	Induk dan Wilayah Kerja BKK Kelas I Bandung	2025 s.d 2029	Koordinasi dan Pelaksanaan Program Secara Terpadu	21,090,733	21,512,548	2,157,924	22,822,662	23,963,795

5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	a. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran meliputi : percepatan penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan tepat waktu, SPM yang akurat dan sebagainya.	Induk dan Wilayah Kerja BKK Kelas I Bandung	2025 s.d 2029	Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Pelaksanaan Anggaran	21,090,733	21,512,548	2,157,924	22,822,662	23,963,795
		b. Peningkatan manajemen kas meliputi : pengelolaan UP/ TUP yang benar, revisi DIPA, perencanaan kas, deviasi halaman III DIPA yang rendah dan meminimalisir retur SP2D.								
		c. Peningkatan kualitas laporan keuangan meliputi laporan pertanggungjawaban bendahara dan penyelesaian pagu minus.								
6.	Kinerja implementasi WBK satker	a. Peningkatan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui manajemen perubahan.	Induk dan Wilayah Kerja BKK Kelas I Bandung	2025 s.d 2029	Peningkatan Pola Pikir dan Budaya Kerja serta Peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi penyusunan standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan	3,444	3,513	3,618	3,727	3,913
		b. Penataan tata laksana melalui penyusunan dan penerapan SOP, <i>e-government</i> dan keterbukaan informasi publik.								
		c. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pola rotasi internal, pengembangan								

		pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin dan perilaku pegawai serta penerapan sistem informasi kepegawaian.								
		d. Penguatan akuntabilitas kinerja meliputi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja serta pengelolaan akuntabilitas kinerja.								
		e. Penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistle blowing system dan penanganan benturan kepentingan.								
		f. Peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi penyusunan standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan								
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	a. Penyertaan pegawai untuk mengikuti peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, workshop dan sebagainya.	Induk dan Wilayah Kerja BKK Kelas I Bandung	2025 s.d 2029	Melakukan Identifikasi secara berkala Pegawai untuk mengikuti peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, workshop dan sebagainya agar tercapai Peningkatan Kapasitas SDM	256,536	261,667	269,517	277,602	291,482

		b. Penyusunan ABK, Peta dan Informasi Jabatan.			sebanyak 20 JPL pada 80% Pegawai					
		c. Pelayanan kepegawaian meliputi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, ijin, cuti, mutasi, kenaikan gaji berkala, pensiun dan sebagainya.								
8	Persentase realisasi anggaran	a. Mengupayakan target RPD Bulanan tercapai b. Melakukan pengawasan dan pengendalian pencapaian target penyerapan c. Koordinasi dan sinergi yang harmonis dengan seluruh substansi d. Mendorong penyerapan belanja sesuai target perbulannya	Induk dan Wilayah Kerja BKK Kelas I Bandung	2025 s.d 2029	Pelaksanaan Realisasi Anggaran sesuai RPK dan RPD	27,314,205	27,748,437	28,696,304	29,557,193	31,035,053

BAB 3

STRATEGI PELAKSANAAN

3.1 STRATEGI PELAKSANAAN

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan, maka arah kebijakan Ditjen P2 merupakan lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2 yakni menguatkan deteksi, pencegahan dan respon penjabaran penyakit - faktor risiko untuk mendukung sistem kesehatan yang tangguh, dengan penekanan pada perluasan dan penambahan jenis vaksinasi, penemuan dan tata laksana Kasus penyakit menular di masyarakat dan pelayanan kesehatan (primer dan rujukan), meningkatkan skrining dan tata laksana penyakit tidak menular di pelayanan primer, surveilans berbasis laboratorium dan peningkatan kualitas lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

BKK Kelas I Bandung telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2 yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi.

Arah kebijakan BKK tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan kesehatan alat angkut.
3. Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor.
4. Penggunaan teknologi informasi.

Strategi tersebut di atas adalah strategi secara umum, sedangkan strategi pencapaian per indikator adalah sebagai berikut :

1. Indikator Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/ bandara/ PLBD. Strategi kegiatan yang dilakukan yaitu:
 - a. Penambahan SDM kekarantinaaan melalui rekrutmen ASN untuk melaksanakan pengawasan di pelabuhan/ bandara
 - b. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko.
 - c. Pelaksanaan sosialisasi melalui berbagai media cetak seperti pamflet dan banner tentang proses validasi atau pemeriksaan bagi pelaku perjalanan serta melalui media sosial tentang peraturan terbaru bagi pelaku perjalanan
 - d. Peningkatan sarana prasarana cegah tangkal penyakit.
 - e. Penguatan jejaring kerja lintas program dan sektoral.
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Strategi kegiatan yang dilakukan :
 - a. Review penyusunan rencana kerja faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

- b. Penguatan jejaring kerja lintas sektoral dan lintas program
 - c. Pengadaan alat dan bahan yang memadai untuk menunjang pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan
 - d. Peningkatan dokumentasi pencatatan dan pelaporan pengendalian faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
 - e. Peningkatan pengetahuan kapasitas SDM terkait faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara. Strategi kegiatan yang dilakukan:
- a. Peningkatan respon sinyal SKD KLB dan bencana
 - b. Pembinaan pelabuhan dan bandara sehat
 - c. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan sektoral dalam rangka program penyehatan lingkungan dan pengendalian vektor
 - d. Optimalisasi kegiatan deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara dengan melakukan kegiatan survei faktor risiko meliputi survei jentik *Aedes sp.*, survei jentik *Anopheles sp.*, survei kepadatan vektor diare (lalat dan kecoa), survei tikus dan pinjal, inspeksi hygiene sanitasi tempat-tempat umum (TTU), inspeksi hygiene sanitasi tempat pengelolaan pangan (TPP), inspeksi hygiene dan sanitasi sarana air bersih (SAB) serta pemeriksaan fisik, kimia dan bakteriologis parameter lingkungan.
 - e. Optimalisasi pelaksanaan pengendalian faktor risiko lingkungan dan vektor di wilayah pelabuhan dan bandara melalui kegiatan pemberian surat rekomendasi, larvasidasi, fogging, spraying, pemasangan perangkap tikus serta perbaikan sanitasi lingkungan.
 - f. Optimalisasi sumber daya dalam kegiatan pengendalian faktor risiko lingkungan dan vektor di wilayah pelabuhan dan bandara
4. Nilai kinerja anggaran. Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Peningkatan serapan anggaran
 - b. Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran
 - c. Peningkatan capaian output dan efisiensi anggaran
 - d. Penyusunan rencana program dan anggaran
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui aplikasi monev SMART
 - g. DJA dan monev bappenas.
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran meliputi : percepatan penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan tepat waktu, SPM yang akurat dan sebagainya.

- b. Peningkatan manajemen kas meliputi : pengelolaan UP/ TUP yang benar, revisi DIPA, perencanaan kas, deviasi halaman III DIPA yang rendah dan meminimalisir retur SP2D.
 - c. Peningkatan kualitas laporan keuangan meliputi laporan pertanggungjawaban bendahara dan penyelesaian pagu minus.
- 6. Kinerja implementasi WBK satker. Strategi kegiatan yang dilakukan :
 - a. Peningkatan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui manajemen perubahan.
 - b. Penataan tata laksana melalui penyusunan dan penerapan SOP, e- government dan keterbukaan informasi publik.
 - c. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pola rotasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin dan perilaku pegawai serta penerapan sistem informasi kepegawaian.
 - d. Penguatan akuntabilitas kinerja meliputi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja serta pengelolaan akuntabilitas kinerja.
 - e. Penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistle blowing system dan penanganan benturan kepentingan.
 - f. Peningkatan kualitas pelayanan public meliputi penyusunan standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
- 7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya. Strategi kegiatan yang dilakukan :
 - a. Penyertaan pegawai untuk mengikuti peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, workshop dan sebagainya.
 - b. penyusunan ABK, Peta dan Informasi Jabatan. Pelayanan kepegawaian meliputi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, ijin, cuti, mutasi, kenaikan gaji berkala, pensiun dan sebagainya.
- 8. Persentase Realisasi anggaran
 - a. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran meliputi : percepatan penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan tepat waktu, SPM yang akurat dan sebagainya.
 - b. Peningkatan manajemen kas meliputi : pengelolaan UP/ TUP yang benar, revisi DIPA, perencanaan kas, deviasi halaman III DIPA yang rendah dan meminimalisir retur SP2D.
 - c. Peningkatan kualitas laporan keuangan meliputi laporan pertanggungjawaban bendahara dan penyelesaian pagu minus

3.2 HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN

- a. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit melakukan penghematan/ Efisiensi anggaran belanja sebesar Rp. 6.170.995.000,-. Kebijakan efisiensi ini menjadi tantangan bagi BKK Kelas I Bandung bagaimana untuk menggunakan anggaran yang diberikan secara efektif untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pokok agar dapat mencukupi kebutuhan operasional maupun non operasional di BKK Kelas I Bandung Tahun 2025.
- b. Pada kegiatan skrining TB HIV dilaksanakan 2-3 layanan dalam 1 waktu pelayanan dengan keterbatasan jumlah SDM khususnya di wilayah kerja menyebabkan peningkatan beban kerja, risiko penurunan kualitas pencatatan dan pelaporan.
- c. Keterbatasan ketersediaan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan haji yang dapat menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan standar terapi optimal, seperti pemberian obat hanya untuk saat di embarkasi/debarkasi
- d. Penambahan kegiatan CKG dengan keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat dan bahan medis habis pakai, khususnya rapid test gula darah
- e. Kebijakan yang mewajibkan calon jamaah umroh untuk pemberian vaksin polio di bulan Juni 2025. BKK Bandung menerima dropping vaksin polio, namun tidak disertai dengan kelengkapan syringe, sedangkan anggaran belum di alokasi khusus untuk pengadaan syringe tambahan
- f. Data sekunder yang dibutuhkan untuk pelaporan surveilans sering kurang lengkap diterima dan tidak tepat waktu pada batas waktu pelaporan
- g. Pada kegiatan surveilans vaksinasi internasional, tidak semua variabel yang dibutuhkan untuk analisa data penerima vaksinasi internasional dapat diperoleh (tidak lengkap) dikarenakan Sistem Informasi Screening Online Vaksinasi Internasional (SISOVI) yang merupakan form skrining vaksinasi internasional yang memuat beberapa variabel yang dibutuhkan untuk analisa data baru diberlakukan di induk saja
- h. Terdapat pelanggaran penerbitan ICV pada fasilitas kesehatan tidak sesuai SOP
- i. Kepatuhan dalam implementasi pengisian aplikasi TANGKAP oleh nahkoda kapal masih belum maksimal dilakukan pada Tim Kerja 2 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Pada Alat Angkut dan Barang;
- j. Cakupan realisasi kegiatan pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang di Wilayah Bandara menunjukkan tren menurun di tahun 2025, terutama di Bandara Kertajati sejak Juli 2025 tidak lagi beroperasi untuk penerbangan domestik;
- k. Adanya kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga tahun 2025 yang berdampak pada banyaknya rencana kegiatan Tim Kerja 2 berupa konsultasi dan

koordinasi ke pusat, wilker, maupun lintas sektor dan lintas program yang diubah menjadi pertemuan daring;

- I. Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada jumlah hari dan bulan dalam pelaksanaan survei dan pengendalian vektor dan Binatang Pembawa Penyakit berkurang sehingga efektivitas program berkurang terutama untuk kegiatan survei tikus dan pinjal vektor pes.

3.3 TEROBOSAN YANG DILAKUKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan kebijaksanaan dan program sebagai berikut yaitu:

- a. Nota Dinas Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tanggal 18 Februari 2025 hal Pembatasan Biaya Operasional Perkantoran dan Work From Anywhere (WFA) BKK Bandung TA.2025 yang menyebutkan beberapa strategi Penghematan/efisiensi tahun 2025 di BKK kelas I Bandung sebagai berikut :
 - Penerapan Work From Anywhere (WFA) di Kantor Induk dan Wilker
 - Seluruh Pegawai baik induk maupun wilayah kerja untuk melakukan pembatasan operasional perkantoran
 - Pembatasan perjalanan dinas dengan penggunaan rincian uang harian 80% dari SBM.
 - Pembatasan penataan keindahan lingkungan kantor atau berhias;
 - Peniadaan MCU dan Pakaian Dinas;
 - Pengaturan AC (dikecualikan ruang server dan ruang vaksin)
 - Peniadaan alat tulis kantor, langganan surat kabar atau majalah, uang lembur PPNNP, Printing Supplies dan bahan cetak (buku, kop surat dan spanduk);
 - Pembatasan langganan daya dan jasa, air dan telepon.
- b. Penataan ulang alur pelayanan, pembagian tugas yang lebih spesifik sesuai kompetensi petugas, penguatan koordinasi lintas program dan pemanfaatan tenaga pendukung non-medis untuk membantu proses administrasi.
- c. Prioritas pemberian obat sesuai kondisi klinis jamaah haji serta penguatan edukasi penggunaan obat lanjutan yang harus dipenuhi secara mandiri
- d. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan membuat sebuah manajemen bank data dan menunjuk penanggung jawab dari masing-masing data yang dibutuhkan kemudian ditampilkan dalam *dashboard* data surveilans untuk data yang sudah dianalisis. Dari *dashboard* ini juga akan dipublish di website BKK Kelas I Bandung sebagai buletin epidemiologi mingguan
- e. Dilaksanakan sosialisasi agar pengimplementasian aplikasi SISOWI tidak hanya di induk namun juga di wilayah kerja yang melakukan pelayanan vaksinasi internasional

- f. Memberikan sosialisasi kepada faskes untuk mendokumentasikan saat pelaksanaan penerbitan ICV (foto *geotagging*) dan memberikan akses terbuka saat dilakukan pemeriksaan serta segera melakukan penyelidikan oleh PPNS terhadap setiap pelanggaran yang ada dan penerapan sanksi
- g. Mengefektifkan anggaran dan mengoptimalkan waktu serta SDM yang ada dengan menggabungkan beberapa kegiatan sejenis dalam 1 agenda. Serta menggabungkan kegiatan dengan kegiatan Tim Kerja lain
- h. Melakukan sosialisasi aplikasi TANGKAP (Digitalisasi Pengawasan kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan) kepada seluruh wilayah kerja Pelabuhan BKK Kelas I Bandung juga dengan para Agen Kapal agar menyampaikan kepada Nakhoda kapal untuk mengisi Aplikasi Tangkap sebelum kedatangan/ sandar di Pelabuhan;
- i. Menambahkan fitur *statement letter* yang ditandatangani dan dicap nahkoda sebagai bukti dukung / back up bahwa isi pertanyaan dalam aplikasi Tangkap sudah diisi sesuai dengan kondisi Kapal yang sebenarnya;
- j. Menambahkan pertanyaan dalam Aplikasi TANGKAP yang semula hanya *last port* namun ditambahkan *last country* yang dijadikan dasar untuk menentukan status negara terjangkit atau tidak terjangkit;
- k. Semua data terekam dalam kumpulan aplikasi Simply (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan) milik BKK Bandung. Pada Bagian Tangkap terdapat sub monitoring sanitasi kapal dalam rangka penerbitan dokumen SSCEC/SSCC dengan menambah item *geotagging* sebagai bukti bahwa alat angkut telah dilakukan pemeriksaan sebelum Kepala Balai melakukan penandatanganan di sertifikat tersebut;
- l. Menjadikan Aplikasi Tangkap menjadi salah satu inovasi pada penilaian SAKIP 2025 dengan didukung peta proses bisnis aplikasi TANGKAP, *Manual Book* Aplikasi Tangkap serta Paparan tentang maksud dan Tujuan dibangunnya Aplikasi Tangkap;
- m. Melakukan kerja sama operasional bersama *stake holder* seperti PT Angkasa Pura di Bandara terkait program pengendalian vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, sehingga lebih optimal dalam tindakan pengendalian vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.

BAB 4 HASIL KERJA

4.1 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Selama Tahun Anggaran 2025 BKK Kelas I Bandung telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mendukung program kerja, visi serta misi nya. Sampai dengan akhir Desember 2025 pencapaian kegiatan yang menjadi tupoksi dari BKK Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pencapaian Kegiatan BKK Kelas I Bandung Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran	Capaian %
Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PL BN	5.731.875.000	3.363.176.000	2.368.699.000	2.334.554.299	98,56
	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	836.384.000	463.844.000	372.540.000	372.317.394	99,94
	Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PL BN	153.428.000	92.999.000	60.429.000	60.387.403	99,93
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai kinerja anggaran	21.090.733.000	1.986.425.000	19.104.308.000	19.060.558.377	99,77
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	21.090.733.000	1.986.425.000	19.104.308.000	19.060.558.377	99,77
	Kinerja implementasi WBK satker	34.440.000	28.910.000	5.530.000	5.530.000	100,00
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	256.536.000	235.641.000	20.895.000	20.769.554	99,40

1. Input yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan :
 - a. Jumlah Sumber Daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh BKK Kelas I Bandung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 70 orang PNS, 5 orang CPNS, 24 orang PPPK sehingga total pegawai ASN di BKK Kelas I Bandung sebanyak 99 orang yang terdiri dari 2 Pejabat Struktural, 83 orang Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak dan 14 orang Jabatan Pelaksana.
 - b. Anggaran BKK Kelas I Bandung tahun 2025 yaitu sebesar Rp 28.103.396.000,- yang terdiri dari:

Tabel 4.2 Pagu Anggaran BKK Kelas I Bandung Tahun 2025

No	Kode Output	Nama Output	Alokasi Anggaran	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran	%
1	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	6.949.809.000	4.127.711.000	2.822.098.000	2.787.563.650	98.78
2	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	21.153.587.000	2.043.284.000	19.110.303.000	19.066.553.377	99.77
TOTAL			28.103.396.000	6.170.995.000	21.932.401.000	21.854.117.027	99.64

2. Output berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan/ program.

Tabel 4.3 Capaian Output BKK Kelas I Bandung Tahun 2025

No.	Kode Output	Rincian Output	Realisasi Fisik Output	Keterangan
4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk				
Sosialisasi dan Diseminasi				
1.	4249.PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi	165 Orang	- Sosialisasi/advokasi/diseminasi informasi penyelenggaraan program / peraturan kekarantinaan kesehatan dalam rangka pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang berupa pertemuan sosialisasi implementasi KMK nomor HK.01.07/MENKES/898/2025 dengan lintas sektor khususnya stakeholder di wilker Pelabuhan/Bandara dan agen pelayaran di wilayah kerja BKK Bandung secara daring yang di hadiri 57 orang peserta (termasuk di internal BKK Bandung) - Sosialisasi/advokasi/diseminasi informasi penyelenggaraan program surveilans epidemiologi di pintu masuk negara/wilayah, berupa: - Diseminasi informasi berupa pelatihan penerbitan e-ICV via zoom meeting (4 Juli 2025) sebanyak 57 peserta - Pelaksanaan sosialisasi MoU penerbitan ICV klinik/RS via zoom meeting (14 Juli 2025) sebanyak 44 peserta - Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan program SE di wilker Palabuhanratu (22 Juli 2025) sebanyak 134 peserta
Pelayanan Publik kepada Masyarakat				
2.	4249.QAA.012	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas	1.700 Orang	- Pemeriksaan penjamah makanan sejumlah 385 orang - Pemeriksaan PTM CKG sejumlah 2.726 orang - Skrining HPV DNA sejumlah 449 orang

				- Arus Mudik Lebaran dan Nataru sejumlah 50 orang - Persiapan pelayanan kesehatan haji - Surveilans Epidemiologi Penyakit Potensial Wabah Pada Situasi Khusus (terdapat blokir anggaran) - Pengawasan Penerbitan ICV di Rumah Sakit/Klinik Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
Pelayanan Publik Lainnya				
3.	4249.QAH.016	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	16 Layanan	- Inspeksi Kesehatan Lingkungan Asrama Haji dilaksanakan di 2 asrama haji yaitu asrama haji bekasi dan asrama haji indramayu. Tahap II embarkasi 2025 dan tahap I embarkasi 2026. (1 layanan) - Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan Embarkasi Haji. (1 layanan) - Pengendalian vektor pra embarkasi dan debarkasi.(1 layanan) - Uji petik keamanan pangan di pelabuhan dan bandara.(1 layanan) - Uji Petik Kualitas Air di Pelabuhan dan Bandara.(1 layanan) - Uji Petik Pencemaran Limbah Cair di Pelabuhan dan Bandara.(1 layanan) - Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan.(1 layanan) - Pengawasan dan Penyehatan Sarana Air di Pelabuhan dan Bandara. (1 layanan) - Pengawasan dan Penyehatan Tempat Umum di Pelabuhan dan Bandara. (1 layanan) - Pengelolaan Limbah Medis. (1 layanan) - Dukungan Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kota Bandung. (1 layanan) - Pembuatan Awetan Vektor dan BPP. (1 layanan) - Survei dan Pengendalian Vektor Leptospirosis. (1 layanan) - Pengendalian Vektor dan Penyehatan sanitasi Pada Situasi Matra. (1 layanan) - Konsultasi Kegiatan Kesehatan Lingkungan dan Pelabuhan/ Bandara Sehat ke Pusat. (1 layanan) - Bintek Kegiatan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Kota Bandung. (1 layanan)
4.	4249.QAH.017	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	21 Layanan	- Pengendalian Penyakit HIV (1 Layanan) Kegiatan dilaksanakan dalam rangka skrining penyakit HIV untuk luar kota dikarenakan anggaran dari SBK tidak mencukupi, skrining dilakukan ke Wilker Kertajati, Cirebon, Indramayu, Patimban dan palabuhanratu - Pengendalian Penyakit TB (1 Layanan) Kegiatan dilaksanakan dalam rangka skrining penyakit TB untuk luar kota dikarenakan anggaran dari SBK tidak mencukupi, skrining dilakukan ke Wilker Kertajati, Cirebon, Indramayu, Patimban dan palabuhanratu - Pengendalian Faktor Risiko Pasca Debarkasi (1 Layanan) Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pengawasan pelaku perjalanan internasional dalam hal ini jamaah haji - Pelaksanaan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk (1 layanan) - Verifikasi Rumor/Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi KLB/Wabah di Pintu Masuk/Wilayah (1 layanan) - Surveilans Epidemiologi dalam Rangka Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit/Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan/Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pintu Masuk/Wilayah (1 layanan) - Pengumpulan Data Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk (1 layanan)

				8. Pelaksanaan Teknis SOP Identifikasi/Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi (terdapat blokir anggaran namun disinergikan dengan kegiatan Koordinasi dalam Rangka Identifikasi dan Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan/Surveilans Epidemiologi ke Wilker Cirebon dengan output laporan kegiatan sebanyak 1 layanan) 9. Surveilans Epidemiologi Faktor Risiko Penyakit Potensial Wabah Pada Pelaku Perjalanan Internasional (terdapat blokir anggaran namun disinergikan dengan kegiatan Koordinasi Jejaring dengan Lintas Program (LP)/Lintas Sektor (LS) Terkait Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk Negara/Wilayah ke Kabupaten Cirebon, Sumedang, Cianjur, Bandung, Bekasi, Subang, Kota Bogor dengan output laporan kegiatan sebanyak 1 layanan) 10. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Fungsi Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan situasi khusus ke pusat/ Lintas sektor/ Lintas Program (1 layanan) (Anggaran di Blokir) 11. Koordinasi Pelayanan Kesehatan pada pelaku perjalanan Internasional (blokir) 12. Bimbingan teknis, Evaluasi program, Koordinasi Tim Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus (kegiatan berupa bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan yang dilakukan ke 5 wilayah kerja, yaitu Cirebon, Kertajati, Indramayu, Patimban, Pelabuhan Ratu sebanyak 1 layanan) 13. Koordinasi dan Konsultasi Identifikasi Potensi Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Ke Pusat (terdapat blokir anggaran namun disinergikan dengan kegiatan lain yaitu ketika ada kunjungan dari Direktorat Surveilans Karantina Kesehatan (SKK) Ditjen Pengendalian Penyakit (P2) dalam rangka persiapan arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada Bulan Desember, dilaksanakan juga diskusi terkait potensi pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan output laporan kegiatan sebanyak 1 layanan) 14. Konsultasi Program Surveilans Epidemiologi ke Pusat (terdapat blokir anggaran namun disinergikan dengan kegiatan lain yaitu ketika ada kunjungan dari Direktorat Surveilans Karantina Kesehatan (SKK) Ditjen Pengendalian Penyakit (P2) dalam rangka persiapan arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada Bulan Desember, dilaksanakan juga diskusi terkait program surveilans epidemiologi dengan output laporan kegiatan sebanyak 1 layanan) 15. Koordinasi Surveilans Epidemiologi di Wilayah (terdapat blokir anggaran namun disinergikan dengan kegiatan lain yaitu Surveilans Epidemiologi dalam Rangka Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit/Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan/Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pintu Masuk/Wilayah berupa SE Arus Balik Lebaran dengan output laporan kegiatan sebanyak 1 layanan) 16. Koordinasi dalam Rangka Identifikasi dan Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan/Surveilans Epidemiologi ke Wilker (1 layanan) 17. Konsultasi Identifikasi dan Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi dari Wilker ke Induk (1 layanan)
--	--	--	--	--

				18. Koordinasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat 19. Angkut dan Barang dengan LS/ LP di Pintu Masuk 20. Bimbingan teknis dan asistensi dalam rangka Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang (1 layanan) 21. Konsultasi Pelayanan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang ke Pusat dengan menghadiri undangan pusat (Rokomyanlik) berkaitan dengan kehumasan di bidang kekarantina kesehatan (1 layanan) 22. Koordinasi Jejaring dengan Lintas Program (LP)/Lintas Sektor (LS) Terkait Pencegahan Pelanggaran Kekarantina Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk Negara/Wilayah (1 layanan)
5.	4249.QAH.U04	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	20 Layanan	Pengawasan pelayanan Kesehatan Situasi Khusus dilakukan [pada kegiatan posko mudik lebaran pada bulan April dan Posko Nataru pada Bulan Desember 2025 di semua Wilker serta bandara Husein Sastranegara
6.	4249.QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	12 Layanan	Kegiatan pengendalian faktor risiko DBD dengan target 12 layanan terdiri dari 6 ha dengan rincian Bandara Husein 1 Ha, Cirebon 1 Ha, Indramayu 1 Ha, Kertajati 0,5 Ha, Palabuhanratu 1 Ha, serta Patimban 0,5 Ha sehingga total 6 Ha x 2 kali = 12 Ha. (12 layanan).
7.	4249.QAH.U08	Layanan survei faktor risiko penyakit pes	7 Layanan	Survei vektor pes yaitu dilakukan terhadap 7 lokasi, yaitu Bandara Husein S. Bandung, Cirebon, Balongan, Indramayu, Kertajati, Palabuhanratu, Patimban sehingga total 7 lokasi. Masing masing lokasi 1 hektar.
8.	4249.QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	18 Layanan	Kegiatan pengendalian faktor risiko Diare dengan target 18 layanan terdiri dari 6 ha dengan rincian Bandara Husein 1 Ha, Cirebon 1 Ha, Indramayu 1 Ha, Kertajati 0,5 Ha, Palabuhanratu 1 Ha, serta Patimban 0,5 Ha sehingga total 6 Ha x 3 kali = 18 Ha. (18 layanan).
9.	4249.QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	30 Layanan	Pelayanan skrining HIV dilakukan dengan target 30 layanan yaitu 5 layanan di wilker Kertajati, 5 layanan wilker Cirebon, 5 layanan Wilker Patimban, 5 layanan Wilker Indramayu, 5 Layanan Wilker Palabuhanratu dan 5 layanan di Induk Bandara Husein pada tiap wilker pada satu kegiatan dilkaukan dengan target 2 layanan
10.	4249.QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	20 Layanan	Pelayanan skrining TB dilkaukan dengan target 20 layanan yaitu 4 Layaan di bandara kertajati, 4 layanan wilker Cirebon, 2 layanan Wilker Patimban, 4 layanan Wilker Indramayu, 4 Layanan Wilker Palabuhanratu dan 2 layanan di Induk Bandara Husein pada tiap wilker pada satu kegiatan dilkaukan dengan target 2 layanan
11.	4249.QAH.U27	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori III	8 Layanan	Kegiatan embarkasi dilakukan pada bulan Mei 2025 sampai dengan Juni 2025 kegiatan dilakukan di 2 Embarkasi yaitu embarkasi bekasi sebanyak 61 kloter dan embarkasi KJT 28 kloter total Jawa Barat 89 Kloter
12.	4249.QAH.U30	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori III	5 Layanan	Kegiatan Debarkasi dilakukan pada bulan Juni 2025 sampai dengan Juli 2025 kegiatan dilakukan di 2 Embarkasi yaitu embarkasi bekasi sebanyak 61 kloter dan embarkasi KJT 28 kloter total Jawa Barat 89 Kloter serta layanan Bandara Kertajati. Kegiatan pada Debarkasi yaitu pelayan Bandara, Pendampingan jamaah dari Bandara ke asrama haji, pelayanan klinik, penyuluhan kesehatan.
Sarana Bidang Kesehatan				
13.	4249.RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk	14 Paket	1. Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor (Insektisida, Larvasida, Insektisida Diare, Adultisida, Baiting, Perangkap Tikus, Alat Bahan Awetan Vektor) 2. APD Pengendalian Vektor (Sepatu Safety, Tas Peralatan). 3. Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan 4. APD Kegiatan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Pada Alat Angkut dan Barang 5. Bahan Pendukung Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal Secara Online

				6. Boarding Kit dalam rangka Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk 7. Pengadaan Alat dan Bahan Pengawasan dan Penyehatan Alat Angkut dan Barang 8. APD dan Alat Kesehatan Kegiatan Surveilans Epidemiologi Pada Situasi Bencana/Situasi Khusus (1 paket) 9. Bahan Pendukung Kegiatan Surveilans Epidemiologi dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan (1 paket) 10. Media KIE untuk Diseminasi Informasi (1 paket) 11. Media KIE Posko Mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru (pembelanjaan berupa pembuatan spanduk dan rol baner pada kegiatan posko mudik lebaran dan posko mudik nataru untuk 5 wilker) 12. Media KIE Kesehatan Haji (pembelanjaan berupa pembuatan spanduk, rol bener dan leaflet pada kegiatan haji embarkasi kjt dan jks) 13. Belanja bahan habis pakai untuk pelayanan klinik di pintu masuk negara (pembelanjaan berupa Belanja Bahan Kesehatan, Laboratorium klinik Layanan Kesehatan Situs, stik cholestrol, bahan kesehatan dan obat obatan posko mudik, stik gula darah dan stik asam urat, obat obatan habis pakai klinik dan wilker) 14. APD Petugas Kesehatan Haji di Bandara (pembelanjaan berupa safety shoes, tas peralatan dan jaket)
Layanan Manajemen SDM				
14.	4249.TBC.001	Pelatihan kesehatan	44 Orang	1. Mengikuti Kegiatan diklat terkait pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan secara daring dilaksanakan sebanyak 1 kali yaitu dilakukan pada tanggal 3 Februari 2025 sebanyak 2 orang dengan tema kursus keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan. Diklat ini dilaksanakan secara luring via media zoom 2. 20 orang mengikuti Workshop Pemeriksaan Kesehatan Haji Laik Terbang secara daring dan 13 orang mengikuti Pelatihan analisis data epidemiologi untuk seluruh anggota Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan secara daring 3. Mengikuti diklat, Seminar, workshop Pelayanan Kesehatan teknis sebanyak 13 orang. 4. Mengikuti diklat, pelatihan, workshop Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Pada Alat Angkut dan Barang secara luring yang dihadiri 2 orang dengan jabfung Epidkes pada pertemuan PIEN ke-12 di Yogyakarta pada tanggal 23 - 25 Juli 2025 dan 2 orang pegawai BKK Bandung di wilker Pelabuhan Ratu untuk mengikuti pelatihan Sea Survival di Bogor Pada Tanggal 30 Oktober 2025.
4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
Layanan Dukungan Manajemen Internal				
15.	4815.EBA.956	Layanan BMN	2 Layanan	1. Laporan BMN Tahunan 2024 2. Laporan BMN Semester 1 3. Laporan Penghapusan dan Pemusnahan BMN
16.	4815.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	3 Layanan	1. Konsultasi ke pusat terkait pelayanan publik 2. Penerbitan buletin Web Medika 3. Monev implementasi keterbukaan publik
17.	4815.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4 Layanan	1. Undangan secara daring terkait Kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis 2. Undangan secara daring terkait Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (DAK JFAK) 3. Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 225 Tentang Pengelolaan SDM Kesehatan. 4. Rapat monitoring dan evaluasi SOP oleh Tim pemantau SOP

18.	4815.EBA.962	Layanan Umum	6 Layanan	1. Pencetakan media KIE berhias 2. Pembelian ATK, Penyusunan RUP dan proses pembuktian mini kompetisi belanja modal pengolahan data 2025 3. Sewa Kendaraan Tahun 2025 selama 2 bulan 4. Langganan aplikasi online dan paket data komunikasi 5. Pembuatan Pas Bandara 6. Pembuatan Pas Pegawai
19.	4815.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	2 Layanan	1. Laporan Profil BKK Bandung 2. Notulen Rapat Penyusunan profil
20.	4815.EBA.994	Layanan Perkantoran	13 Bulan	1. Pemberian Gaji dan Tukin PNS dan PPPK selama 12 Bulan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Layanan Manajemen SDM Internal				
21.	4815.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	4 Orang	1. 4 orang mengikuti Kegiatan Pelantikan Jabatan Fungsional
22.	4815.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	1. 3 orang mengikuti bimtek online penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional 2. 3 orang mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional 3. 4 orang mengikuti E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Angkatan II Tahun 2025 4. 1 orang mengikuti kegiatan Pelatihan Jarak Jauh Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Pertama 5. 1 orang mengikuti kegiatan Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) "Mengulas PMK 131/2024: Pajak Pertambahan Nilai" Tahun 2025
Layanan Manajemen Kinerja Internal				
23.	4815.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen	1. Laporan Penyusunan Dokumen E-Renggar 2. Hasil Desk Pagu Indikatif TA 2026 3. Hasil Desk Pagu Alokasi TA 2026
24.	4815.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10 Dokumen	1. Laporan Kinerja Tahun 2024 2. CHR Laporan Kinerja Tahun 2024 oleh SKI 3. CHR laporan Kinerja Tahun 2024 oleh Eselon I 4. CHR Penilaian SAKIP Tahun 2024 oleh SKI 5. CHD Penilaian SAKIP Tahun 2024 oleh Eselon I 6. Laporan Kinerja Tahun 2025 Semester I 7. CHR Laporan Kinerja Tahun 2025 Semester I oleh SKI 8. CHD Laporan Kinerja Tahun 2025 Semester I oleh Eselon I 9. Laporan Kinerja Tahun 2025 Triwulan III 10. Pengiriman Perjanjian Kinerja Tahun 2025
25.	4815.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	7 Dokumen	1. Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2024 2. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 3. Laporan Rekonsiliasi Pengelolaan PNB 4. Rapat Sosialisasi Peraturan dan Koordinasi Pengelolaan PNB Pada Pihak Internal dan Eksternal 5. Bukti Konsultasi Permasalahan Pengelolaan/Pelaporan PNB 6. Laporan Penilaian PIPK 7. Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2025
26.	4815.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	4 Dokumen	1. Pencetakan media KIE WBK 2. Pendampingan assesment penilaian WBK via wa 3. Menghadiri monev SP4N Lapor di Pusat 4. Laporan UPG 5. Laporan PC
27.	4815.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	1. Laporan Pengelolaan Kearsipan Tahun 2025

Pencapaian output diatas tidak lepas dari proses kegiatan yang dapat dilaporkan sebagai berikut :

A. 4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk

Pagu anggaran Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Rp. 6.949.809.000.- dengan Blokir sebesar Rp. 4.127.711.000,- sehingga Pagu efektif sebesar Rp. 2.822.098.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.787.563.650,- hal ini berdampak pada beberapa Rincian Output yang terkena Blokir anggaran. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1) 4249.PEF.001 Sosialisasi dan Diseminasi

- a) Sosialisasi/advokasi/diseminasi informasi penyelenggaraan program/peraturan kekarantinaan kesehatan dalam rangka pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang.

Terdapat blokir anggaran pada kegiatan ini. Namun untuk mencapai target realisasi output, kegiatan ini tetap dilaksanakan dengan cara disinergikan dengan kegiatan lain diantaranya:

- Koordinasi pada Agen pelayaran PT Pertamina Transkontinental membahas terkait regulasi baru implementasi KMK nomor HK.01.07/MENKES/898/2025 di Indramayu (9 Desember 2025)
- Koordinasi Pengajuan Penerbitan Dokumen PHQC di Patimban (17 Juli 2025)
- Koordinasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk Negara dengan Keagenan kapal PT. Zio Jaya Bahari di Pelabuhan Cirebon (14 Agustus 2025)
- Koordinasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang dengan Lintas Sektor (Agen) di Palabuhanratu (14 Agustus 2025)
- Bimtek pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang di Wilker Indramayu (14 Oktober 2025)

Gambar 4.1 Pelaksanaan Sosialisasi di Wilayah Kerja



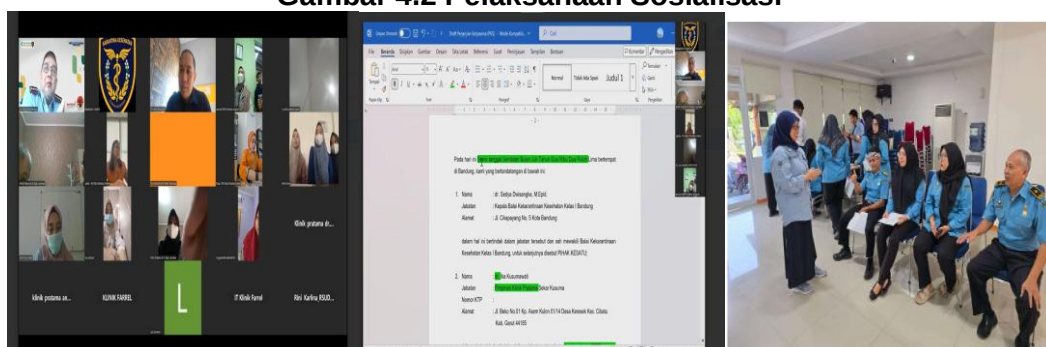


b) Sosialisasi/advokasi/diseminasi informasi penyelenggaraan program surveilans epidemiologi di pintu masuk negara/wilayah

Terdapat blokir anggaran pada kegiatan ini. Namun untuk mencapai target realisasi output, kegiatan ini tetap dilaksanakan disinergikan dengan kegiatan lain yaitu:

- Diseminasi informasi berupa pelatihan penerbitan e-ICV via zoom meeting (4 Juli 2025) sebanyak 57 peserta
- Pelaksanaan sosialisasi MoU penerbitan ICV klinik/RS via zoom meeting (14 Juli 2025) sebanyak 44 peserta
- Pelaksanaan sosialisasi penyelenggara
- an program SE di wilker Palabuhan Ratu (22 Juli 2025) sebanyak 134 peserta

Gambar 4.2 Pelaksanaan Sosialisasi



2) 4249.QAA.012 Pelayanan kesehatan di kesehatan/bandara/lintas batas

- a) Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Bencana, Even Nasional/Internasional, keagamaan, hari besar

Pelayanan kesehatan pada situasi khusus dilaksanakan sebagai upaya perlindungan kesehatan pada kondisi yang memerlukan kesiapsiagaan dan respon cepat, seperti kegiatan haji, arus mudik lebaran dan natar, hari kesehatan nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak kali yaitu:

- 1) Persiapan posko mudik lebaran di Cirebon pada Bulan Maret
- 2) Persiapan pos pelayanan kesehatan haji di Asrama Haji Bekasi dan Indramayu pada Bulan April
- 3) Penerimaan dropping perbekes dan obat haji dari Dirjen Binfar di Asrama Haji Bekasi
- 4) Pemeriksaan CKG dan skrining HPV dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional di setiap wilayah kerja. Jumlah orang yang telah diperiksa skrining HPV sebanyak 449 orang

Gambar 4.3 Pelaksanaan Persiapan Posko Mudik



- b) Pelayanan Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan, Pemeriksaan Penyakit Menular dan tidak menular di Pintu Masuk Negara

Kegiatan ini mencakup pelayanan kesehatan, penyuluhan kesehatan, serta pemeriksaan penyakit menular pada penjamah makanan dan penyakit tidak menular bagi pelaku perjalanan dan kelompok sasaran lainnya dalam rangka program Cek Kesehatan Gratis. Jumlah penjamah makanan yang telah diperiksa di tahun 2025 sebanyak 385 orang dilakukan sebanyak yaitu

- 1) Pada bulan Januari di TPP Karangsang, Cirebon, Blanakan, Palabuhanratu, dan BIJB Kertajati,
- 2) Pada bulan Maret di TPP Palabuhanratu
- 3) Pada bulan Juli di TPP PPN Kejawan, TPP Palabuhanratu, KUD Mina Blanakan, BIJB Kertajati

- 4) Pada bulan Agustus dilakukan koordinasi dan evaluasi PML dan PTM ke Puskesmas Pusakanegara Patimban, juga pemeriksaan di TPP Indramayu, KUD Mina Blanakan
- 5) Pada bulan Oktober di TPP PPN Kejawan

Jumlah orang yang telah diperiksa CKG di tahun 2025 sebanyak 2726 orang dilakukan sebanyak yaitu

- 1) Pada bulan Oktober dilakukan 7 kali di Blanakan, Kejawan, Palabuhanratu, SDN Kertajati, SMK Indramayu, PLTU Indramayu, Patimban, Bea Cukai Cirebon
- 2) Pada bulan November dilakukan 6 kali di PPN Palabuhanratu, Kampung Gumelar Palabuhanratu, Karangsong, Blanakan, BIJB Kertajati dan KSOP Cirebon

c) Verifikasi Klinik dan Rumah Sakit Yang Mengajukan ICV

Kegiatan dilakukan berupa Verifikasi dan pengawasan ke klinik yang mengajukan E-ICV ke 5 Lokasi, tanggal 25 Januari 2025 RS Hermina Sukabumi, 23 Januari 2025 Klinik Jasa Prima Cirebon, Klinik Adelin Indramayu, RS Pamanukan Center 23 Januari 2025, Klinik Budi Mulya Ciamis 22 September 2025

d) Surveilans Epidemiologi Penyakit Potensial Wabah Pada Situasi Khusus

Terdapat blokir anggaran pada kegiatan ini sehingga tidak dilaksanakan.

e) Pengawasan Penerbitan ICV di Rumah Sakit/Klinik Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional serta memberikan perlindungan bagi pelaku perjalanan internasional. Kegiatan ini dilakukan melalui visitasi atau kunjungan ke rumah sakit dan klinik yang telah diberikan izin untuk melaksanakan penerbitan ICV.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:

- 1) Klinik Kimia Farma Sukabumi terkait penerbitan ICV tanpa disuntik pada Bulan Januari
- 2) RSU Hermina Sukabumi pada Bulan Januari
- 3) Klinik Salsabila Majalengka pada Bulan Februari
- 4) Klinik Jasa Prima Kota Cirebon pada Bulan Februari
- 5) Klinik Kimia Farma Ratu Adeline Indramayu pada Bulan Februari
- 6) RS Pamanukan Medical Center Kabupaten Subang pada Bulan Februari

- 7) Klinik Kimia Farma Indramayu pada Bulan Oktober
- 8) Klinik Jasa Prima Cirebon pada Bulan Oktober
- 9) Klinik Salsabila Kertajati pada Bulan Oktober.

Gambar 4.4 Pengawasan Penerbitan ICV di Rumah Sakit/Klinik Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Kekaratinaan Kesehatan



3) 4249.QAH.016 Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan

a) Inspeksi Kesehatan Lingkungan Asrama Haji

Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Asrama Haji dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan Asrama Haji memenuhi persyaratan kesehatan sehingga jemaah haji, petugas, dan pengunjung terlindungi dari risiko gangguan kesehatan selama proses embarkasi.

Pada Tahun 2025, Inspeksi Kesehatan Lingkungan Asrama Haji dilaksanakan sebanyak 4 kali, dengan rincian 2 kali pemeriksaan tahap II untuk Embarkasi Tahun 2025 yang dilaksanakan tanggal 22 April 2025 di Asrama Haji Bekasi dan 24 April 2025 di Asrama Haji Indramayu. Dua kegiatan IKL lainnya yaitu Inspeksi Kesehatan Lingkungan tahap I untuk persiapan Embarkasi 2026 yang dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2025 di Asrama Haji Bekasi dan 23 Oktober di Asrama Haji Indramayu.

Gambar 4.5 Inspeksi Kesehatan Lingkungan Asrama Haji



b) Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan Embarkasi Haji

Kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan di Asrama Haji dilakukan untuk menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang disajikan kepada jemaah haji. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta pemantauan kondisi kesehatan penjamah makanan selama masa embarkasi. Pemeriksaan kesehatan penjamah meliputi pemeriksaan fisik mata, rambut, kuku, kulit, pemeriksaan tekanan darah, riwayat

penyakit serta pemeriksaan rectal swab bagi penjamah makanan untuk memastikan penjamah terbebas dari penyakit.

Kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan penjamah dilakukan H-1 dari pelaksanaan embarkasi haji tahun 2025 yaitu pada tanggal 29 April 2025 di 2 asrama haji yaitu asrama haji bekasi dan asrama haji indramayu. Total penjamah yang diperiksa di asrama haji bekasi yaitu 125 orang, sedangkan di asrama haji indramayu yaitu sebanyak 70 orang.

c) Pengendalian Vektor Pra Embarkasi dan Debarkasi

Kegiatan pengendalian vektor yang dilakukan saat embarkasi dan debarkasi yaitu survei dan pengendalian jentik di lingkungan asrama haji, dan survei dan pengendalian lalat di lingkungan asrama haji. Sedangkan untuk tikus dan kecoa tidak dilakukan karena kepadatan rendah. Kegiatan ini berlangsung selama pelaksanaan embarkasi maupun debarkasi haji, baik di asrama haji Bekasi maupun asrama haji Indramayu.

Khusus kegiatan debarkasi di tahun 2025, dilakukan pemasangan perangkat kecoa di dalam bus jemaah haji dikarenakan adanya laporan dari kondektur keluhan kecoa di dalam bus. Hasilnya ditemukan kecoa jenis *Blatella germanica* dengan kepadatan tinggi dan Tidak Memenuhi Syarat, sehingga kegiatan pemasangan perangkat kecoa dilakukan secara berkala. Kejadian ini terjadi di asrama haji Bekasi saja.

d) Uji Petik Keamanan Pangan di Pelabuhan dan Bandara

Kegiatan uji petik keamanan pangan di pelabuhan dan bandara dilakukan untuk menjamin kualitas peralatan dan penjamah pangan agar tidak terjadi risiko keracunan makanan. Kegiatan uji petik keamanan pangan yang dilakukan di tahun 2025 yaitu hanya pemeriksaan usap tangan penjamah dan usap alat makan yang dilakukan menggunakan metode rapid tes diagnostik menggunakan alat *hygiene inspection kit*. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 di Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Gambar 4.6 Uji Petik Keamanan Pangan di Pelabuhan dan Bandara



e) Uji Petik Kualitas Air di Pelabuhan dan Bandara

Kegiatan uji petik kualitas air di pelabuhan dan bandara dilakukan untuk memastikan keamanan kualitas air yang akan digunakan baik oleh penumpang, karyawan maupun pengunjung. Dengan adanya uji petik kualitas air akan diketahui zat-zat yang tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan sehingga secara cepat dapat dilakukan tindakan pengendalian agar kualitas air selalu memenuhi baku mutu kualitas lingkungan.

Kegiatan uji petik kualitas air dilakukan di seluruh wilayah kerja BKK Kelas I Bandung yaitu di Bandara Husein S. Bandung, BIJB Kertajati, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Indramayu, Pelabuhan Patimban serta Palabuhanratu. Kegiatan ini dilakukan 8 kali di tahun 2025 yaitu pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, Oktober, November dan Desember 2025.

f) Uji Petik Pencemaran Limbah Cair di Pelabuhan dan Bandara

Kegiatan uji petik pencemaran limbah cair di pelabuhan dan bandara dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kualitas limbah cair di wilayah pelabuhan dan bandara guna mencegah pencemaran lingkungan serta melindungi kesehatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikarenakan adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan penilaian uji petik pencemaran limbah cair, kami melakukan analisis data dari hasil pengujian limbah cair salah satunya yang dilakukan pihak PT Angkasa Pura dimana dokumen berasal dari Kegiatan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL) yang wajib dilakukan pihak bandara. Melalui laporan tersebut kami melakukan analisis bagaimana situasi kualitas limbah cair yang berada di lingkungan bandara.

g) Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan dilakukan melalui kegiatan inspeksi. Inspeksi ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas makanan

yang diolah sesuai dengan hygiene sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dan mendapatkan makanan dan minuman yang berkualitas meliputi indikator tertentu, seperti lokasi dan bangunan, fasilitas sanitasi dapur, ruang makan, gudang makanan, bahan makanan, makanan jadi, pengelolaan makanan, tempat penyimpanan makanan, penyajian, peralatan, tenaga kerja, pakaian kerja.

Kegiatan inspeksi ini rutin dilakukan minimal satu bulan sekali di seluruh TPP yang ada di wilayah kerja BKK Kelas I Bandung sehingga total inspeksi terhadap TPP dilakukan 12 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun rata-rata temuan dari hasil inspeksi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih ditemukan penjamah makanan menggunakan perhiasan;
- 2) Ditemukan perindukan vektor jentik nyamuk dari kontainer yang ada di dalam TPP semisal tatakan dispenser dan tatakan pot bunga;
- 3) Tempat sampah belum dikelola terpisah dan tempat sampah tidak dilapisi plastik.

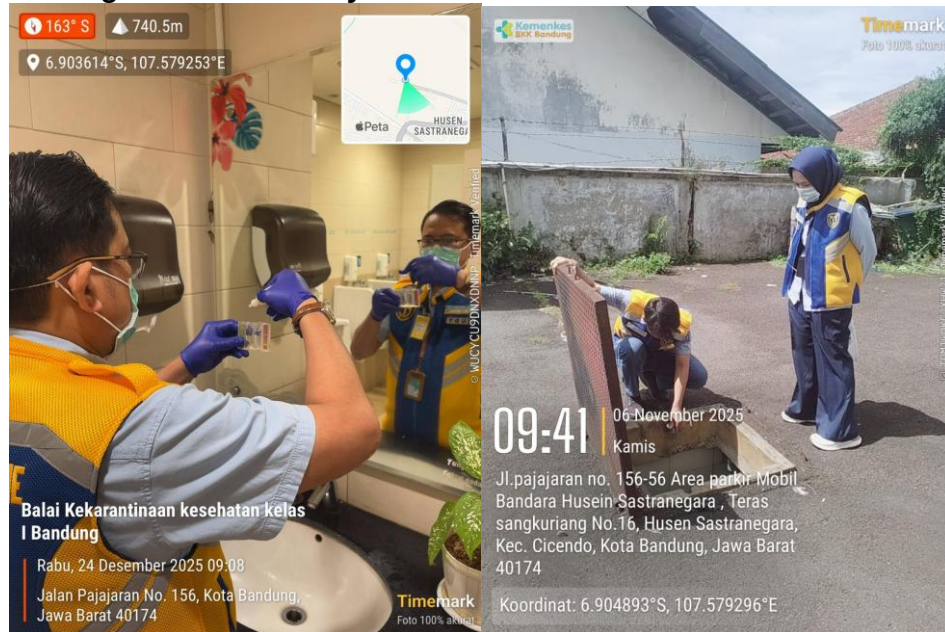
h) Pengawasan dan Penyehatan Sarana Air di Pelabuhan dan Bandara

Pengawasan dan penyehatan sarana air di pelabuhan dan bandara dilakukan guna menjamin kualitas dan kuantitas air bersih maupun air minum yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memenuhi syarat kualitas secara fisik, kimia maupun bakteriologi serta kuantitasnya terpenuhi sesuai kebutuhan. Upaya yang dilakukan dengan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan sarana air bersih serta uji petik kualitas air guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium.

Kegiatan pengawasan dan penyehatan sarana air bersih rutin dilakukan minimal satu bulan sekali di seluruh sarana air bersih yang ada di wilayah kerja BKK Kelas I Bandung baik pelabuhan maupun bandara sehingga total inspeksi terhadap TPP dilakukan 12 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun rata-rata temuan dari hasil inspeksi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih ditemukan bahan pencemar di sekitar Sarana Air Bersih seperti adanya kandang ternak maupun dekat dengan Tempat Pengumpulan Sampah;
- 2) Hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan kandungan bakteriologi pada air bersih. Biasanya terhadap hasil ini petugas akan melakukan tindakan disinfeksi terhadap air bersih melalui pemberian kaporit tablet.

Gambar 4.7 Pengawasan dan Penyehatan Sarana Air di Pelabuhan dan Bandara



i) Pengawasan dan Penyehatan Tempat Umum di Pelabuhan dan Bandara

Kegiatan pengawasan dan penyehatan tempat umum di pelabuhan dan bandara bertujuan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana di wilayah pelabuhan dan bandara memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali di seluruh lingkungan dan bangunan yang ada di wilayah perimeter bandara maupun pelabuhan. Kegiatan dilakukan melalui inspeksi yang berisi item persyaratan kondisi bangunan apakah sudah sesuai persyaratan atau tidak. Biasanya dalam inspeksi ini didukung dengan peralatan deteksi seperti alat untuk pengukuran suhu, kelembapan, kebisingan, pencahayaan, gas emisi maupun debu untuk membantu mengisi form inspeksi.

Terhadap temuan potensi bahaya di bidang kesehatan lingkungan diberikan rekomendasi perbaikan terhadap fasilitas yang tidak memenuhi syarat. Kegiatan pengawasan ini mencakup Pemeriksaan kondisi sanitasi umum di area yang meliputi diantaranya:

- 1) Inspeksi kondisi sarana penyediaan air bersih (PAB).
- 2) Evaluasi sanitasi pencahayaan ruangan.
- 3) Pengukuran tingkat kebisingan ruangan.
- 4) Pemeriksaan sanitasi tempat cuci tangan (wastafel).
- 5) Pemeriksaan sanitasi kamar mandi/toilet (WC).
- 6) Pemeriksaan sanitasi tempat sampah.
- 7) Evaluasi keberadaan vektor.

Gambar 4.8 Pengawasan dan Penyehatan Tempat Umum di Pelabuhan dan Bandara



j) **Pengelolaan Limbah Medis**

Pengelolaan limbah medis di BKK Kelas I Bandung adalah kegiatan penanganan limbah yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan, diantaranya yaitu dari kegiatan pelayanan vaksinasi internasional, pelayanan kesehatan embarkasi debarkasi haji, serta pelayanan medis sederhana di masing masing wilayah kerja terhadap kesehatan pekerja maupun stakeholder di pelabuhan dan bandara.

Terkait kegiatan pengumpulan limbah medis di BKK Kelas I Bandung, dikarenakan jumlahnya yang sedikit di wilayah kerja seperti Cirebon, Indramayu, Pelabuhan Ratu Sukabumi, Kertajati, biasanya limbah akan dikumpulkan dalam wadah aman untuk kemudian dibawa ke TPS limbah medis yang ada di kantor induk Bandung. Setelah terkumpul semua, maka akan dilakukan pengangkutan limbah medis oleh pihak ke-3. Adapun jumlah limbah medis yang sudah dilakukan pengangkutan di tahun 2025 yaitu sebanyak 159 kg dari seluruh pelayanan vaksinasi dan pelayanan kesehatan di BKK Kelas I Bandung baik induk maupun wilayah kerja.

Gambar 4.9 Pengelolaan Limbah Medis



k) Dukungan Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kota Bandung

Dukungan pemberantasan sarang nyamuk di kota Bandung hadir melalui adanya proyek implementasi pelepasliaran nyamuk *Aedes aegypti* ber-wolbachia yang merupakan proyek dari Kementerian Kesehatan yang diujicobakan salah satunya di Kota Bandung. Pada tahun 2025, proyek ini dikembangkan di kecamatan Kiaracondong kota Bandung yang terdiri dari 6 kelurahan, yaitu kelurahan Babakan Sari, Babakan Surabaya, Kebon Jayanti, Kebon Kangkung, Sukapura, Cicaheum,

Bentuk dukungan BKK Kelas I Bandung adalah melakukan monitoring evaluasi melalui kegiatan penangkapan nyamuk di lingkungan pemukiman warga sambil mensosialisasikan ulang tentang proyek ini kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran penyakit DBD. Selain itu BKK Kelas I Bandung juga berperan sebagai identifikator nyamuk yang akan diperiksa di laboratorium untuk melihat progres perkembangan nyamuk *Aedes aegypti* ber-wolbachia di lapangan.

Gambar 4.10 Dukungan Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kota Bandung



l) Pembuatan Awetan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (BPP)

Kegiatan pembuatan awetan vektor dan BPP merupakan proses lanjutan dari kegiatan identifikasi vektor dan BPP. Kegiatan ini bertujuan untuk pembelajaran

dan peningkatan kompetensi petugas, media koleksi sebagai bukti kegiatan dan pembelajaran pegawai, serta edukasi untuk mahasiswa dan masyarakat umum.

Kegiatan ini memerlukan alat, bahan serta metode tertentu yang harus dipelajari dengan baik sebelum melakukannya. Ada jenis awetan basah maupun kering dan dalam pelaksanaannya memerlukan tahapan pra pembuatan awetan seperti contohnya jentik dan pinjal yang harus direndam dulu dalam larutan alkohol bertingkat. Adapun untuk nyamuk, lalat dan kecoa biasanya dilakukan dengan teknik pinning, dan ada juga awetan basah dimana vektor dan BPP direndam dalam larutan formalin.

BKK Kelas I Bandung saat ini sudah melakukan koleksi awetan untuk jentik dan nyamuk *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, serta pinjal tikus.

m) Survei dan Pengendalian Vektor Leptospirosis

Kegiatan survei dan pengendalian vektor leptospirosis berfokus pada kegiatan surveilans tikus dimana tikus menjadi reservoir utama dalam penyebaran penyakit leptospirosis pada manusia. Pada surveilans vektor leptospirosis, setiap tikus yang dikoleksi, selain dilakukan identifikasi spesies tikus juga dilakukan pengambilan sampel organ ginjal tikus untuk kemudian dilakukan pengujian laboratorium molekuler untuk mengetahui apakah di dalam ginjal tikus terdapat bakteri leptospirosis atau tidak yang menjadi penyebab sakit.

Pada tahun 2025 terdapat kasus leptospirosis yang terjadi di kabupaten Cirebon yaitu pada bulan Januari 2025. Terhadap situasi tersebut dilakukan surveilans vektor yaitu penangkapan tikus yang dilakukan kolaborasi bersama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, BKK Kelas I Bandung dan BBLKM Jakarta.

n) Pengendalian Vektor dan Penyehatan Sanitasi Pada Situasi Matra

Kegiatan pengendalian vektor dan penyehatan sanitasi pada situasi matra dilakukan pada kondisi khusus. Adapun yang dimaksud dengan situasi matra tersebut diantaranya yaitu kegiatan embarkasi debarkasi haji, situasi natal dan tahun baru, situasi idul fitri, maupun situasi matra lainnya misalkan event internasional.

Untuk tahun 2025, kegiatan pengendalian vektor dan penyehatan sanitasi berfokus pada situasi matra di embarkasi dan debarkasi haji. Kegiatan pengendalian vektor yang dilakukan yaitu pengendalian larva nyamuk dan pengendalian vektor diare lalat. Sedangkan penyehatan sanitasi dilakukan terhadap Higiene Bangunan, Air Bersih, Jasa Boga, serta alat angkut yang digunakan jemaah haji.

- o) Konsultasi Kegiatan Kesehatan Lingkungan dan Pelabuhan/Bandara Sehat Ke Pusat

Kegiatan konsultasi kegiatan Kesehatan Lingkungan dan Pelabuhan/ Bandara Sehat ke pusat merupakan kegiatan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait permasalahan yang dihadapi petugas di lapangan terkait pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan yang mendukung penilaian bandara/ pelabuhan sehat yang merupakan program dari Kemenkes.

Untuk tahun 2025, kegiatan konsultasi ke pusat tersebut tidak dilakukan dikarenakan anggaran tersebut terkena efisiensi anggaran sehingga kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan.

- p) Bintel Kegiatan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan 3273 - Kota Bandung

Kegiatan pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan di kota Bandung yaitu merupakan kegiatan koordinasi dan konsultasi antara BKK Kelas I Bandung dengan Dinas Kesehatan kota Bandung membahas tentang program kerja sama diantaranya yang sedang dilaksanakan yaitu terkait kegiatan implementasi nyamuk *Aedes aegypti* ber-wolbachia di kota Bandung.

Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan terkena dampak efisiensi anggaran dari Kemenkes.

4) 4249.QAH.017 Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut

- a) Pengendalian Skrining Deteksi Dini Penyakit HIV/ AIDS

Kegiatan ini dilaksanakan melalui skrining HIV pada kelompok sasaran sesuai ketentuan. Kegiatan dengan penyuluhan, konseling, pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan darah dan rujukan. Telah dilaksanakan pengendalian penyakit HIV AIDS sebanyak 9 kali pelayanan pada tanggal 25 April di Pelindo Cirebon, 21-23 Juli di dermaga Palabuanratu, 30-31 Juli di Pelabuhan Cirebon, 7-8 Agustus di PLTU Sumur Adem Indramayu, 16-17 Oktober di Pelabuhan Cirebon, 20-21 Oktober di BIJB Kertajati, 23-24 Oktober di Palabuanratu, 19-20 November di PT. Perdana Mina dan 21 November Pelabuhan Muara Ciasem. Jumlah orang yang dikendalikan sebanyak 261 orang.

- b) Pengendalian Skrining Deteksi Dini Penyakit TBC

Kegiatan ini dilaksanakan melalui skrining TB pada kelompok sasaran sesuai ketentuan. Kegiatan dengan penyuluhan, konseling, pemeriksaan anamnesa, dan rujukan. Telah dilaksanakan pengendalian penyakit TB sebanyak 9 kali pelayanan pada tanggal 25 April di Pelindo Cirebon, 21-23 Juli di dermaga Palabuanratu, 30-31 Juli di Pelabuhan Cirebon, 7-8 Agustus di PLTU Sumur Adem

Indramayu, 8-9 Oktober di Indramayu, 13-14 Oktober di Pelabuhan Patimban, 20-21 Oktober di BIJB Kertajati, 19-20 November di PT. Perdana Mina dan 8 Desember di Kantor Induk. Jumlah orang yang dikendalikan sebanyak 800 orang.

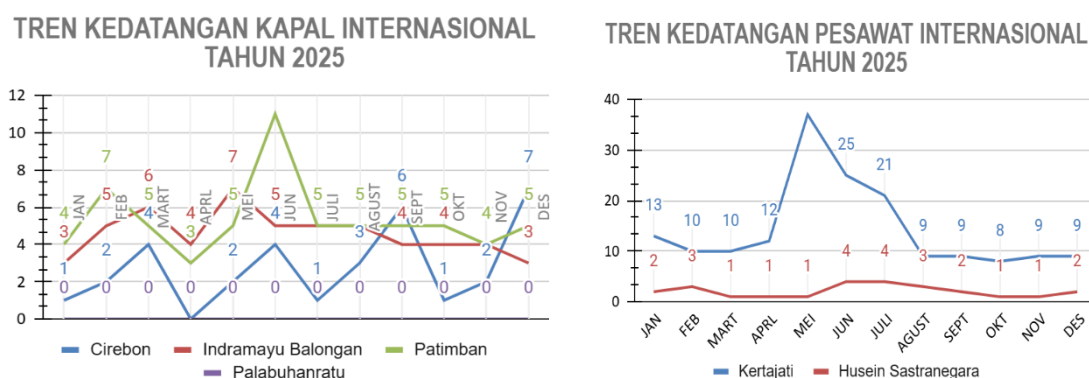
c) Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Situasi khusus dan Pelaku Perjalanan Internasional, serta evaluasi pasca Debarkasi

- 1) Pasca debarkasi ke Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Majalengka, Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Ciamis, Kab. Banjar, Kab. Pangandaran, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kab. Indramayu, dan Kab. Kuningan.
- 2) Pengawasan dan Pengendalian KLB keracunan makanan di Kecamatan Cihampelas dan Cipongkor Kab. Bandung Barat

d) Pelaksanaan Pengawasan Faktor Risiko Penyakit pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk

Maksud dan tujuan utama pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang adalah mencegah, menangkal, dan mengendalikan masuk atau keluarnya penyakit menular/wabah serta faktor risiko kesehatan (vektor penyakit, kontaminasi) melalui sarana transportasi (laut, udara, darat) dan barang yang dibawa, guna melindungi kesehatan masyarakat di pintu masuk negara (pelabuhan, bandara, PLBN). Berikut grafik tren kedatangan kapal dan pesawat dari luar negeri masuk ke wilayah kerja BKK Bandung selama tahun 2025:

Grafik 4.1 Tren kedatangan kapal dan pesawat dari luar negeri masuk ke wilayah kerja BKK Bandung selama tahun 2025

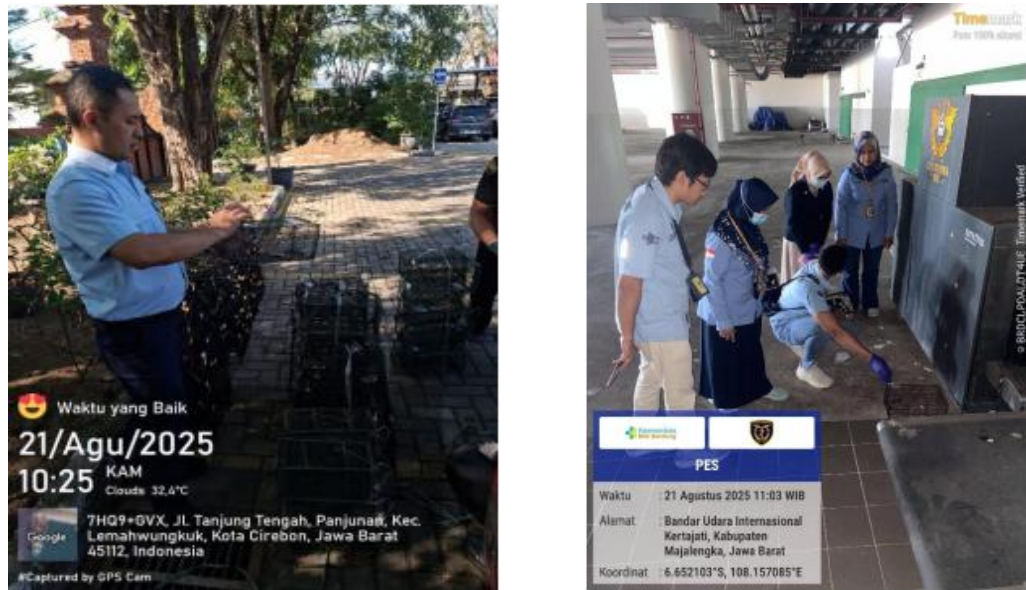


Pelaksanaan pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang di pintu masuk negara masuk kedalam kode mata anggaran (4249.QAH.017.053.D.524113).

Adapun kegiatan tersebut mencakup:

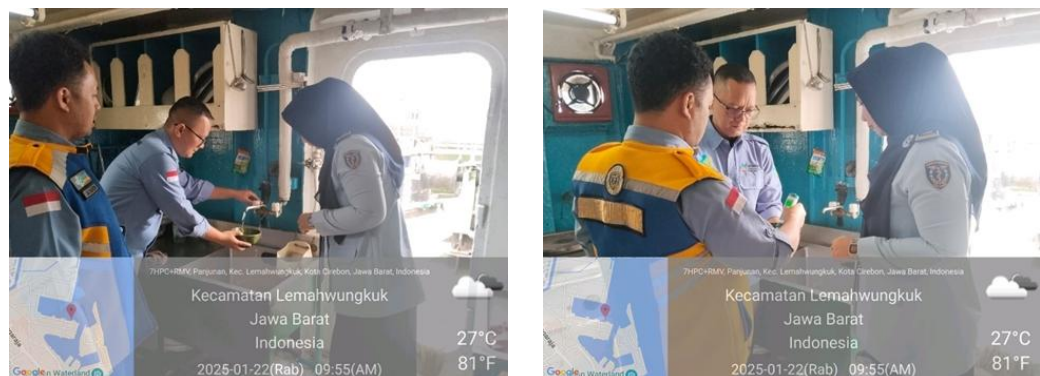
1. Pengawasan faktor risiko masuknya vektor penyakit PES ke dalam alat angkut dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk;

Gambar 4.11 Pengawasan faktor risiko masuknya vektor penyakit PES ke dalam alat angkut dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk



2. Pengawasan sarana air bersih/ barang lainnya yang akan diangkut ke dalam alat angkut Pelaksanaan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk;

Gambar 4.12 Pengawasan sarana air bersih/ barang lainnya yang akan diangkut ke dalam alat angkut Pelaksanaan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk



3. Pengambilan sampel air bersih pada alat angkut dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk;

Gambar 4.13 Pengambilan sampel air bersih pada alat angkut dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk



Adapun pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dilakukan di semua wilayah kerja dengan target pagu anggaran sesuai dengan diskusi antara Tim Kerja 2 di Induk dengan petugas di wilayah kerja . Berikut target kegiatan pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dengan rincian:

- Wilker Pel. Cirebon sebanyak 36 orang/kali/ tahun
- Wilker Pel. Indramayu, Wilker Patimban, Wilker Palabuhan Ratu dan Wilker Bandara Kertajati masing-masing sebanyak 12 orang/ kali/ tahun.

Kegiatan pengawasan faktor risiko pada alat angkut sudah teralisasi 100%. Berikut laporan realisasi kegiatan dilakukan pada tempat, jumlah dan waktu sebagai berikut:

- Wilker Cirebon : Januari (6), Maret (3), April (3), Agustus (6), Oktober (6), November (6), dan Desember (6);
- Wilker Indramayu : Januari (2), Maret (1), Juni (1), Juli (1), Agustus (2), September (1), Oktober (2), November (2);
- Wilker Patimban : Januari (2), April (1), Juli (1), Agustus (2), Oktober (2), November (2), dan Desember (2);
- Wilker Kertajati : Januari (2), April (1), Juli (1), Agustus (2), , Oktober (2), November (2) dan Desember (2);
- Wilker Pelabuhan Ratu : Januari (2), April (2), September (1), Oktober (2), November (2) dan Desember (3).

Gambar 4.14 Kegiatan pengawasan faktor risiko pada alat angkut



Kegiatan pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang yang sudah dilakukan oleh petugas BKK Bandung di masing-masing wilker, dilakukan monitoring dan evaluasi sekaligus pelaksanaan bimbingan teknis melalui sosialisasi, asistensi dan konfirmasi serta verifikasi data laporan kegiatan. Selama tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan yang termasuk kedalam pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang, diantaranya :

- Pada tanggal 7 - 8 Agustus 2025 telah dilakukan kegiatan verifikasi pembubuhan tanda tangan elektronik pada dokumen kekarantinaan kesehatan di kapal dan implementasi aplikasi Tangkap di Wilker Pelabuhan Patimban dan Wilker Indramayu, yang dilaksanakan oleh 3 orang selama 2 hari.

Gambar 4.15 Kegiatan verifikasi pembubuhan tanda tangan elektronik pada dokumen kekarantinaan kesehatan di kapal dan implementasi aplikasi Tangkap di Wilker Pelabuhan Patimban dan Wilker Indramayu



- Pada tanggal 3 dan 4 September 2025 telah dilakukan monev penerbitan SSCEC/ SSCC di Wilker Pelabuhan Cirebon. Mengapa dipilih wilker Pelabuhan Cirebon? karena hanya wilker Pel. Cirebon yang selama ini sering dilakukan kegiatan pengendalian terhadap faktor risiko kesehatan di alat angkut. Kegiatan dilaksanakan oleh 2 orang selama 2 hari.

e) Verifikasi Rumor / Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi KLB/Wabah di Pintu Masuk/Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan ketika BKK Kelas I Bandung mendapatkan informasi adanya kasus suspek penyakit menular potensial wabah di pintu masuk atau dari Dinas Kesehatan maupun hasil pemantauan e-SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon). Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan ke instansi terkait (Dinas Kesehatan Kab/Kota) atau kunjungan ke lapangan bersama instansi terkait untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sehingga dapat segera dilakukan upaya pengendalian. Kegiatan yang dilakukan berupa pengambilan data umum kasus suspek, hasil anamnesa sementara kasus suspek, serta upaya yang sudah dilakukan oleh lintas program/lintas sektor terkait.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- 1) Penyelidikan epidemiologi kasus leptospirosis di Desa Purwawinangun Kabupaten Cirebon pada Bulan Februari
- 2) Verifikasi rumor kasus polio di RSUD Hermina Pasteur pada Bulan Februari
- 3) Verifikasi rumor kasus hantavirus di Kabupaten Bandung Barat pada Bulan Juli
- 4) Verifikasi rumor kasus suspek MERS pada jemaah yang pulang dari umroh di Kabupaten Bandung Barat pada Bulan Oktober
- 5) Verifikasi rumor suspek dengue di Puskesmas Kesunean Cirebon pada Bulan Oktober

Gambar 4.16 Verifikasi Rumor / Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi KLB/Wabah di Pintu Masuk/Wilayah



f) Surveilans Epidemiologi dalam Rangka Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit/Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan/Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pintu Masuk/Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemantauan faktor risiko kesehatan lingkungan bangunan umum, sarana air bersih, dan tempat pengelolaan pangan di area perimeter dan buffer pelabuhan dan bandara di wilayah kerja, juga melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan atau puskesmas di area buffer untuk

mencari data sekunder kunjungan penyakit potensi KLB/penyakit akibat vektor atau akibat faktor risiko kesehatan lingkungan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali yaitu:

- 1) Di wilker Pelabuhan Palabuhan Ratu pada Bulan Januari
- 2) Di wilker Pelabuhan Indramayu pada Bulan Februari
- 3) Di wilker Pelabuhan Patimban pada Bulan Februari
- 4) Di wilker Bandar Udara Jawa Barat Kertajati pada Bulan Februari
- 5) Di wilker Pelabuhan Cirebon pada Bulan Februari
- 6) SE dalam rangka deteksi dini Faktor Risiko penyakit/kesling/vektor dan BPP di pintu masuk/wilayah di wilker Bandara Bandar Udara Jawa Barat Kertajati pada Bulan Maret
- 7) Di wilker Bandar Udara Jawa Barat Kertajati dalam rangka SE Arus Balik Lebaran pada Bulan April
- 8) SE faktor risiko penyakit di UPT Asrama Haji Bekasi yang bersamaan dengan inspeksi kesehatan lingkungan pada Bulan April
- 9) SE faktor risiko penyakit di UPT Asrama Haji Indramayu yang bersamaan dengan inspeksi kesehatan lingkungan pada Bulan April
- 10) SE dalam rangka deteksi dini Faktor Risiko penyakit/kesling/vektor dan BPP di pintu masuk/wilayah di wilker Pelabuhan Ratu bersamaan dengan skrining TB/HIV pada Bulan Juli
- 11) SE dalam rangka deteksi dini FR penyakit/kesling/vektor dan BPP di pintu masuk/wilayah di wilker Cirebon pada Bulan Agustus
- 12) SE dalam rangka deteksi dini FR penyakit/kesling/vektor dan BPP bersamaan dengan inspeksi kesehatan lingkungan di Asrama Haji Bekasi pada Bulan Oktober
- 13) SE dalam rangka deteksi dini FR penyakit/kesling/vektor dan BPP bersamaan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis pegawai Bea Cukai Cirebon pada Bulan Oktober
- 14) SE dalam rangka deteksi dini FR penyakit/kesling/vektor dan BPP di wilker Patimban terkait temuan kasus suspek dengue dan chikungunya di Puskesmas Pusanagara Subang pada Bulan Oktober
- 15) SE dalam rangka deteksi dini FR penyakit/kesling/vektor dan BPP dalam bentuk koordinasi petugas wilker ke induk pada Bulan Oktober
- 16) SE dalam rangka deteksi dini FR penyakit/kesling/vektor dan BPP di wilker Cirebon dan Kertajati dalam rangka persiapan nataru pada Bulan Desember

Gambar 4.17 Surveilans Epidemiologi dalam Rangka Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit/Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan/Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pintu Masuk/Wilayah



g) Pengumpulan Data Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk

Saat ini penyebaran penyakit dapat melebihi kecepatan masa inkubasi penyakit, sehingga di setiap pintu masuk negara (point of entry) harus mempunyai kemampuan yang baik dalam deteksi dini dan respon setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan KLB/wabah maupun kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) salah satunya melalui pengumpulan data surveilans epidemiologi. Kegiatan ini dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data 10 (sepuluh) besar kunjungan penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat dari pelabuhan/bandara terutama data penyakit menular. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkoordinasi dan mengunjungi fasyankes di wilayah buffer pelabuhan/bandara. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat melihat tren penyakit atau masalah kesehatan yang ada di wilayah sekitar pelabuhan/bandara sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan kewaspadaan terhadap penyakit tertentu yang berpotensi menjadi wabah di pintu masuk.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali yaitu:

- 1) Di wilker Pelabuhan Palabuhan Ratu pada Bulan Januari
- 2) Di wilker Pelabuhan Patimban pada Bulan Februari
- 3) Di wilker Bandar Udara Jawa Barat Kertajati pada Bulan Februari
- 4) Di wilker Pelabuhan Cirebon pada Bulan Februari
- 5) Di wilker Pelabuhan Indramayu pada Bulan Februari
- 6) Di wilker Pelabuhan Palabuhan Ratu pada Bulan Maret
- 7) Di wilker Pelabuhan Cirebon pada Bulan Maret
- 8) Di wilker Pelabuhan Palabuhan Ratu pada Bulan April
- 9) Di wilker Pelabuhan Cirebon pada Bulan April
- 10) Di wilker Pelabuhan Indramayu pada Bulan Mei
- 11) Di wilker Pelabuhan Indramayu pada Bulan Juni
- 12) Di wilker Pelabuhan Cirebon pada Bulan Juni
- 13) Di wilker Pelabuhan Cirebon pada bulan Bulan Juli
- 14) Di wilker Pelabuhan Indramayu pada Bulan Juli

- 15) Di wilker Bandar Udara Jawa Barat Kertajati pada Bulan Juli
- 16) Di wilker Pelabuhan Patimban pada Bulan Juli
- 17) Di wilker Pelabuhan Palabuhan Ratu pada Bulan Juli
- 18) Di wilker Pelabuhan Cirebon pada bulan Bulan September
- 19) Di wilker Pelabuhan Indramayu pada Bulan September
- 20) Di wilker Bandar Udara Jawa Barat Kertajati pada Bulan September
- 21) Di wilker Pelabuhan Patimban pada Bulan September
- 22) Di wilker Pelabuhan Palabuhan Ratu pada Bulan September
- 23) Di wilker Pelabuhan Cirebon pada Bulan Oktober
- 24) Di wilker Pelabuhan Indramayu pada Bulan Oktober
- 25) Di wilker Bandar Udara Jawa Barat Kertajati pada Bulan Oktober
- 26) Di wilker Pelabuhan Patimban pada Bulan Oktober
- 27) Di wilker Pelabuhan Palabuhan Ratu pada Bulan Oktober
- 28) Di wilker Pelabuhan Cirebon pada Bulan November
- 29) Di wilker Pelabuhan Indramayu pada Bulan November
- 30) Di wilker Bandar Udara Jawa Barat Kertajati pada Bulan November
- 31) Di wilker Pelabuhan Patimban pada Bulan November
- 32) Di wilker Pelabuhan Palabuhan Ratu pada Bulan November
- 33) Di wilker Pelabuhan Cirebon pada Bulan Desember
- 34) Di wilker Pelabuhan Indramayu pada Bulan Desember
- 35) Di wilker Bandar Udara Jawa Barat Kertajati pada Bulan Desember
- 36) Di wilker Pelabuhan Patimban pada Bulan Desember
- 37) Di wilker Pelabuhan Palabuhan Ratu pada Bulan Desember

Gambar 4.18 Pengumpulan Data Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk



h) Pelaksanaan Teknis SOP Identifikasi/Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi

Terdapat blokir anggaran pada kegiatan ini. Namun untuk mencapai target realisasi output, kegiatan ini tetap dilaksanakan disinergikan dengan kegiatan lain yaitu: Koordinasi dalam Rangka Identifikasi dan Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan/Surveilans Epidemiologi ke Wilker. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di wilker Cirebon sebagai upaya tindak lanjut tindak lanjut atas temuan ICV palsu yang dimiliki ABK yang datang dari Singapura pada Bulan Januari.

Gambar 4.19 Pelaksanaan Teknis SOP Identifikasi/Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi



- i) Surveilans Epidemiologi Faktor Risiko Penyakit Potensial Wabah Pada Pelaku Perjalanan Internasional

Terdapat blokir anggaran pada kegiatan ini. Namun untuk mencapai target realisasi output, kegiatan ini tetap dilaksanakan disinergikan dengan kegiatan lain yaitu: Koordinasi Jejaring dengan Lintas Program (LP)/Lintas Sektor (LS) Terkait Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk Negara/Wilayah yang dilaksanakan di Bulan September di Kabupaten Cirebon, Sumedang, Cianjur, Bandung, Bekasi, Subang, Kota Bogor.

Gambar 4.20 Surveilans Epidemiologi Faktor Risiko Penyakit Potensial Wabah Pada Pelaku Perjalanan Internasional



- j) Koordinasi Pelaksanaan Tugas Fungsi Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus ke Pusat / Lintas Sektor / Lintas Program (kegiatan tidak dilakukan karena anggaran diblokir)
- k) Koordinasi Pelayanan Kesehatan pada pelaku perjalanan Internasional (kegiatan tidak dilakukan karena anggaran diblokir)
- l) Bimbingan teknis, Evaluasi program, Koordinasi Tim Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus

Bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta keseragaman pelaksanaan tugas sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Evaluasi program dilakukan secara berkala untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan guna meningkatkan mutu dan efektivitas program. Koordinasi dilaksanakan melalui pertemuan lintas program dan lintas sektor guna memperkuat sinergi, kesiapsiagaan, serta respon terhadap potensi risiko kesehatan, kegawatdaruratan, dan situasi khusus.

- 1) Koordinasi untuk Posko Nataru di Wilayah Kerja Keratajati dan Cirebon pada 15-16 Desember
- 2) Bimbingan Teknis ke Wilayah Kerja Keratajati pada 26-27 November
- 3) Koordinasi pelayanan kesehatan haji Tahun 2026 di Asrama Haji Bekasi pada 22 Oktober, Asrama Haji Indramayu pada 23 Oktober
- 4) Evaluasi program tim kerja 4 khususnya penerbitan SKLT di BIJB Kertajati pada 9-10 Oktober
- 5) Evaluasi program tim kerja 4 khususnya pemeriksaan ABK di Pelabuhan Patimban pada 2-3 Oktober

Gambar 4.21 Evaluasi program tim kerja 4 khususnya pemeriksaan ABK di Pelabuhan Patimban



- m) Koordinasi dan Konsultasi Identifikasi Potensi Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Ke Pusat

Terdapat blokir anggaran pada kegiatan. Namun untuk mencapai target realisasi output, kegiatan ini tetap dilaksanakan disinergikan dengan kegiatan lain yaitu ketika ada kunjungan dari Direktorat Surveilans Karantina Kesehatan (SKK) Ditjen Pengendalian Penyakit (P2) dalam rangka persiapan arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada Bulan Desember, dilaksanakan juga diskusi terkait potensi pelanggaran kekarantinaan kesehatan.

Gambar 4.22 Koordinasi dan Konsultasi Identifikasi Potensi Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Ke Pusat



n) **Konsultasi Program Surveilans Epidemiologi ke Pusat**

Terdapat blokir anggaran pada kegiatan. Namun untuk mencapai target realisasi output, kegiatan ini tetap dilaksanakan disinergikan dengan kegiatan lain yaitu ketika ada kunjungan dari Direktorat Surveilans Karantina Kesehatan (SKK) Ditjen Pengendalian Penyakit (P2) dalam rangka persiapan arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada Bulan Desember, dilaksanakan juga diskusi terkait program surveilans epidemiologi.

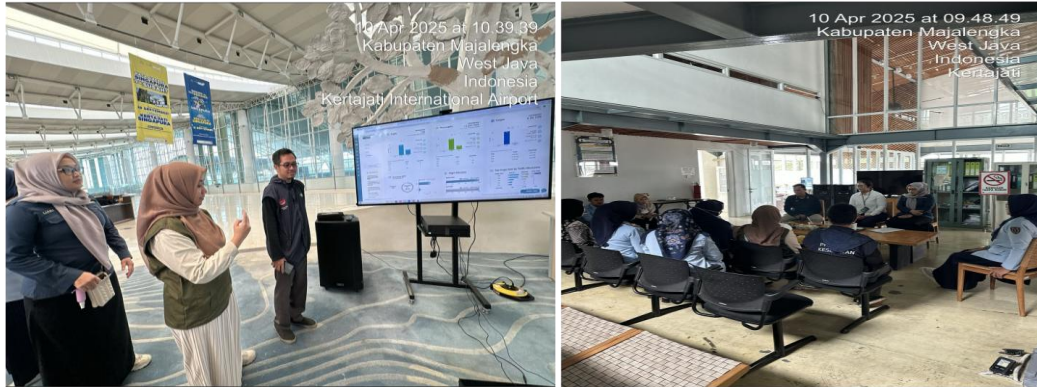
Gambar 4.23 Konsultasi Program Surveilans Epidemiologi ke Pusat



o) **Koordinasi Surveilans Epidemiologi di Wilayah**

Terdapat blokir anggaran pada kegiatan ini sehingga tidak dilaksanakan. Namun untuk mencapai target realisasi output, kegiatan ini tetap dilaksanakan disinergikan dengan kegiatan lain yaitu kegiatan Surveilans Epidemiologi dalam Rangka Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit/Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan/Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Pintu Masuk/Wilayah berupa SE Arus Balik Lebaran pada Bulan April.

Gambar 4.24 Koordinasi Surveilans Epidemiologi di Wilayah



- p) Koordinasi dalam Rangka Identifikasi dan Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan/Surveilans Epidemiologi ke Wilker

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi wadah untuk sharing informasi tentang kebijakan atau program terbaru terkait pencegahan pelanggaran kekarantinaan terutama dengan diberlakukannya Kepdirjen yang baru, serta program surveilans epidemiologi yang dimiliki oleh petugas induk ke wilker, updating aplikasi terkait pelaporan kegiatan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi, juga untuk melakukan bimbingan teknis terkait jabatan fungsional epidemiologi dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih muda di wilker. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu: di wilker Cirebon sebagai upaya tindak lanjut atas temuan ICV palsu yang dimiliki ABK yang datang dari Singapura pada Bulan Januari.

Gambar 4.25 Koordinasi dalam Rangka Identifikasi dan Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan/Surveilans Epidemiologi ke Wilker



- q) Konsultasi Identifikasi dan Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi dari Wilker ke Induk

Pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pencegahan pelanggaran kekarantinaan kesehatan serta surveilans epidemiologi di setiap wilayah kerja BKK Kelas I Bandung tidak selalu berjalan optimal. Pada pelaksanaan di lapangan, tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas. Konsultasi dari

petugas wilker ke induk diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Hal ini dikarenakan di induk terdapat pimpinan (kepala kantor), dan ketua tim kerja. Hal ini terutama jika permasalahan yang dihadapi memerlukan arahan dari pimpinan (kepala kantor) sebagai *decision maker*. Kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) kali terkait penemuan kasus penerbitan ICV di klinik tanpa disuntik di Klinik Kimia Farma Sukabumi pada Bulan Januari.

Gambar 4.26 Konsultasi Identifikasi dan Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi dari Wilker ke Induk



- r) Koordinasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang dengan LS/ LP di Pintu Masuk

Koordinasi lintas sektor dan lintas program mutlak diperlukan di pintu masuk negara (bandara, pelabuhan, PLBN) dalam rangka mencegah masuk/keluarnya penyakit menular potensial wabah. Sinergi ini memastikan pengawasan efektif terhadap manusia, barang, dan alat angkut, serta memperkuat respon terhadap risiko kesehatan. Koordinasi pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang dengan LS/ LP di pintu masuk masuk dalam mata anggaran

(4249.QAH.017.053.R.524113)

Kegiatan koordinasi tersebut mencakup :

- 1) Rekonsiliasi data pengawasan kedatangan/ keberangkatan kapal luar negeri maupun dalam negeri dalam rangka Koordinasi pelaksanaan pengawasan alat angkut dan barang dengan stakeholder.
- 2) Koordinasi pelaksanaan pengawasan alat angkut dan barang dengan lintas sektor (agen);

Kegiatan koordinasi tersebut dilakukan di semua wilayah kerja dengan target pagu anggaran di tentukan oleh Tim Kerja Induk , dengan rincian:

- Wilker Pel. Cirebon sebanyak 24 orang/kali/ tahun

Gambar 4.27 Koordinasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang dengan LS/ LP di Pintu Masuk



- Wilker Pel. Indramayu, Wilker Patimban, Wilker Palabuhan Ratu dan Wilker Bandara Kertajati masing-masing sebanyak 8 orang/ kali/ tahun

Gambar 4.28 Kegiatan koordinasi pengawasan faktor risiko kesehatan



Kegiatan Koordinasi terkait pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang dilakukan pula dari Induk ke wilayah kerja , terurai sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor/ lintas program terhadap alur pengawasan barang bawaan jemaah haji di Asrama haji Indramayu pada tanggal 4 April 2025 pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sanitasi asrama tahap kedua untuk persiapan penyelenggaraan haji embarkasi 2025M/1446 H, yang diikuti oleh 2 orang selama 1 hari
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor/ lintas program terhadap alur pengawasan barang bawaan jemaah haji di Asrama haji Indramayu pada tanggal 4 April 2025 yang diikuti oleh 2 orang selama 1 hari:

Gambar 4.29 Koordinasi dengan lintas sektor/ lintas program terhadap alur pengawasan barang bawaan jemaah haji di Asrama haji Indramayu



Pintu bagian Aula Utama Yang Tertutup dan Bangunan Penyimpanan Obat Paket Jamaah

- Pada tanggal 17 Juli dilakukan koordinasi LP/LS dan verifikasi rumor adanya Kasus Virus Hanta di Kab. Bandung Barat yang dilakukan oleh 2 orang selama 1 hari bertempat di Dinas Kesehatan KBB;
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor/ lintas program terhadap alur pengawasan barang bawaan jemaah haji termasuk gudang obat paket jemaah di Asrama haji Indramayu pada tanggal 23 Oktober 2025 pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sanitasi asrama tahap pendahuluan untuk persiapan penyelenggaraan haji embarkasi 2026 M/1447 H, yang diikuti oleh 3 orang selama 1 hari;
- Melakukan kegiatan koordinasi terhadap layanan pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang ke wilker Pel. Indramayu [ada tanggal 9 Desember 2025 sebanyak 3 orang selama 1 hari.

s) Bimbingan Teknis dan Asistensi dalam rangka Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang **(4249.QAH.017.053.T.524111)**

Kegiatan bimbingan teknis dan asistensi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan keterampilan teknis sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya. Kegiatan ini juga bermaksud memperkuat pemahaman regulasi, meningkatkan kinerja instansi, serta mendukung implementasi program pemerintah secara efektif dan efisien.

Kegiatan bimbingan teknis dan asistensi dalam rangka pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang selama tahun 2025 telah dilakukan sebagai berikut :

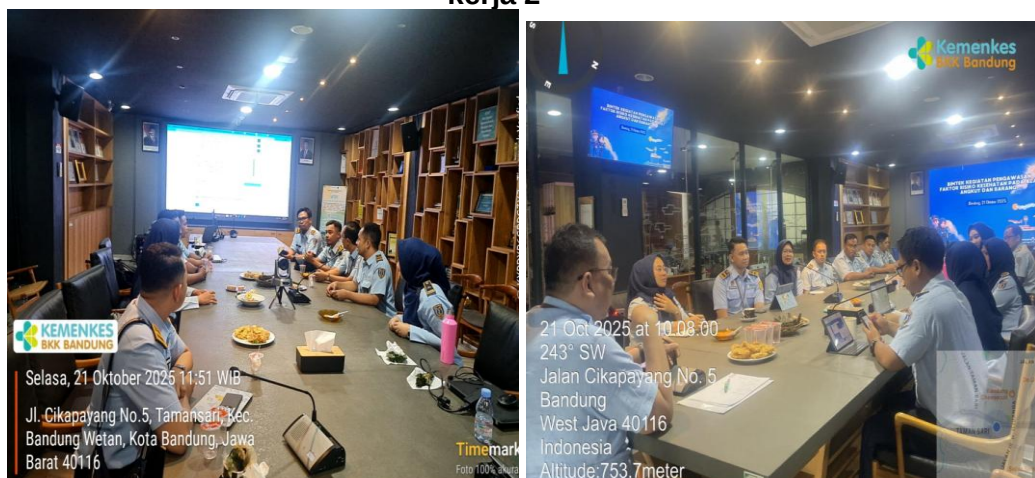
- 1) Monev dan bimbingan teknis terhadap penyusunan SOP pengawasan lalu lintas jenazah di wilayah kerja Bandara Kertajati - Kab. Majalengka yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2026 sebanyak 1 orang kali 1 hari

Gambar 4.30 Monev dan bimbingan teknis terhadap penyusunan SOP pengawasan lalu lintas jenazah di wilayah kerja Bandara Kertajati - Kab. Majalengka



- 2) Pada tanggal 21 - 22 Agustus 2025 melakukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi di wiker Kertajati dalam rangka pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut pesawat dan barang di bandara Kertajati ;
- 3) Tanggal 7 - 9 Oktober 2025 dilakukan kegiatan Bimtek di wilker Bandara Kertajati sekaligus kegiatan surveilans epidemiologi Pasca Debarkasi Haji di Kab. Majalengka yang dilaksanakan oleh 2 orang selama 3 hari;
- 4) Tanggal 14 - 15 Oktober 2025 dilakukan kegiatan Bimtek di wilker Pelabuhan Indramayu yang dilaksanakan oleh 2 orang selama 2 hari;
- 5) Tanggal 16 - 17 Oktober 2025 dilakukan kegiatan Bimtek di wilker Pelabuhan Cirebon yang dilaksanakan oleh 2 orang selama 2 hari;
- 6) Petugas/ staf Tim Kerja 2 di wilayah kerja melakukan kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja tugas dan fungsi tim kerja 2 yang diikuti oleh 13 orang dari wilker ke induk yang dilaksanakan 1 hari pada tanggal 21 Oktober 2025. Surat undangan, daftar hadir, notulensi dan dokumen tersimpan dalam arsip tim kerja 2.

Gambar 4.31 Kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja tugas dan fungsi tim kerja 2



- t) Konsultasi Pelayanan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang ke Pusat (4249.QAH.017.053.T.524111)

Kegiatan konsultasi terkait dengan pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang dilaksanakan pada :

- Tanggal 24 September 2025, kegiatan konsultasi dilakukan dengan memenuhi undangan pertemuan dari pusat sekaligus pelaksanaan konsultasi di bidang kehumasan kekarantinaan kesehatan yang ada pada unit BKK Bandung. Pertemuan dilakukan 1 hari di hotel Grand Travello Kota Bekasi yang diikuti oleh 2 orang selama 1 hari;

Gambar 4.32 Kegiatan konsultasi terkait dengan pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang



- u) Koordinasi Jejaring dengan Lintas Program (LP)/Lintas Sektor (LS) Terkait Pencegahan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk Negara/Wilayah

Setiap pelabuhan dan bandara wilayah kerja mempunyai otoritas atau stakeholder masing-masing. BKK Kelas I Bandung untuk menjalankan pelayanan kekarantinaan kesehatan secara optimal di setiap wilayah kerjanya dan mencegah adanya pelanggaran, memerlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan kegiatan untuk melakukan koordinasi baik dengan stakeholder maupun pengguna jasa layanan BKK Kelas I Bandung.

Selain itu, kegiatan surveilans epidemiologi di wilayah kerja, terutama upaya deteksi dini penyakit melalui pelaporan Event Based Surveillance (EBS) aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), selama ini belum optimal berjalan dikarenakan belum semua fasilitas kesehatan terutama di area buffer wilayah kerja terpapar informasi mengenai aplikasi ini dan juga penyakit-penyakit yang perlu dilaporkan ke dalam aplikasi tersebut berikut batasannya. Oleh karena itu, dilakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan di area buffer wilayah kerja dalam rangka sharing informasi terkait dengan hal ini.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:

- 1) Di wilker Pelabuhan Palabuhan Ratu (koordinasi terkait program pemberantasan TB di wilayah dermaga Palabuhan Ratu) pada Bulan Januari
- 2) Di wilker Bandar Udara Jawa Barat Kertajati (koordinasi terkait prosedur pengisian Satu Sehat Health Pass (SSHP) pada penumpang kedatangan internasional dalam mencegah penyebaran penyakit menular MPox dan Human Metapneumovirus (HNPV) yang sedang terjangkit saat ini, diskusi tentang tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara terkait pemberian informasi dan edukasi kepada penumpang yang datang dari negara tertentu atau wilayah dengan risiko tinggi, pemantauan penumpang menggunakan teknologi) pada Bulan Februari
- 3) Di wilker Pelabuhan Patimban dengan agen BTJ Lines (untuk lebih memperhatikan kesehatan ABK/crew terkait kewaspadaan wabah ataupun penyakit infeksi emerging, himbauan untuk melaporkan report kesehatan crew/ABK dalam setiap bulan sebagai informasi gambaran penyakit yang muncul atau gambaran kesehatan ABK) pada Bulan Februari
- 4) Di wilker Pelabuhan Cirebon di Klinik Jasa Prima (melakukan pembahasan terkait jenis pelanggaran kekarantinaan kesehatan, langkah sebagai tindakan pencegahan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, telusur terkait alur kegiatan vaksinasi) pada Bulan Februari
- 5) Di wilker Pelabuhan Indramayu dengan PT Pertamina Transkontinental sebagai agen kapal bertanggungjawab untuk melaporkan status kesehatan kapal dan awak kapal secara tepat waktu pada Bulan Februari
- 6) Di Asrama Haji Bekasi berupa menghadiri pelaksanaan simulasi keberangkatan angkutan udara haji 1446 H/2025 M dengan Kementerian Perhubungan pada Bulan Mei
- 7) Koordinasi jejaring LP/LS terkait SE dalam kegiatan Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional (PIEN) ke-12 di Yogyakarta pada Bulan Juli
- 8) Jejaring LP/LS terkait pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Kabupaten Sukabumi pada Bulan Juli
- 9) Pelaksanaan surveilans epidemiologi pasca debarkasi pada jemaah haji Jawa Barat di Kabupaten Cirebon, Sumedang, Cianjur, Bandung, Bekasi, Subang, Kota Bogor pada Bulan September.

Gambar 4.33 Pelaksanaan surveilans epidemiologi pasca debarkasi pada jemaah haji Jawa Barat di Kabupaten Cirebon, Sumedang, Cianjur, Bandung, Bekasi, Subang, Kota Bogor pada Bulan September.

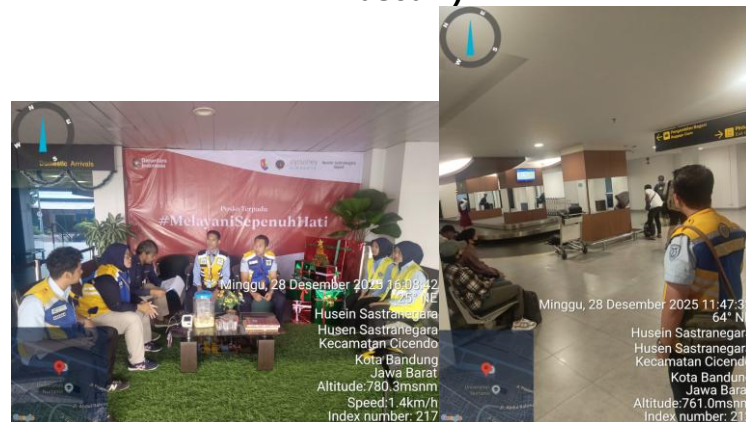


5) 4249.QAH.U04 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus

a) Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus

- 1) Pelayanan kesehatan posko mudik lebaran di Cirebon, Indramayu, Kertajati di Bulan Maret
- 2) Pelayanan kesehatan posko mudik natal dan tahun baru di Cirebon, Indramayu, Kertajati di Bulan Desember
- 3) Pengendalian ke RS rujukan haji yaitu RS Mitra Plumbon pada Bulan April
- 4) Pelayanan posko Nataru pengendalian Faktor risiko penyakit di Wilker (Kertajati, Cirebon, Indramayu, Pelabuhan Ratu, Patimban dan posko Bandara Husein)

Gambar 4.34 Pelayan posko Nataru pengendalian Faktor resiko penyakit diwilker (kertajati, Cirebon, indramayu, pelabuhan ratu, patimban dan posko bandara huseuin)



6) 4249.QAH.U07 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD

a) Pengendalian vektor DBD

Kegiatan pengendalian vektor DBD di lingkungan bandara dan pelabuhan BKK Kelas I Bandung bertujuan sebagai tindak lanjut pengendalian atas hasil temuan jentik dan nyamuk dari survei yang dilakukan sebelumnya. Dikarenakan adanya efisiensi anggaran di lingkungan Kemenkes, kegiatan pengendalian faktor risiko penyakit DBD hanya dilakukan 1 kali di tahun anggaran 2025 yaitu pada bulan September 2025.

Kegiatan pengendalian faktor risiko DBD dilakukan dengan metode pengasapan/ fogging. Yaitu campuran insektisida pengendalian dan solar sebagai pelarut yang dimasukkan ke dalam mesin yang disebut swing fog, dimana hasil campuran tersebut menghasilkan asap yang mengandung insektisida yang diharapkan dapat membunuh nyamuk.

Gambar 4.35 Kegiatan pengendalian faktor risiko DBD



7) 4249.QAH.U08 Layanan survei faktor risiko penyakit pes

a) ATK Pemasangan Perangkap Tikus

Alat Tulis Kantor untuk kegiatan pemasangan perangkap tikus digunakan untuk kelancaran proses kegiatan dikarenakan dalam kegiatan ini menggunakan peralatan seperti perangkap yang harus diberi label, form pemasangan dan lain sebagainya. Dikarenakan adanya efisiensi anggaran, dana untuk pembelian ATK dihilangkan.

b) Persiapan Bahan dan Alat

Alat dan bahan untuk kegiatan pemasangan perangkap yaitu peralatan pendukung dalam memproses tangkapan tikus baik pra, kegiatan maupun pasca kegiatan. Pada saat pra dan saat kegiatan, dibutuhkan karung tikus, dan umpan untuk mobilisasi perangkap. Saat pasca kegiatan, dibutuhkan peralatan identifikasi tikus diantaranya kebutuhan sisir untuk mengetahui keberadaan pinjal pada tikus, dan juga masker handscoon yang digunakan di setiap tahap kegiatan.

Dikarenakan adanya efisiensi anggaran, alat dan bahan yang bisa direalisasikan di tahun 2025 diantaranya yaitu karung tikus dan umpan.

c) Pemasangan Perangkap

BBM untuk mobilisasi

d) Identifikasi Tikus dan Pinjal

Alkohol dan formulir ATK

8) 4249.QAH.U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare

a) Pengendalian vektor diare

Kegiatan pengendalian vektor diare ditujukan kepada vektor lalat dan kecoa yang merupakan vektor penyakit diare yang menyebabkan sakit pada manusia. Pengendalian ini ditujukan untuk mengendalikan populasi kepadatan lalat dan kecoa di lingkungan bandara maupun pelabuhan agar mengurangi potensi risiko penyebaran penyakit bersumber vektor.

Kegiatan pengendalian vektor diare dilaksanakan sebanyak ...kali di tahun anggaran 2025. Pengendalian dilakukan dengan dasar temuan hasil survei lalat yang menyatakan hasil tidak memenuhi syarat atau melebihi Nilai Ambang Batas sesuai peraturan perundangan yaitu Permenkes No.2 tahun 2023. Kegiatan pengendalian vektor diare dilakukan di seluruh wilayah kerja BKK Kelas I Bandung sebanyak 6 lokus.

9) 4249.QAH.U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS

Skrining HIV AIDS telah dilaksanakan oleh petugas di setiap wilayah kerja pada tanggal 20 Maret di Palabuanratu, 22-23 Juli di Palabuanratu, 30 Juli di BIJB Kertajati, 31 Juli di Pelabuhan Kejawanan, 8 Agustus di PLTU Sumur Adem Indramayu, 21 Agustus di

dermaga PPI Palabuanratu, 1 Oktober di SDN 1 Majalengka bersamaan dengan CKG, 9 Oktober di Indramayu. 18 Oktober di Pelabuhan Cirebon, 21 Oktober di BIJB Kertajati, 23 Oktober di Pelabuhan Patimban, dan 20 Oktober di Palabuanratu. Telah dilaksanakan 30 layanan yang berjumlah 350 orang.

Gambar 4.36 Skrining HIV AIDS



10) 4249.QAH.U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB

Skrining TB telah dilaksanakan oleh petugas di setiap wilayah kerja pada tanggal 20 Maret di Palabuanratu, 22-23 Juli di Palabuanratu, 30 Juli di BIJB Kertajati, 30 Juli di Pelabuhan Kejawanan, 8 Agustus di PLTU Sumur Adem Indramayu, 19 Agustus Karangsing Indramayu, 21 Agustus di Pelabuhan Patimban, 22 Oktober di Palabuanratu dan 21 Oktober di Palabuanratu. Telah dilaksanakan 20 layanan yang berjumlah 1000 orang.

Gambar 4.37 Skrining TB



11) 4249.QAH.U27 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori III

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung merupakan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara di wilayah Jawa Barat salah satu tugasnya melakukan Pemeriksaan kesehatan di embarkasi dilaksanakan dalam rangka menetapkan status kesehatan Jamaah Haji laik terbang atau tidak laik terbang dan penilaian kembali istithaah kesehatan jamaah haji melalui Embarkasi. Kegiatan ini dilakukan 31 april 2025 sampai 31 mei 2025 pemeriksaan tahap ketiga yang dilaksanakan di embarkasi meliputi :

- a) Pemeriksaan status kesehatan laik/tidak laik terbang
- b) Pelayanan di pos kesehatan asrama haji dan pos kesehatan bandara
- c) Pelayanan gawat darurat
- d) Pelayanan rujukan
- e) Pelayanan kekarantinaan kesehatan

Kegiatan embarkasi haji dimulai sejak calon jamaah haji masuk ke asrama haji sampai dengan dengan diberangkatan ke tanah suci, adapun peran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dalam penyelenggaraan kesehatan haji embarkasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Kekarantinaan Kesehatan: Kelengkapan dokumen kesehatan, gendec, manifest, obat dan alkes yang dibawa jamaah haji
- 2) Pelayanan Kesehatan: Pos kesehatan asrama haji dan bandara, gawat darurat, rujukan, laik terbang, rujukan, promotive preventif dan P3K pesawat
- 3) Surveilans: Jamaah risti, SKD dan respon KLB, penanganan terkait data dan kasus jamaah
- 4) Sanitasi dan Vektor: Pengawasan air, makanan, lingkungan, pesawat, vector dan lain-lain
- 5) Siskohatkes: Laporan dan Data jamaah

6) Sekretariat dan Administrasi

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung melayani jamaah haji dari Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan alokasi terbesar di Indonesia yakni 38.732 jemaah dan kuota tambahan sebanyak 1.478 untuk jamaah haji khusus. Kegiatan embarkasi dilaksanakan selama 32 hari dan dibagi (dua) lokasi Embarkasi yaitu :

1. Asrama Haji Embarkasi JKS di Kota Bekasi, bandara pemberangkatan di Bandara Soekarno Hatta Tangerang
2. Asrama Haji Embarkasi KJT di Kabupaten Indramayu, bandara pemberangkatan di Bandara Kertajati Majalengka

Tabel 4.4 Jumlah Jamaah Haji dan Kloter Embarkasi Haji JKS dan KJT Tahun 1446 H/2025 M

Jumlah Kloter		Jumlah Jamaah	
JKS	KJT	JKS	KJT
63	30	27.529	11.203

Dalam pelaksanaan embarkasi haji diperlukan diperlukan tol ambulans dan BBM ambulans untuk operasional kegiatan, yaitu untuk :

1. Pendampingan/pengawalan pemberangkatan calon jamaah haji sebanyak 2 s.d 3 kloter untuk embarkasi JKS dan 1 kloter embarkasi KJT oleh petugas medis menggunakan ambulans dari asrama haji ke Bandara
2. Rujukan bagi calon jamaah haji yang memerlukan penanganan lebih lanjut baik dari asrama haji maupun dari bandara ke RS Rujukan

Kebutuhan SDM untuk pelaksanaan kegiatan di 2 (dua) embarkasi adalah sebagai berikut sesuai dengan Keputusan Dirjen P2P No. HK.02.02/I/283/2020 tentang Standarisasi Kegiatan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana Teknis dalam Rangka Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan pada Penyelenggaraan Kesehatan Haji oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Kebutuhan SDM Embarkasi Haji JKS dan KJT Tahun 2025

No.	Jenis SDM	Embarkasi
1.	Epidemiolog Kesehatan	10
2.	Kabid Asrama Haji JKS	1
3.	Kabid Asrama Haji KJT	1
4.	Koordinator unit <u>Pemeriksaan ke 3</u> dan poli	2
5.	Entomolog Kesehatan	6
6.	Dokter	7
7.	Perawat	8
8.	Sanitarian	8
9.	Promotor Kesehatan	2
10.	Pranata Laboratorium Kesehatan	3
11.	Asisten apoteker	4
12.	Perekam Medis	1
13.	<u>Siskohat</u>	2
14.	Pranata Komputer	2
15.	Administrasi Keuangan	2
16.	Administrasi Umum	2
17.	Driver	4
TOTAL SDM		65 ORANG

Gambar 4.38 Pelaksanaan Embarkasi Haji



12) 4249.QAH.U30 Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori III

Pemeriksaan kesehatan pada kegiatan Debarkasi atau pemulangan Jamaah Haji dilaksanakan dalam rangka cegah tangkal penyakit pada para pelaku perjalanan Internasional khusus jamaah haji. Kegiatan Debarkasi dilakukan pada Bulan Juni sampai Juli tahun 2025. Kegiatan yang dilakukan di Debarkasi meliputi :

- a) Pemeriksaan dokumen pesawat
- b) Pemeriksaan penumpang dan kru pesawat
- c) Pelayanan Klinik di asrama Haji
- d) Pendampingan Jamaah haji dari Bandara ke Asrama Haji
- e) Pelayanan rujukan
- f) Pemantauan K3JH

Kegiatan haji pada tahun 2025 dengan efisiensi anggaran sebanyak 50 % dilakukan oleh SDM 50% dari rencana yang telah disusun yaitu sebanyak 30 orang dari rencana 60 orang untuk kekurangan dibantu oleh relawan dari Rumah Sakit sekitar debarkasi. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung melayani jamaah haji dari Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan alokasi terbesar di Indonesia yakni 38.732 jamaah Sedangkan untuk jumlah SDM yang ditugaskan yaitu:

Tabel 4.6 SDM yang ditugaskan di Asrama Haji Embarkasi Debarkasi

No	Jenis SDM	Debarkasi
1	Koordinator Bandara	2
2	Koordinator pelayanan Kekarantinaan di asrama haji	2
3	Dokter	7
4	Perawat	12
5	Entomolog Kesehatan	5
6	Epidemiolog Kesehatan	8
7	Sanitarian	6
8	Promotor Kesehatan	2
9	Pranata Laboratorium	2
10	Asisten Apoteker	2
11	Perekam Medis	2
12	Siskohat	2
13	Administrasi Keuangan	2

14	Administrasi Umum	2
15	Driver	4

13) 4249.RAB.001 Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk

a) Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor

Pengadaan sarana prasarana pengendalian vektor bertujuan untuk mendukung program pengendalian vektor di lingkungan pelabuhan dan bandara baik untuk kegiatan survei maupun pengendalian vektor. Pengadaan sarana prasarana ini berupa pembelian insektisida (kimia) untuk pengendalian jentik nyamuk, nyamuk dewasa, lalat, kecoa, perangkat fisik untuk kecoa.

Realisasi pengadaan sarana prasarana pengendalian vektor dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Maret 2025 pembelian insektisida pengendalian lalat 10 paket, perangkat fisik kecoa 116 pcs, Insektisida fogging 6 botol, insektisida umpan kecoa 7 paket, serta larvasida 1240 sachet. Untuk pembelian kedua dilakukan pada bulan Agustus 2025 yaitu pembelian insektisida fogging 10 botol, racun rikus 18 kantong, larvasida 500 sachet serta chlorofom sebanyak 6 botol.

b) Alat Pelindung Diri Pengendalian Vektor

Pengadaan alat pelindung diri pengendalian vektor bertujuan untuk melindungi petugas dari paparan fisika, limbah, bahan kimia fogging, dan potensi penyakit menular termasuk sarana untuk mobilisasi alat dan bahan berukuran kecil dalam kegiatan survei vektor.

Pada tahun 2025, dari 10 jenis Alat Pelindung Diri yang dialokasikan di awal anggaran, akibat adanya efisiensi anggaran dari pusat, yang dapat direalisasikan hanya sepatu safety dan tas peralatan yang direalisasikan Mei 2025 untuk tas dan Juli 2025 untuk sepatu safety.

Gambar 4.39 Alat Pelindung Diri



c) Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan

Pengadaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan bertujuan untuk melindungi petugas lapangan dari faktor risiko fisika, kimia maupun mikrobiologi saat kegiatan pengawasan di lapangan maupun kegiatan pengambilan sampel laboratorium lingkungan.

Sarana prasarana kesehatan lingkungan yang dialokasikan di tahun 2025 sebanyak 6 jenis. Akan tetapi dikarenakan ada efisiensi anggaran dari pusat, sarana prasarana yang dapat direalisasikan hanya tool kit dan safety box.

d) APD Kegiatan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Pada Alat Angkut dan Barang **(4249.RAB.001.052.D.521811)**

APD (Alat Pelindung Diri) dalam pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan barang bertujuan untuk melindungi petugas dari potensi bahaya fisik, kimia, maupun biologis. Penggunaan APD memastikan keselamatan selama pemeriksaan dokumen dan fisik, serta mencegah tertular penyakit dari alat angkut, barang, atau lingkungan kerja.

Pengadaan APD di tahun 2025 berupa :

- Sepatu lapangan 18 unit
- Jakwet lapangan 18 unit
- Rompi lapangan 18 unit
- Pelindung telinga 18 unit
- Sarung tangan kerja 18 unit
- Cairan desinfeksi tangan 18 unit
- Helmet 18 unit
- Helmet 18 unit
- Kacamata 18 unit

e) Bahan Pendukung Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal Secara Online dan Alat Pengolah Data Kekarantinaan Kesehatan **(4249.RAB.001.052.E.521252 dan 521811)**

Pengadaan bahan pendukung penerbitan dokumen kesehatan kapal berupa belanja peralatan dan mesin ekstrakomputable (521252) yaitu :

- UPS (unit untuk 7 lokasi)
- SSD eksternal (1 unit unit 7 lokasi)
- Kabel roll (1 unit untuk 7 lokasi)
- Webcam (1 unit untuk 7 lokasi)

Belanja barang persediaan barang konsumsi (521811) berupa:

- ATK dan peralatan kantor lainnya sebanyak 1 paket;
- Stempel sebanyak 1 paket untuk 6 lokasi.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) berupa:

- PC Desktop (1 unit)
- PC *All in One* (6 unit)
- Laptop *Editing* (3 unit)
- Laptop *Office* (18 unit)
- Printer *Scanner A4* (8 unit)
- Printer *Scanner A3* (1 unit)
- *Rapid Scanner* (2 unit)
- Tablet (9 unit)
- Smart TV 86 inch (1 unit)

- f) Boarding Kit dalam rangka Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan pada Alat Angkut dan Barang di Pintu Masuk **(4249.RAB.001.052.F.521211)**

Telah terealisasi pengadaan boarding kit dalam rangka pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut. Pengadaan boarding kit berupa:

- Jas hujan (18 unit)
- Tas boarding (18 unit)
- Clipboard (18 unit)
- Senter (18 unit)
- Luxmeter (18 unit)
- Radio Komunikasi (18 unit)
- Senter ultraviolet (18unit)
- Termometer infra red (18 unit)

- g) Pengadaan Alat dan Bahan Pengawasan dan Penyehatan Alat Angkut dan Barang **(4249.RAB.001.052.G.521811)**

Pengadaan Alat dan Bahan Pengawasan dan Penyehatan Alat Angkut dan Barang berupa :

- Desinfektan (15 paket) untuk 6 lokasi
- Sprayer (5 unit) untuk 6 lokasi
- Masker (10 unit) untuk 6 lokasi
- Sarung tangan (10 paket) untuk 6 lokasi

- h) APD dan Alat Kesehatan Kegiatan Surveilans Epidemiologi Pada Situasi Bencana/Situasi Khusus

Perjalanan penularan penyakit hingga menjadi wabah/KLB sangat cepat, seperti penyakit pes, kolera, yellow fever, cacar, polio, sars, dan avian influenza. Wabah/KLB penyakit tersebut dapat menimbulkan korban yang tidak sedikit, dan tidak hanya itu dampaknya akan meluas hingga perekonomian, sosial politik dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya pencegahan penularan penyakit tersebut harus

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan juga upaya deteksi dini penyakit melalui kegiatan surveilans epidemiologi di wilayah kerja pelabuhan maupun bandara. Selain itu, dalam beberapa situasi khusus petugas surveilans BKK Kelas I Bandung juga sering dilibatkan. Dalam melakukan tugas tersebut petugas memiliki risiko seperti tertular penyakit dan terjadinya kecelakaan. Untuk itu petugas perlu dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan juga alat kesehatan.

APD ini nantinya akan digunakan oleh petugas selain dengan tujuan melindungi petugas dari faktor risiko kesehatan dan kecelakaan kerja selama bertugas. Sampai Desember 2025, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1) Pengadaan APD berupa sepatu dan jaket lapangan pada Bulan Mei
 - 2) Pengadaan APD berupa sleeping bag dan celana lapangan pada Bulan Juni
 - 3) Pengadaan APD berupa tas lapangan, rompi lapangan, dan topi lapangan pada Bulan Juli
- i) Bahan Pendukung Kegiatan Surveilans Epidemiologi dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Untuk mendukung Kegiatan Surveilans Epidemiologi dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan diperlukan ATK berupa kertas HVS untuk penggandaan form pengawasan, alat tulis, tinta printer, dan perlengkapan lain yang mendukung dalam pengarsipan dokumen. Sampai Desember 2025, kegiatan pengadaan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu: Pengadaan ATK dan peralatan kantor pada Bulan Juli.

- j) Media KIE untuk Diseminasi Infomasi

Terdapat blokir anggaran sehingga tidak direalisasikan.

- k) Pengadaan Media KIE Posko Mudik Lebaran dan Tahun Baru

- 1) Pada bulan April, kegiatan pelayanan kesehatan posko mudik lebaran berupa pembelian spanduk dan rol banner
- 2) Pada bulan November, kegiatan hari keselamatan kerja nasional berupa rol dan banner
- 3) Pada bulan Desember, kegiatan pelayan posko nataru berupa rol dan banner

- l) Pengadaan Media KIE Kesehatan Haji

Pengadaan alat media KIE dilaksanakan pada bulan Mei 2025, berupa rol baner, spanduk dan leaflet, yang didistribusikan dua lokasi yaitu JKS dan KJT

- m) Pelayanan Klinik di Pintu Masuk Negara

Belanja bahan habis pakai untuk pelayanan klinik di pintu masuk negara (pembelanjaan berupa Belanja Bahan Kesehatan pada bulan April dan Mei,

Laboratorium klinik Layanan Kesehatan Situs, stik kolesterol, bahan kesehatan dan obat-obatan posko mudik, stik gula darah dan stik asam urat, obat-obatan habis pakai klinik dan wilker)

n) **Alat Pelindung Diri Petugas Kesehatan Haji di Bandara**

APD ini nantinya akan digunakan oleh petugas selain dengan tujuan melindungi petugas dari faktor risiko kesehatan dan kecelakaan kerja selama bertugas. Sampai Desember 2025, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1) Pengadaan APD berupa sepatu safety pada Bulan April
- 2) Pengadaan APD berupa tas peralatan pada Bulan April
- 3) Pengadaan APD berupa jaket pada Bulan Mei

14) 4249.TBC.001 Pelatihan kesehatan

a) **Mengikuti diklat, pelatihan, workshop, webinar Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan secara daring**

Kegiatan diklat terkait pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan secara daring dilaksanakan sebanyak 1 kali yaitu dilakukan pada tanggal 26 Maret 2025 sebanyak 2 orang dengan tema kursus keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan. Diklat ini dilaksanakan secara luring via media zoom.

b) **Mengikuti diklat, pelatihan, workshop Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Pada Alat Angkut dan Barang secara luring**

Pertemuan yang diikuti merupakan forum para ahli epidemiologi yang rutin dilaksanakan setiap tahun untuk membahas peran penting dan perkembangan ilmu epidemiologi dalam pengendalian penyakit serta keberlangsungan Field Epidemiology Training Program (FETP). Dengan demikian seluruh instansi atau badan yang terkait baik secara lintas sektor maupun lintas program serta di bawah Direktorat SKK Kemenkes diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut, dengan biaya penyelenggaraan, uang saku maupun transportasi dari biaya atau alokasi DIPA satker masing-masing

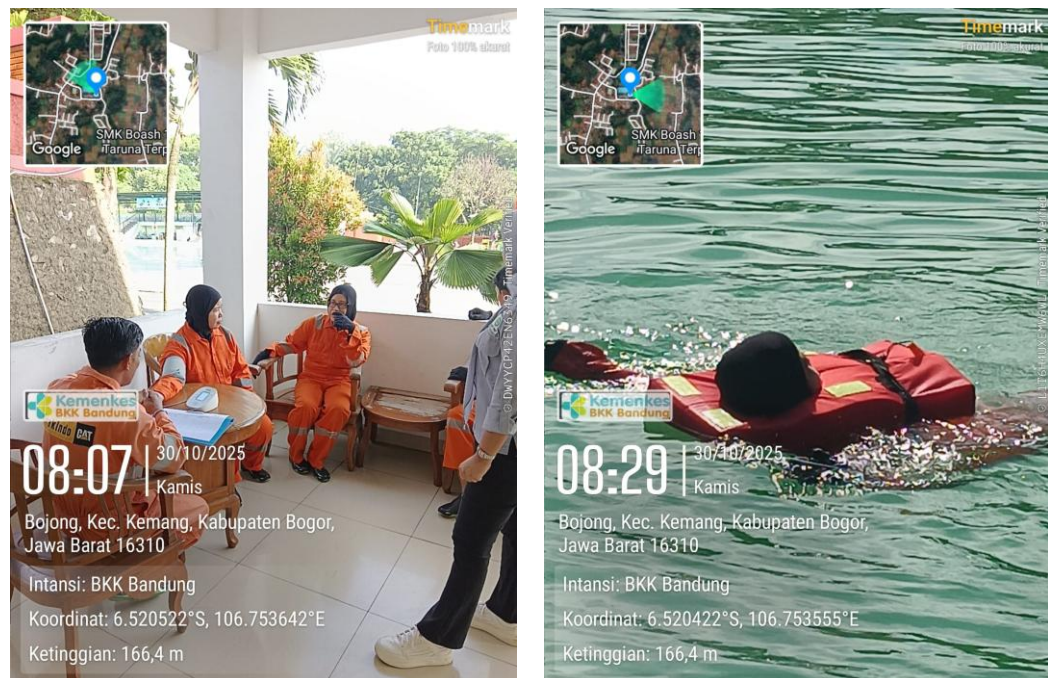
BKK Kelas I Bandung mengirim utusan khususnya staf Tim Kerja 2 dengan basic jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan, sebanyak dua orang mengikuti kegiatan Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional (PIEN) ke 12 di Yogyakarta. Kegiatan berlangsung di Hotel Mustika Yogyakarta Resort ini berlangsung dari tanggal 23 - 25 Juli 2025 dengan menggunakan mata anggaran 4229.TBC.001.053.B.522191 dan 524111.

Gambar 4.40 Kegiatan Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional (PIEN) ke 12 di Yogyakarta



Selain itu ada 2 petugas BKK Wilker Palabuhan Ratu - Sukabumi mengikuti pelatihan Sea - Survival di Bogor yang di ikuti secara luring pada tanggal 30 Oktober 2025.

Gambar 4.41 Pelatihan Sea - Survival di Bogor



- c) Mengikuti diklat, Seminar, workshop Pelayanan Kesehatan teknis
- Program pelatihan pegawai ASN BKK Bandung pada bidang Pelayanan Kesehatan Teknis telah diikuti oleh sejumlah pegawai dengan topik yang beragam dan relevan terhadap isu kesehatan terkini. Keikutsertaan dalam pelatihan ini menunjukkan komitmen ASN dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, baik pada aspek promotif, preventif, kuratif, maupun manajerial. Adapun rincian pelatihan yang telah diikuti adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi pelayanan kesehatan

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Dampak Konsumsi Rokok Elektronik bagi Kesehatan	3
2	Combating Herpes Zoster Nightmares with The Innovative Recombinant Zoster Vaccine	1
3	Empower Nurse to Boost the Quality Of Tuberculosis	1
4	Health Regulations and Vaccination for Travellers	3
5	Kelas Edukasi - Respon Proaktif dan Intervensi Dini atas Temuan Iskemik dan Dislipidemia Angkatan 1	1
6	Kelelahan Kerja dan Produktivitas pada Pekerja di Pelayanan Kesehatan	1
8	Pelatihan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) bagi Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta	3

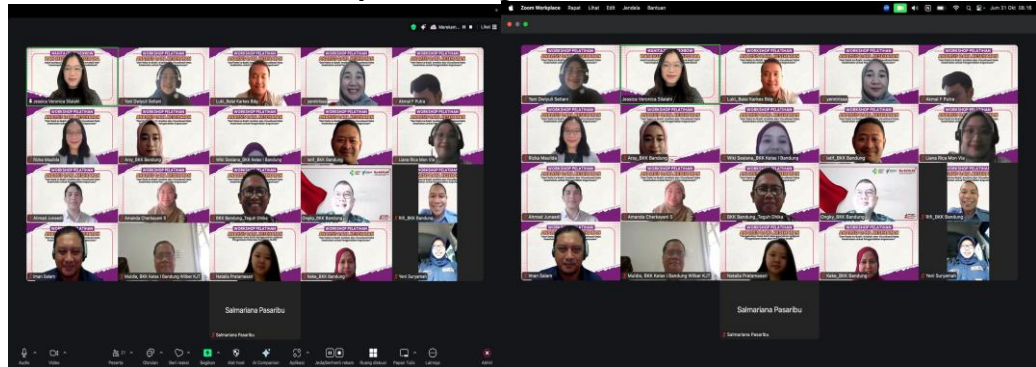
Secara substansi, pelatihan tersebut memperkuat kompetensi teknis pegawai dalam penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis dan herpes zoster, peningkatan kewaspadaan terhadap faktor risiko penyakit tidak menular seperti iskemik dan dislipidemia, serta penguatan regulasi kesehatan perjalanan dan vaksinasi. Selain itu, materi terkait kelelahan kerja dan manajemen krisis kesehatan turut mendukung ketahanan sistem pelayanan kesehatan dan produktivitas tenaga kesehatan. Dengan peningkatan kompetensi ini, diharapkan pelayanan kesehatan di lingkungan BKK Bandung semakin optimal, profesional, dan responsif terhadap dinamika permasalahan kesehatan masyarakat.

d) Diklat/Workshop Surveilans Epidemiologi/Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional

Konsep berpikir dan pola operasional dalam penyelenggaraan surveilans epidemiologi di BKK Kelas I Bandung penting untuk diketahui dan dikerjakan secara bersama-sama oleh tenaga yang ada. Di samping itu, tantangan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit terutama di pintu masuk negara dan wilayah juga semakin besar yakni dengan adanya isu-isu penyakit yang terus berkembang, bukan hanya penyakit menular potensial wabah, tetapi juga *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Oleh karena itu, BKK Kelas I Bandung perlu mengirimkan tenaga untuk mengikuti Diklat/Workshop Surveilans Epidemiologi/Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu: mengikuti Workshop Pemeriksaan Kesehatan Haji Laik Terbang untuk 20 orang secara daring pada Bulan Maret dan Pelatihan analisis

data epidemiologi untuk seluruh anggota Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan pada Bulan Oktober.

Gambar 4.42 Diklat/Workshop Surveilans Epidemiologi/Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional



B. 4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pagu anggaran Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit sebesar Rp. 21.153.587.000,- dengan Pagu Blokir sebesar Rp. 2.043.284.000,- sehingga Pagu Efektif sebesar Rp. 19.110.303.000,- telah realisasi sebesar Rp. 19.066.553.377,- hal ini berdampak pada beberapa Rincian Output yang terkena Full Blokir anggaran sehingga kegiatan banyak Tugas dan Fungsi di Program Dukungan Manajemen banyak dilakukan secara daring. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1) 4815.EBA.956 Layanan BMN

a) Laporan Penyusunan BMN

Kegiatan ini meliputi Rekonsiliasi dan Penyusunan BMN Tahun 2024 pada tanggal 27 - 31 Januari 2025 di Hotel Horison Bekasi dan penyusunan laporan BMN Semester I TA 2025 pada tanggal 13 - 17 Juli 2025 secara daring.

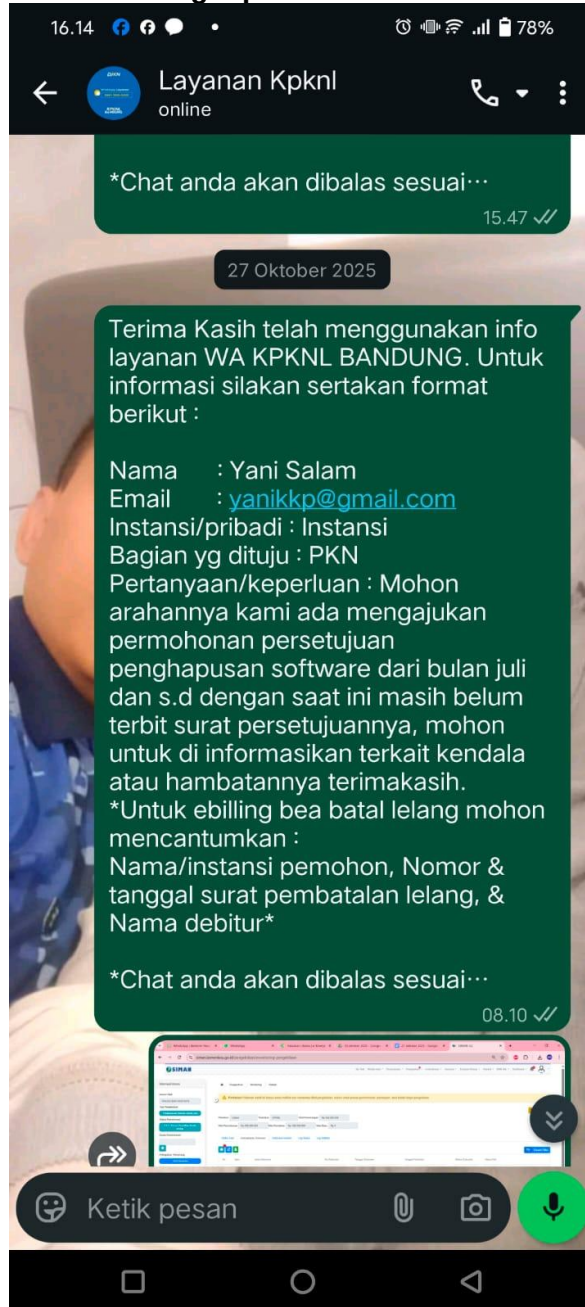
Gambar 4.43 Laporan Penyusunan BMN



b) Penghapusan dan Pemusnahan BMN

Kegiatan ini meliputi Koordinasi dan konsultasi kepada KPKNL Bandung dalam rangka kegiatan pra penghapusan barang yang akan di hapus. Selain itu juga konsultasi tindaklanjut penghapusan BMN pada tahun 2025, kegiatan dilakukan melalui Aplikasi Whatsapp.

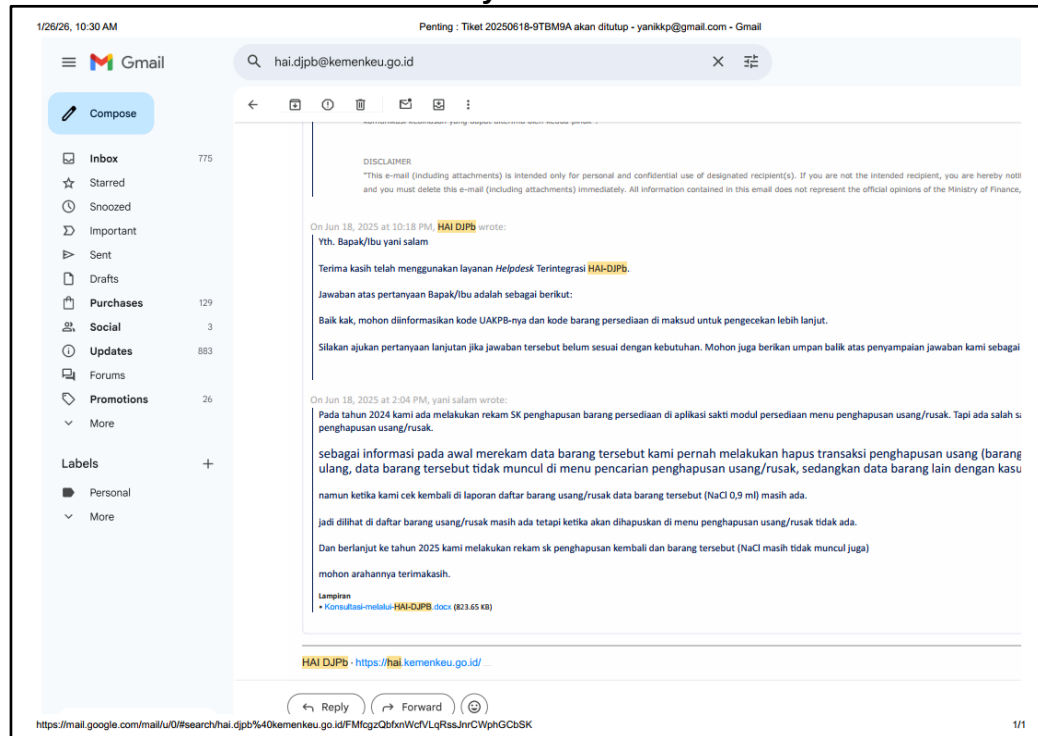
Gambar 4.44 Penghapusan dan Pemusnahan BMN



c) Penyelesaian masalah BMN

Kegiatan ini meliputi konsultasi melalui website hai DJPB Kementerian Keuangan terkait Aplikasi SAKTI pada modul persediaan transaksi penghapusan.

Gambar 4.45 Penyelesaian masalah BMN



d) Penyusunan RKBMN.

Kegiatan Penyusunan RKBMN dilaksanakan dengan menghadiri undangan dari pusat dalam rangka penyusunan RKBMN secara daring. Perencanaan kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai data dalam melakukan tindakan yang akan datang. kegiatan meliputi pertemuan reviu rencana kebutuhan BMN (RKBMN) TA 2027 dengan Eselon 1 dan Inspektorat Jenderal tanggal 28-31 Oktober 2025.

Gambar 4.46 CHR RKBMN

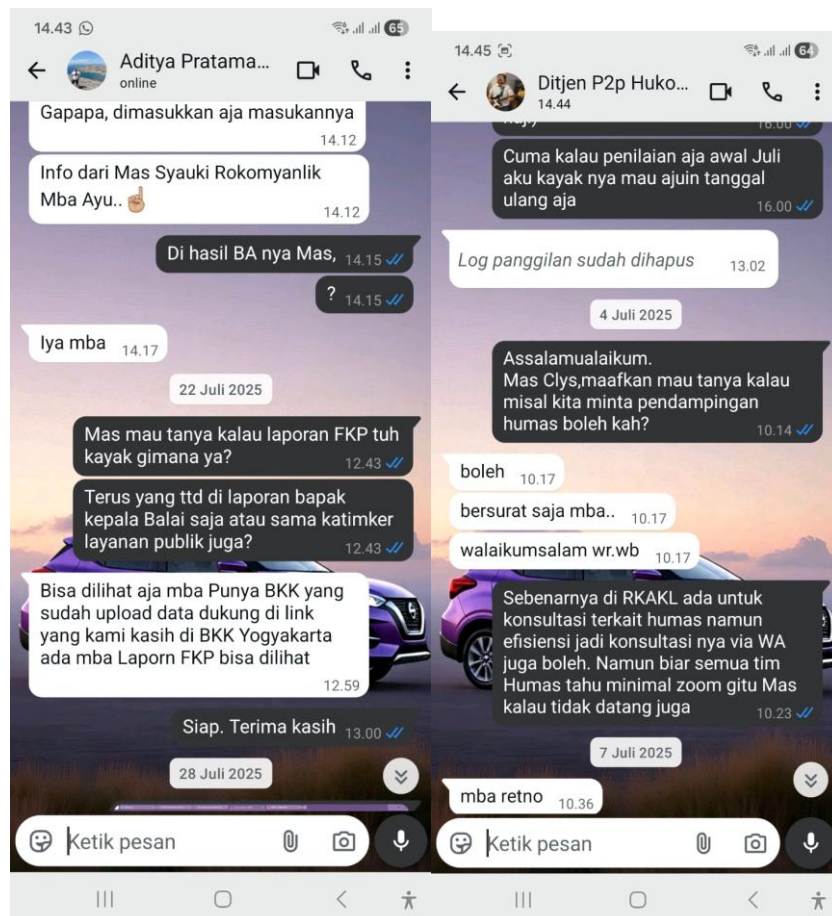
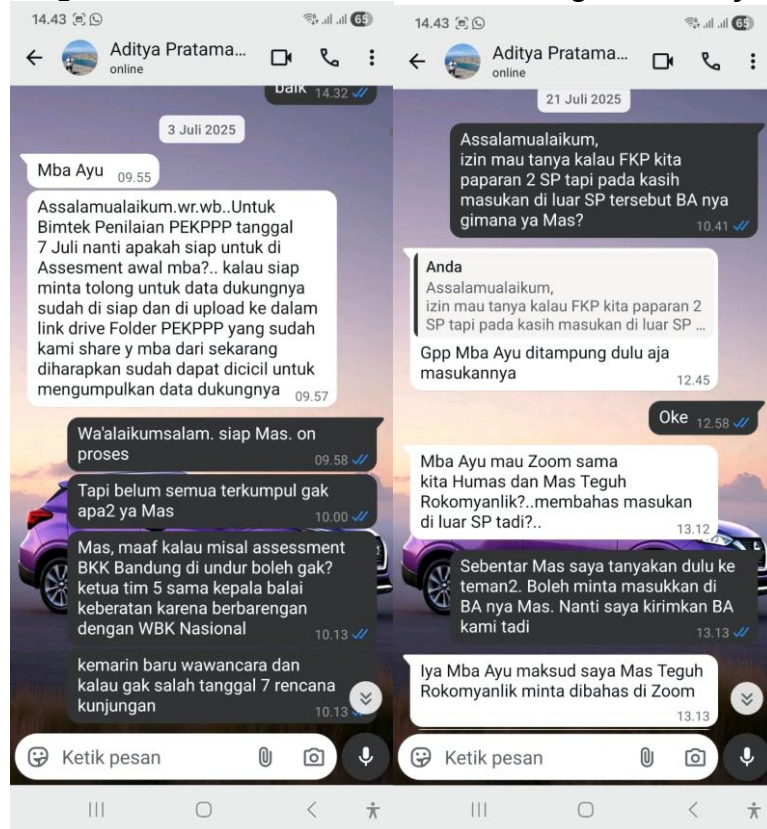
Kementerian Kesehatan RI Inspektorat Jenderal	Disusun oleh/Tanggal	Andin / 31 Okt 2025																																								
	Diteliti oleh/Tanggal	Esi / 31 Okt 2025																																								
	Disetujui oleh/Tanggal	Makromin / 31 Okt 2025																																								
Uraian Catatan Hasil Reviu																																										
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kesehatan RI Nomor: PS.02.03/G/1085/2025 tanggal 24 Oktober 2025 untuk melakukan pemeriksaan RKBMN Tahun Anggaran 2027 pada Satker di lingkungan Ditjen Penanggulangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, sesuai dengan Surat Permohonan Kebutuhan BMN (RKBMN) TA 2027 dari Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor: KN.01.01/C.I/6480/2025 tanggal 24 Oktober 2025 dan Sekretaris BKKP Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.01/H.I/4081/2025 tanggal 24 Oktober 2025. APIP K/L tidak mengambil alih tanggung jawab Pengguna Barang terhadap ditetapkan dalam proses penyusunan dan kebenaran angka RKBMN yang diusulkan tersebut adalah tetap menjadi tanggung jawab pengguna barang, dan tidak melakukan dengan usulan pengasuransian BMN. Berdasarkan hasil reviu tersebut, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut: 1. Kelengkapan dan kesesuaian Dokumen Pendukung terhadap usulan RKBMN <i>Checklist dan kesesuaian Dokumen RKBMN Kuasa Pengguna Barang TA 2027</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>A.</th> <th>Kelengkapan Dokumen</th> <th>Ada</th> <th>Tidak</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Surat Pengantar RKBMN yang ditandatangani Kepala Satker;</td> <td>✓</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kuasa Pengguna Barang atas RKBMN dan dilengkapi materai;</td> <td>✓</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Usulan RKBMN yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja</td> <td>✓</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Hasil pengusutan penyediaan anggaran pada RKBMN tahun sebelumnya (RKAKL tahun 2026 yang memuat anggaran pengusutan RKBMN yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja)</td> <td>✓</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Data existing BMN dicetak dari aplikasi SIMAN modul Master Aset yang sudah ditandatangani Kepala Satker</td> <td>✓</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Laporan Kondisi BMN yang dicetak dari aplikasi SAKTI yang sudah ditandatangani Kepala Satker</td> <td>✓</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Dokumen rencana BMN untuk : - dihapuskan - dihentikan penggunaannya - dipindahtanggankan</td> <td>✓</td> <td>-</td> <td>a. Terdapat dokumen rencana BMN untuk dihapuskan b. Terdapat dokumen rencana BMN untuk dipindahtanggankan, dimanfaatkan, dan dimusnahkan</td> </tr> </tbody> </table>			A.	Kelengkapan Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan	1	Surat Pengantar RKBMN yang ditandatangani Kepala Satker;	✓	-	-	2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kuasa Pengguna Barang atas RKBMN dan dilengkapi materai;	✓	-	-	3	Usulan RKBMN yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja	✓	-	-	4	Hasil pengusutan penyediaan anggaran pada RKBMN tahun sebelumnya (RKAKL tahun 2026 yang memuat anggaran pengusutan RKBMN yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja)	✓	-	-	5	Data existing BMN dicetak dari aplikasi SIMAN modul Master Aset yang sudah ditandatangani Kepala Satker	✓	-	-	6	Laporan Kondisi BMN yang dicetak dari aplikasi SAKTI yang sudah ditandatangani Kepala Satker	✓	-	-	7	Dokumen rencana BMN untuk : - dihapuskan - dihentikan penggunaannya - dipindahtanggankan	✓	-	a. Terdapat dokumen rencana BMN untuk dihapuskan b. Terdapat dokumen rencana BMN untuk dipindahtanggankan, dimanfaatkan, dan dimusnahkan
A.	Kelengkapan Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan																																						
1	Surat Pengantar RKBMN yang ditandatangani Kepala Satker;	✓	-	-																																						
2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kuasa Pengguna Barang atas RKBMN dan dilengkapi materai;	✓	-	-																																						
3	Usulan RKBMN yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja	✓	-	-																																						
4	Hasil pengusutan penyediaan anggaran pada RKBMN tahun sebelumnya (RKAKL tahun 2026 yang memuat anggaran pengusutan RKBMN yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja)	✓	-	-																																						
5	Data existing BMN dicetak dari aplikasi SIMAN modul Master Aset yang sudah ditandatangani Kepala Satker	✓	-	-																																						
6	Laporan Kondisi BMN yang dicetak dari aplikasi SAKTI yang sudah ditandatangani Kepala Satker	✓	-	-																																						
7	Dokumen rencana BMN untuk : - dihapuskan - dihentikan penggunaannya - dipindahtanggankan	✓	-	a. Terdapat dokumen rencana BMN untuk dihapuskan b. Terdapat dokumen rencana BMN untuk dipindahtanggankan, dimanfaatkan, dan dimusnahkan																																						

2) 4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pelayanan Humas dan Protokoler

a) Jejaring Komunikasi Kehumasan dan Peningkatan Pelayanan Publik

Konsultasi ke pusat terkait pelaksanaan Pelayanan Publik dilakukan secara daring karena menyesuaikan dengan adanya kondisi pemblokiran anggaran. Adapun hal yang dikonsultasikan adalah mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), Forum Konsultasi Publik (FKP), dan pendampingan kehumasan.

Gambar 4.47 Jejaring Komunikasi Kehumasan dan Peningkatan Pelayanan Publik



b) Pengelolaan Informasi Publikasi dan Media Monitoring

Rapat perdana penyusunan buletin web MEDIKA dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, dilakukan secara luring bertempat di Ruang Sumanget It 3 dan secara daring melalui zoom. Rapat diikuti oleh seluruh pegawai yang termasuk ke dalam SK Tim Pengelola Buletin Web. Adapun yang dibahas dalam rapat perdana adalah menentukan kepanitiaan, tema buletin web Medika, pembagian artikel, ketentuan penulisan, dan timeline

Gambar 4.48 Pengelolaan Informasi Publikasi dan Media Monitoring



Setelah itu dilakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas sejauh mana perkembangan Buletin Web MEDIKA. Sebelum Buletin Web Medika terbit, dilakukan rapat review dan finalisasi artikel pada 29 Oktober 2025 bertempat di Ruang Sumanget It 3. Dalam rapat ini tim Medika melakukan klarifikasi kepada pegawai yang menulis artikel agar maksud dan tujuan penulis dapat tersampaikan dengan baik

Gambar 4.49 Rapat review dan finalisasi artikel



Buletin Web MEDIKA 2025 terbit pada tanggal 29 Desember 2025 dan dapat diakses melalui laman BKK Bandung di <https://bkkbandung.net/> Pada halaman utama, pilih menu Media, lalu pilih MEDIKA

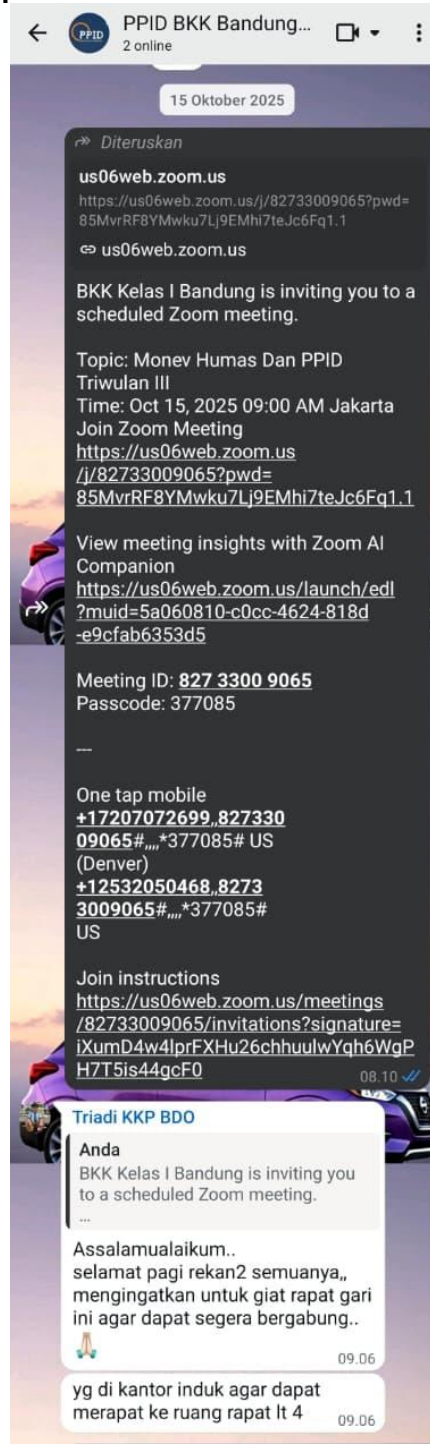
Gambar 4.50 Buletin Web MEDIKA 2025



c) Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan koordinasi antara anggota tim PPID dalam rangka monev implementasi keterbukaan informasi publik ke wilker dioptimalkan dengan jalur komunikasi via WA grup. Hal ini dilakukan karena adanya efisiensi anggaran. Informasi mengenai kegiatan monev humas dan PPID disosialisasikan di Whatsapp grup dan diketahui oleh seluruh anggota tim PPID

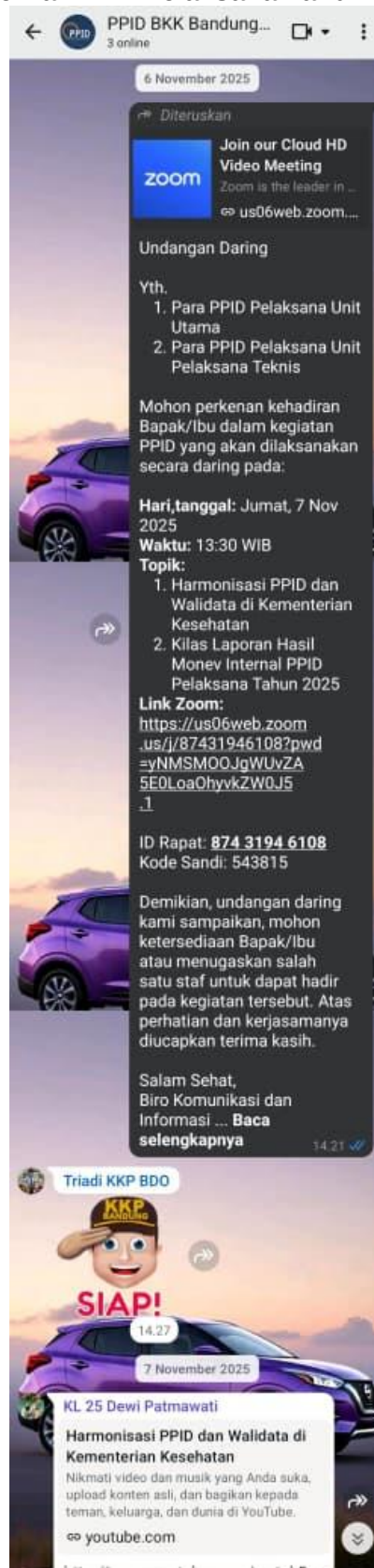
Gambar 4.51 Implementasi Keterbukaan Informasi Publik



Kegiatan lainnya berupa Harmonisasi PPID dan Walidata di Kemenkes dan Kilas Laporan Hasil Monev Internal PPID Pelaksana Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes yang dilaksanakan pada 7

November 2025 disosialisasikan kepada seluruh anggota tim PPID baik di kantor induk maupun wilker melalui WA grup

Gambar 4.52 Harmonisasi PPID dan Walidata di Kemenkes dan Kilas Laporan Hasil Monev Internal PPID Pelaksana Tahun 2025



3) 4815.EBA.960.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

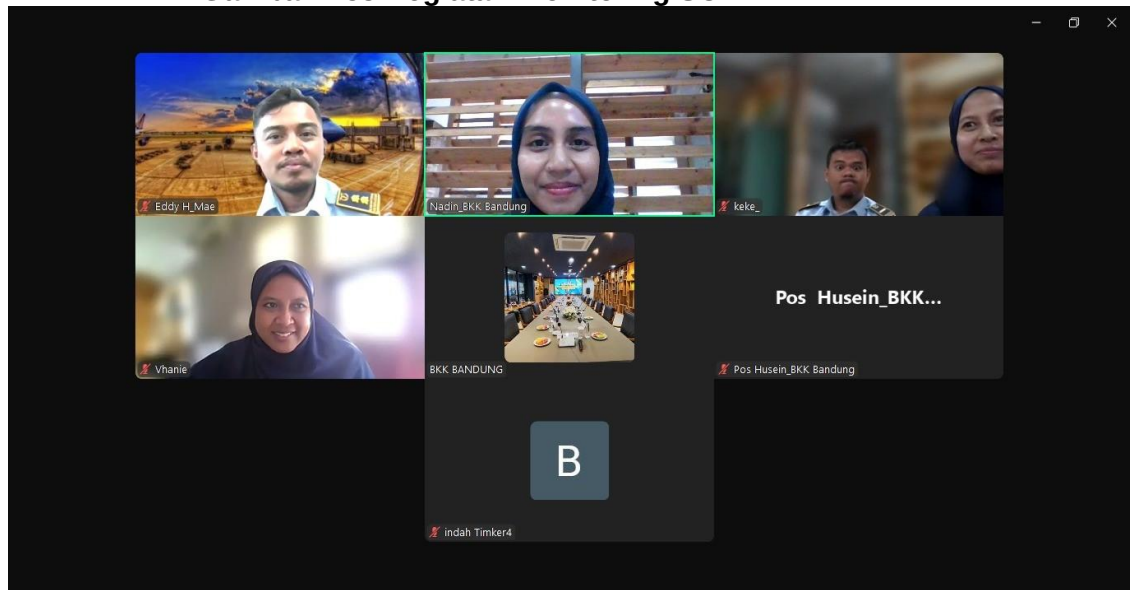
- a) Review Penyusunan ABK (Layanan Organisasi Tatalaksana Reformasi Birokrasi)
- Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu. Kegiatan ini pada tahun 2025 meliputi menghadiri undangan Pertemuan Klarifikasi Perhitungan Redistribusi Kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan UPT Kementerian Kesehatan secara daring dan menghadiri kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (DAK JFAK) pada tanggal 13 Juni 2025 secara daring.
- b) Penyusunan Peta dan Informasi Jabatan (Layanan Organisasi Tatalaksana Reformasi Birokrasi)
- Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Maksud penyusunan peta jabatan adalah menggambarkan struktur kewenangan tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan, memperoleh informasi jabatan secara tepat dan akurat dan memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kebutuhan ASN dalam struktur organisasi. Kegiatan dilaksanakan secara daring yaitu mengikuti Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan SDM Kesehatan.
- c) Penyusunan Monev SOP AP KKP (Layanan Organisasi Tatalaksana Reformasi Birokrasi)
- Reformasi birokrasi, salah satu area perubahan yaitu penataan tatalaksana, mensyaratkan adanya monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (AP) setiap tahun. SOP AP merupakan proses bisnis yang jelas dalam suatu prosedur yang standar yang disusun dalam rangka mewujudkan salah satu program pemerintah yaitu komitmen untuk melakukan pelayanan publik yang berkualitas (prima), memuaskan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Monev SOP AP merupakan bagian rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan, sehingga penerapan SOP AP dapat berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan SOP AP benar-benar melaksanakan tugas dan

fungsi organisasi sehari-hari dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui mana SOP AP yang perlu dilakukan revisi/penyusunan SOP baru dan SOP yang sudah tidak relevan/berlaku lagi.

Salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring SOP AP yaitu rapat biasa dalam kantor terkait monitoring dan evaluasi SOP yang dilaksanakan oleh Tim Pemantau SOP pada tanggal 5 Januari 20205 serta menghadiri kegiatan Undangan Kegiatan Sosialisasi

Penyusunan SOP AP pada tanggal 25 Agustus 2025

Gambar 4.53 Kegiatan monitoring SOP AP



4) 4815.EBA.962.Layanan Umum

a) Pengelolaan Kantor BERHIAS

Kegiatan ini berupa pembelian stiker dan media KIE berhias dan dalam rangka berhias di kantor induk dan wilker dengan rincian sebagai berikut:

- Pembelian bahan untuk plang papan nama kantor di Wilayah Kerja Pelabuhan Patimban bulan Maret 2025
- Pembelian cutting stiker plang nama kantor di Wilayah Kerja Pelabuhan Patimban bulan Maret 2025
- Media KIE berhias berupa pembelian sign scrylic jalur evakuasi
- Media KIE Berhias berupa pembelian sign acrylic jalur evakuasi, dilengkapi cctv dan free wifi
- Media KIE Berhias berupa pembelian poster maklumat pelayanan dan akrilik poster
- Media KIE berhias berupa pembelian banner HUT RI ke 80 di Wilker Palabuhanratu bulan Agustus 2025
- Media KIE berhias berupa pembelian spanduk HUT RI ke 80 Tahun 2025
- Media KIE berhias berupa pembelian spanduk posko kesehatan untuk dikantor induk

- Media KIE berhias, satu sehat dan CKG berupa pembelian x banner satu sehat mobile
- Media KIE berhias berupa pembelian stiker BKK Bandung posko Bandara Husein Sastranegara
- Media KIE berhias berupa pembelian spanduk Hakordia
- Media KIE berhias berupa pembelian foto dan blockframe BKK Bandung
- Media KIE berhias berupa pembelian cat, tiner, koas dan hamplas di Wilayah Kerja Pelabuhan Patimban bulan Desember 2025
- Media KIE berhias berupa cutting stiker dan lambang kemenkes plang nama bulan Desember 2025
- Media KIE berhias berupa pemeliharaan taman gedung BKK Bandung
- Media KIE berhias berupa pembelian papan informasi dan edukasi kesehatan, cetak kalender dan lainnya
- Pengukuran kualitas lingkungan fisik (suhu, kelembapan, kebisingan dan pencahayaan) di lingkungan kantor induk BKK Bandung.

Gambar 4.54 Pengelolaan Kantor BERHIAS

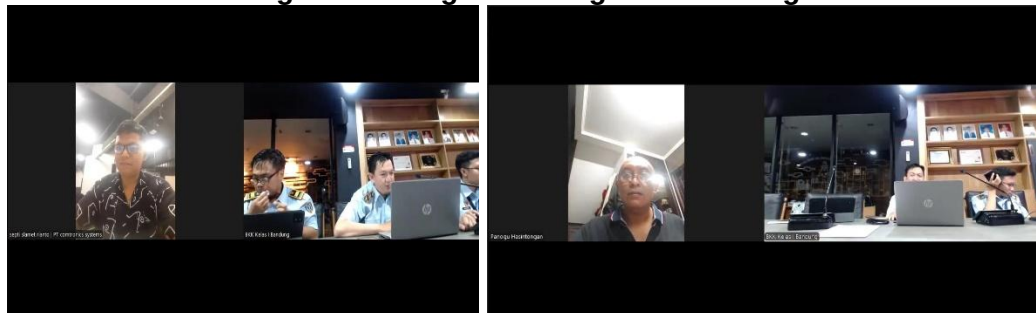


b) **Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa**

Kegiatan pengelolaan barang dan jasa tahun 2025 berupa pembelian ATK, Penyusunan RUP dan proses pembuktian mini kompetisi belanja modal pengolah data 2025 meliputi :

- Belanja bahan dokumen pemilihan dan kontrak kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa pembelian bantex, plastik bantex dan kertas
- Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilaksanakan agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat segera di eksekusi oleh pejabat pengadaan maupun Unit Layanan Pengadaan (ULP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung. Kegiatan penyusunan RUP TA. 2026 di BKK Kelas I Bandung berupa Kegiatan Undangan Penyelesaian Pengumuman RUP TA 2026 Wilayah Barat secara daring pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2025.
- Proses pembuktian pemenang mini kompetisi belanja modal pengolah data e-katalog versi 6.0 dilaksanakan pada tanggal 21 - 28 oktober 2025.

Gambar 4.55 Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa



c) **Sewa Kendaraan Operasional**

Kegiatan meliputi sewa kendaraan operasional kantor selama 2 bulan Januari dan Februari Tahun 2025 dikarenakan adanya Blokir anggaran sewa kendaraan dilaksanakan hanya 2 bulan sehingga mengakibatkan adanya biaya administrasi terkait pembatalan kontrak awal 1 tahun.

d) **Langganan aplikasi onilne dan paket data komunikasi**

Kegiatan Layanan Aplikasi Meeting Berbayar di BKK Kelas I Bandung berupa Langganan Akun Zoom/hosting lainnya, Langganan Akun Google Drive/hosting lainnya dan Pembelian Lisensi Ms. Office Original untuk keperluan perkantoran selama satu tahun meliputi :

- Pembelian Langganan Akun Zoom/hosting lainnya berupa Biaya langganan Server Hostinger KVM 8 dan domain renewal bkkbandung.net untuk drive aplikasi

- Pembelian Langganan Akun Google Drive/hosting lainnya berupa Biaya langganan google workspace business standard bkkbandung.id untuk alamat website
- Pembelian Lisensi Ms. Office Original berupa Pembelian lisensi microsoft 365 family allLng sub PK Lic 1YR Online
- Pembelian langganan text editor programming pro untuk libary coding
- Pembelian Langganan Internet Pos Bandara Husein dan Wilayah Kerja selama 12 bulan.

e) Dukungan Operasional Perkantoran

Belanja Perlengkapan Perkantoran Sehari-Hari berupa pembuatan Pas Bandara, Asrama dan Kendaraan selama Embarkasi dan Debarkasi Tahun 2025, pembuatan Pas Bandara Husein dan Kertajati, pembuatan Pas Pelabuhan Cirebon, pembuatan Pas Pegawai Kemenkes dan pengadaan ATK kantor.

5) 4815.EBA.963.Layanan Data dan Informasi

Profil merupakan grafik atau ikhtisar yg memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Profil bertujuan memberikan gambaran/informasi kepada pembaca tentang kegiatan dan hasilnya pada tahun yang bersangkutan atau perbandingan/trend dengan tahun sebelumnya. Media merupakan salah satu alat bantu penyampaian informasi. Tujuan dari pembuatan media salah satu diantaranya sebagai media informasi yang mencerahkan bagi pembacanya. Berbagai macam media yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya BKK dalam rangka meraih WBK/WBBM. kegiatan Penyusunan Profil dilaksanakan meliputi rapat dalam kantor terkait Penyusunan Profil tahun 2025 pada tanggal 8 September 2025.

Gambar 4.56 Kegiatan Penyusunan Profil



6) 4815.EBA.994.Layanan Perkantoran (13 Bulan)

a. Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK

Kegiatan ini dilakukan untuk membayar hak pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung berupa pembayaran gaji setiap bulan terhadap 93 pegawai termasuk pembayaran gaji ke 13 dan THR. Selain itu pada komponen ini terdapat uang makan PNS dan PPPK untuk 93 orang selama setahun dan uang lembur selama 12 bulan serta tunjang kinerja pegawai selama 12 bulan.

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran setiap bulan selama tahun 2025. Antara lain :

- Pakaian Dinas

Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dilakukan blokir keseluruhan sehingga pengadaan Pakaian Dinas tidak ada realisasi di tahun 2025

- Perbaikan Peralatan Perkantoran

- a) Pemeliharaan Genset 200 KVA
- b) Pemeliharaan Genset 250 KVA
- c) Pemeliharaan Tensimeter
- d) Pemeliharaan Elevator/ Lift
- e) Pemeliharaan AC Split
- f) Pemeliharaan Printer
- g) Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook
- h) Pemeliharaan Notebook
- i) Pemeliharaan Laptop
- j) Pemeliharaan Inventaris Kantor
- k) Pemeliharaan CCTV dan jaringan
- l) Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Barat)
- m) Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Barat)
- n) Pemeliharaan Tabung O2
- o) Pemeliharaan TV
- p) Pemeliharaan Pompa
- q) Pemeliharaan Kamera dan handycam

- Outsourcing Cleaning Service, Satpam dan Pengemudi

- a) Belanja Outsourcing Cleaning Service, Satpam dan Pengemudi bulan Januari - Desember 2025.
- b) Pembayaran Honorarium PPNPN selama 9 bulan dari januari s.d september 2025 sebanyak 14 orang
- c) Pembayaran Honorarium PPPK Pauh waktu selama 3 bulan dari Oktober s.d Desember 2025 sebanyak 1 orang.

- Perawatan Gedung Kantor

- a) Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat (Kantor Induk Bandung)
- b) Pemeliharaan Gedung/ Bangunan dan Halaman Kantor Bertingkat (Cirebon)
- c) Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat (Kertajati)
- d) Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Indramayu)
- e) Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Palabuhan Ratu)
- Honor Penanggung Jawab dan Pengelola Keuangan
Belanja Honor Penanggung Jawab dan Pengelola Keuangan bulan Januari - Desember 2024.
- Belanja Langganan Daya dan Jasa
Belanja Langganan Daya dan Jasa Listrik, Air dan Telepon selama 12 bulan
- Perlengkapan Perkantoran Sehari-Hari
Belanja Langganan Internet Kantor Induk selama 12 bulan
- Belanja Keperluan Kantor berupa biaya uang makan dan snack
 - a) Biaya konsumsi berupa makan siang keg. uji resistensi nyamuk aedes sp. terhadap insektisida di wilayah representatif Kota Bandung tgl 23 Januari 2025
 - b) Biaya konsumsi berupa makan siang keg. uji resistensi nyamuk aedes sp. terhadap insektisida di wilayah representatif Kota Bandung tgl 22 Januari 2025
 - c) Biaya konsumsi berupa pembelian makan siang tamu pimpinan kegiatan pemeriksaan dokumen oleh BPK tanggal 28 Februari 2025
 - d) Biaya konsumsi berupa pembelian makan siang rapat pimpinan kegiatan survei lapangan untuk penilaian WBK Nasional Tahun 2025
 - e) Biaya konsumsi berupa pembelian makan siang rapat pimpinan kegiatan monitoring kepatuhan interaksi pelayanan publik
 - f) Biaya konsumsi berupa pembelian makan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di daerah dalam rangka tindak lanjut akuntabilitas
 - g) Biaya konsumsi berupa pembelian makan siang kegiatan rapat pimpinan dengan SKK
 - h) Biaya konsumsi berupa pembelian makan siang kegiatan rapat pimpinan dengan SKK
 - i) Biaya konsumsi berupa pembelian makan siang kegiatan donor darah pegawai BKK Bandung
 - j) Biaya konsumsi berupa pembelian makan siang kegiatan pemeriksaan biomarker logam dalam darah bagi staf BKK Bandung

- k) Biaya konsumsi berupa pembelian makan siang kegiatan uji petik draft pedoman tata kelola Balai Kekarantinaan Kesehatan di BKK Kelas I Bandung
- l) Belanja Konsumsi Makan Keg. Sosialisasi Coretax dan Prosedur Pajak, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21/26 dengan KPP Pratama Bandung
- m) Belanja Konsumsi Makan Kegiatan Kehumasan tgl 12 Desember 2025 sebanyak 35 orang x Rp 48.500
- Belanja Jasa lainnya berupa Pemeriksaan Kesehatan ASN BKK Bandung
Anggaran Pemeriksaan kesehatan ASN berupa Medical Check Up bagi PNS dan Pemeriksaan NAPZA bagi PPPK dilakukan blokir keseluruhan sehingga tidak ada realisasi di tahun 2025 namun sebagai gantinya BKK Kelas I Bandung tetap melaksanakan CKG untuk seluruh ASN setiap triwulan.
- Sewa Rumah Dinas Pimpinan
Belanja Jasa Sewa Rumah Dinas Kepala BKK Kelas I Bandung TA 2025 selama 12 bulan
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat berupa pengiriman dokumen ke pusat dan wilker, pengiriman dokumen wilker ke induk, pengiriman vaksin, pengiriman alat tulis kantor ke wilker dan lainnya.
- Belanja Keperluan Perkantoran
Belanja Perlengkapan Perkantoran sehari hari dan pengadaan ATK kantor.

7) 4815.EBC.954.Layanan Manajemen SDM

a) Layanan Mutasi Kepegawaian

Kegiatan dilaksanakan secara daring meliputi kegiatan penyusunan kebutuhan mutasi pegawai dengan job vacancy BKK Kelas I Bandung disampaikan melalui Usul Online pada Portal Eoffice dengan produk Formasi/Bezetting dan jenis produk Usul Kebutuhan Mutasi Job Vacancy serta mengikuti Kegiatan Samsat Layanan Mutasi Kepegawaian (Kenaikan Jabatan Fungsional, Tugas Belajar Mandiri dan Pencantuman Gelar) secara daring pada tanggal 13 Juni 2025.

b) Peningkatan Kompetensi

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Induk BKK Kelas I Bandung meliputi Kegiatan Pelantikan atas nama Ignatius Sildani Kristri kedalam Jabatan Fungsional Perencana pada tanggal 26 Februari 2025, atas nama Vhanie Vhalentine kedalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Pertama pada tanggal 17 Maret 2025, atas nama Muga Mulya kedalam Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda pada tanggal 22 April 2025, Asep Saepuloh kedalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Muda pada tanggal 27 Agustus 2025 dan Pelantikan Jabatan Fungsional PPPK

sebanyak 11 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 1 orang pada tanggal 1 Oktober 2025.

Gambar 4.57 Kegiatan Pelantikan



8) 4815.EBC.996.Layanan Pendidikan dan Pelatihan

a) Peningkatan Kompetensi Administrasi Manajemen

Dalam upaya peningkatan kompetensi Administrasi Manajemen, menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipahami secara tuntas oleh setiap ASN adalah penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat, dan progresi dalam jabatan fungsional. Karna itu diikutilah pelatihan yang di selenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) meliputi bimtek online penghitungan angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional pada tanggal 1 Februari 2025 atas nama Nuning Yayuk, Kiki Atantio dan Wisnu Wardhani dengan waktu pembelajaran 10 JPL.

Gambar 4.58 Peningkatan Kompetensi Administrasi Manajemen



b) Diklat Kepemimpinan, Pelayanan dan Bimtek Adminitrasi Umum

Berikut pegawai ASN Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diantaranya :

- Moh. Imanuddin Salam, SKM
Lulus uji kompetensi Kenaikan jenjang jabatan fungsional Kesehatan, dinyatakan kompeten dan direkomendasikan sebagai salah satu syarat untuk diangkat sebagai Epidemiolog Kesehatan Jenjang Muda
- Asep Saepuloh, S.Kep., Ners.
Lulus uji kompetensi Perpindahan jenjang jabatan fungsional Kesehatan, dinyatakan kompeten dan direkomendasikan sebagai salah satu syarat untuk diangkat sebagai Perawat Jenjang Muda
- Muhammad Dani Suarman, SE
Lulus dalam Uji Kompetensi Manajerial Sosial Kultural dan Teknis Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional APK APBN Ahli Muda

c) Peningkatan Kapasitas Administrasi Umum

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Adum meliputi :

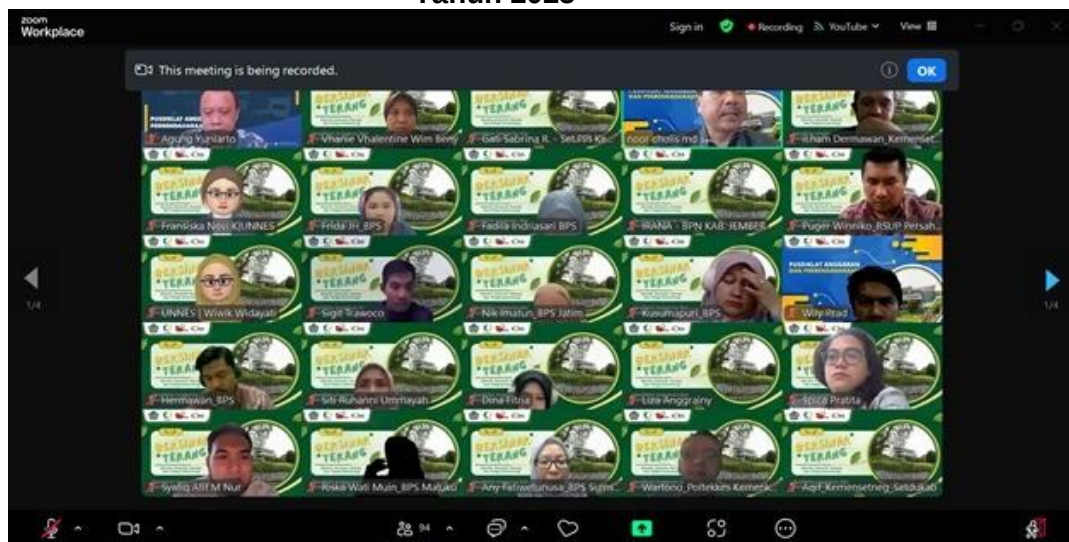
- Pegawai Administrasi Umum Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung atas nama Vhanie Vhalentine Wim Beny, Ignatius Sildani Kristi Damopolii, Widyanti Oktaviani, Dan Wartoni telah mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas melalui E-Learning Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Angkatan II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan 6 Maret 2025 dengan total 15 jam pelajaran, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara sistematis, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, telah memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang administrasi anggaran, khususnya terkait perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, serta mekanisme penyusunan RKA yang efektif dan efisien. Hasil dari peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung.

Gambar 4.59 Peningkatan Kapasitas Administrasi Umum



- Pegawai atas nama Vhanie Vhalentine Wim Beny mengikuti kegiatan Pelatihan Jarak Jauh Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Pertama Dalam Lingkup Tugas Selaku Chief Operational Officer (COO) Angkatan I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan dari tanggal 8 September 2025 sampai dengan 12 September 2025, di Bogor, yang meliputi 21 jam pelajaran.

Gambar 4. 60 Pelatihan Jarak Jauh Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Pertama Dalam Lingkup Tugas Selaku Chief Operational Officer (COO) Angkatan I Tahun 2025



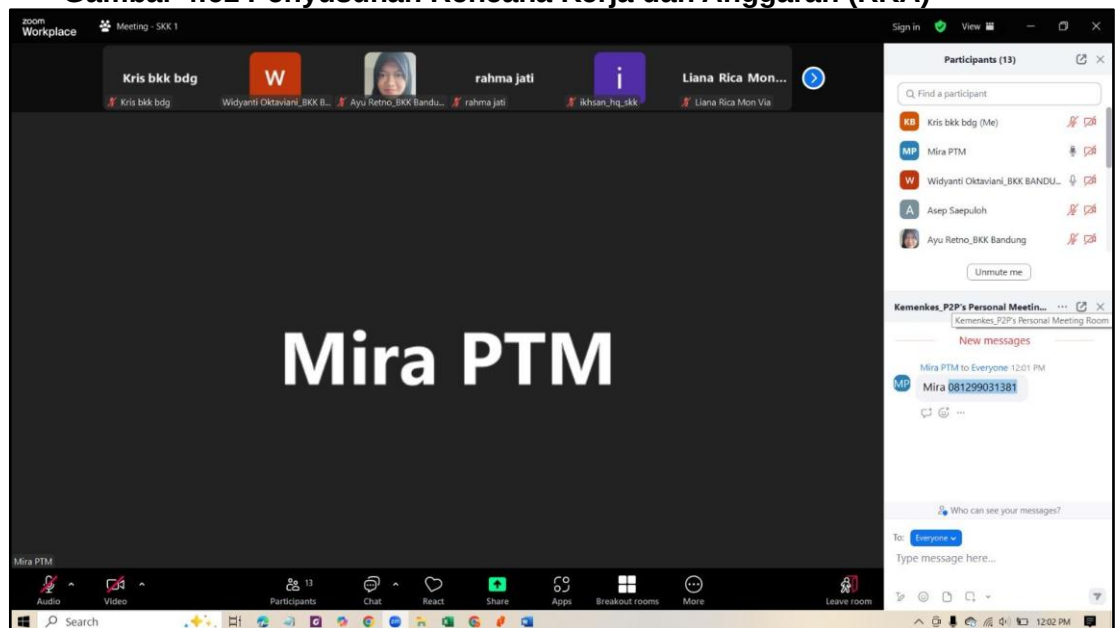
- Pegawai atas nama Muhammad Dani Suarman telah mengikuti kegiatan Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) “Mengulas PMK 131/2024: Pajak Pertambahan Nilai” Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan Palembang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan pada tanggal 5 Februari 2025, di Palembang.

9) 4815.EBD.952.Layanan Perencanaan dan Penganggaran

a) Penyusunan E Renggar

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bertujuan untuk merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang dan merencanakan penggunaan dana agar bisa seefisien mungkin. Kegiatan E-renggar merupakan tahapan awal pengusulan RKA, dalam hal ini BKK Kelas I Bandung sebagai UPT/Satuan Kerja di bawah Ditjen P2P Kementerian Kesehatan membuat rencana kerja dan anggaran tahun 2026. Kegiatan desk verifikasi usulan kegiatan dan anggaran pada satuan kerja UPT di Lingkup Ditjen P2 Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara daring pada tanggal 3 - 7 Maret 2025.

Gambar 4.61 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)



b) Penyusunan RKA KL

Hasil dari kegiatan Desk, Penelitian Dan Reviu RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal P2P TA 2025 yaitu berupa CHD, CHR dan CHP dari APIP/ Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan Anggaran dan Unit Utama Ditjen P2P, BKK Kelas I Bandung sendiri tidak ada catatan yang perlu ditindaklanjuti dari APIP/ Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan Anggaran dan Unit Utama Ditjen P2 untuk RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Mengikuti Kegiatan Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Ditjen Penanggulangan Penyakit TA 2026 pada tanggal 21 s.d 25 Juli 2025.
- Mengikuti Kegiatan Desk, Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 Ditjen P2 pada tanggal 6 s.d 14 Oktober 2025.

Gambar 4.62 Penyusunan RKA KL

KODE	URAIAN KEGIATAN	Jenis Biaya Biaya Utama	Biaya Pendukung	VOLUME	SATUAN UKUR	BIAYA SATUAN UKUR	JUMLAH	KETERANGAN
22	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	Penyesuaian harga
23	- Transport Lokal Pelajar (3 OR x 1 LOK x 1 HR)	-	-	3	OR	170.000	510.000	biaya transport
24	521211 - Konsumsi Pelajar (3 OR x 1 LOK x 1 HR)	-	-	3	OR	50.000	150.000	
25	TOTAL BIAYA KEMERAN						660.000	



10) 4815.EBD.953.Layanan Pemantauan dan Evaluasi

a) Evaluasi Laporan Kinerja (LAKIP)

Laporan Kinerja adalah salah satu amanat rakyat yang dibebankan kepada instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pertanggungjawaban ini meliputi seluruh pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan instansi terkait, termasuk Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung yang merupakan satuan kerja Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit output yang dihasilkan yaitu tersusunya LAKIP BKK Kelas I Bandung tahun 2024 dan semester I tahun 2025 yang akuntabel, transparan, dan berbasis hasil. Kegiatan evaluasi LAKIP dilaksanakan meliputi :

- Kegiatan Penyampaian Data Laporan Kinerja (LAKIP) TA 2024 oleh Tim Kerja/Sub Bagian Administrasi Umum agar mengirimkan data untuk LAKIP TA 2024 pada tanggal 13 Januari 2025.
- Kegiatan rapat internal penyusunan LAKIP tahun 2024 pada tanggal 14 Januari 2025 yang dihadiri oleh Pimpinan dan Staf ASN BKK Kelas I Bandung

Gambar 4.63 Evaluasi Laporan Kinerja (LAKIP)



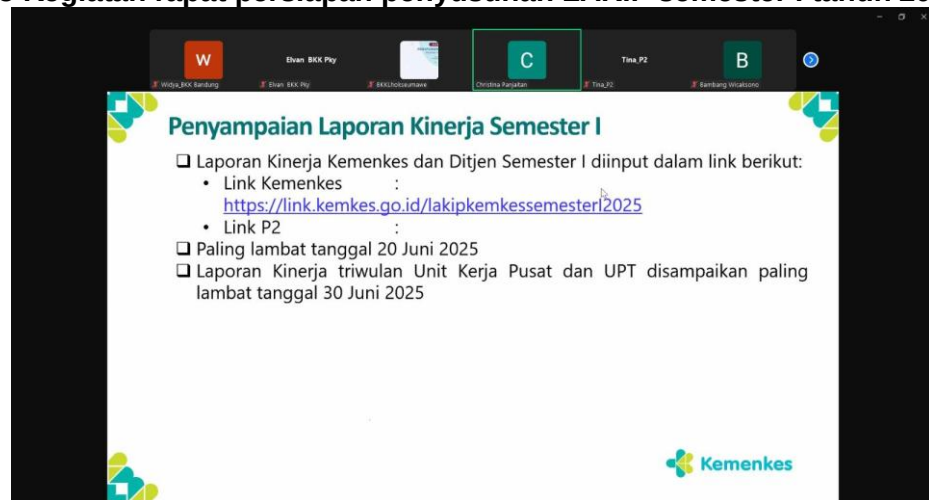
- Kegiatan reviu Reviu SKI terhadap LAKIP tahun 2024 pada tanggal 15 Januari 2025 yang dilaksanakan oleh Tim SKI dan Tim Penyusun LAKIP

Gambar 4.64 Reviu SKI terhadap LAKIP tahun 2024



- Menyampaikan LAKIP tahun 2024 BKK Kelas I Bandung pada tanggal 21 Januari 2025 melalui aplikasi persuratan SRIKANDI
- Kegiatan Reviu LAKIP TA 2024 oleh Unit Utama Ditjen P2 dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 25 Januari 2025.
- Kegiatan Penyampaian Data Laporan Kinerja (LAKIP) semester I tahun 2025 oleh Tim Kerja/Sub Bagian Administrasi Umum agar mengirimkan data untuk LAKIP semester I tahun 2025 2025 pada tanggal 23 Juni 2025.
- Kegiatan rapat persiapan penyusunan LAKIP semester I tahun 2025 oleh Eselon I pada tanggal 18 Juni 2025.

Gambar 4.65 Kegiatan rapat persiapan penyusunan LAKIP semester I tahun 2025



- Kegiatan rapat internal penyusunan LAKIP semester I tahun 2025 pada tanggal 23 Juni 2025 yang dihadiri oleh Pimpinan dan Staf ASN BKK Kelas I Bandung.

Gambar 4.66 Kegiatan rapat internal penyusunan LAKIP semester I tahun 2025



- Kegiatan reviu Reviu SKI terhadap LAKIP semester I tahun 2025 pada tanggal 30 Juni 2025.
- Menyampaikan LAKIP semester I tahun 2025 BKK Kelas I Bandung pada tanggal 30 Juni 2025 melalui aplikasi persuratan SRIKANDI
- Mengikuti rapat reviu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) semester I Tahun 2025 di Lingkungan Ditjen P2 pada tanggal 4 Juli 2025.

b) Evaluasi SAKIP

Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah proses analisis yang sistematis untuk menilai implementasi dan kinerja SAKIP dalam suatu instansi pemerintah. Tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi di BKK Kelas I Bandung tahun 2025 kegiatan evaluasi SAKIP meliputi :

- Kegiatan rapat persiapan penilaian inovasi oleh Eselon I pada tanggal 14 Februari 2025.

Gambar 4.67 Kegiatan rapat persiapan penilaian inovasi oleh Eselon I pada tanggal 14 Februari 2025



- Kegiatan rapat persiapan Dokumen Inovasi dan SAKIP BKK Kelas I Bandung pada tanggal 20 Februari 2025.
- Mengikuti Pertemuan Evaluasi SAKIP TA 2024 Desk Satker Pusat dan UPT pada tanggal 18 s.d 21 Maret 2025.

Gambar 4.68 Pertemuan Evaluasi SAKIP TA 2024 Desk Satker Pusat dan UPT

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Sumber Data	Analisis Relevansi Kuantitas Data
1	Meningkatnya Perilaku Masyarakat di Pesisir Pantai	Indikator faktor risiko di Pesisir Pantai: PISCN (Peningkatan Indeks Risiko di Pesisir Pantai)	1. Rapor tahunan hasil pemantauan UPT dan DZ 2. Data lapangan observasi faktor pemantauan, laporan konsultasi perijinan lapangan untuk pemantauan 3. Pemantauan pemantauan pemantauan DZ pemantauan pemantauan pemantauan 4. Pemantauan UPT: TB, materi standar wilayah faktor pemantauan pemantauan (faktor pemantauan) 5. Pemantauan pemantauan (DZ pemantauan, DZ pemantauan, DZ pemantauan) 6. Data lapangan observasi 7. Form aplikasi kelayakan UPT, UPT, SPNAB, an (kelayakan hasil kelayakan pemantauan pemantauan)	Sumber data yang dikumpulkan telah relevan dengan kebutuhan dalam pemantauan pemantauan target kinerja karena telah tersedia data-data untuk pemantauan pemantauan indikator 1 yaitu: 1. Pemantauan yang diperoleh sesuai standar 2. Pemantauan data lapangan yang diperoleh sesuai standar 3. Pemantauan yang diperoleh sesuai standar 4. Pemantauan yang diperoleh sesuai standar
2	Meningkatnya Perilaku Masyarakat di Pesisir Pantai	Indikator faktor risiko di Pesisir Pantai: PISCN (Peningkatan Indeks Risiko di Pesisir Pantai)	1. Rapor tahunan hasil pemantauan UPT dan DZ 2. Data lapangan observasi faktor pemantauan, laporan konsultasi perijinan lapangan untuk pemantauan 3. Pemantauan pemantauan pemantauan DZ pemantauan pemantauan pemantauan 4. Pemantauan UPT: TB, materi standar wilayah faktor pemantauan pemantauan (faktor pemantauan) 5. Pemantauan pemantauan (DZ pemantauan, DZ pemantauan, DZ pemantauan) 6. Data lapangan observasi 7. Form aplikasi kelayakan UPT, UPT, SPNAB, an (kelayakan hasil kelayakan pemantauan pemantauan)	Sumber data yang dikumpulkan telah relevan dengan kebutuhan dalam pemantauan pemantauan target kinerja karena telah tersedia data-data untuk pemantauan pemantauan indikator 2 yaitu: 1. Faktor risiko yang diperoleh dan dibandingkan pada pemantauan orang 2. Faktor risiko yang diperoleh dan dibandingkan pada pemantauan orang 3. Faktor risiko yang diperoleh dan dibandingkan pada pemantauan orang 4. Faktor risiko yang diperoleh dan dibandingkan pada pemantauan orang
3	Meningkatnya Perilaku Masyarakat di Pesisir Pantai	Indikator faktor risiko di Pesisir Pantai: PISCN (Peningkatan Indeks Risiko di Pesisir Pantai)	1. Rapor tahunan hasil pemantauan UPT dan DZ 2. Data lapangan observasi faktor pemantauan, laporan konsultasi perijinan lapangan untuk pemantauan 3. Pemantauan pemantauan pemantauan DZ pemantauan pemantauan pemantauan 4. Pemantauan UPT: TB, materi standar wilayah faktor pemantauan pemantauan (faktor pemantauan) 5. Pemantauan pemantauan (DZ pemantauan, DZ pemantauan, DZ pemantauan) 6. Data lapangan observasi 7. Form aplikasi kelayakan UPT, UPT, SPNAB, an (kelayakan hasil kelayakan pemantauan pemantauan)	Sumber data yang dikumpulkan telah relevan dengan kebutuhan dalam pemantauan pemantauan target kinerja karena telah tersedia data-data untuk pemantauan pemantauan indikator 3 yaitu: 1. Pemantauan yang diperoleh dan dibandingkan pada pemantauan orang 2. Pemantauan yang diperoleh dan dibandingkan pada pemantauan orang 3. Pemantauan yang diperoleh dan dibandingkan pada pemantauan orang 4. Pemantauan yang diperoleh dan dibandingkan pada pemantauan orang

- Mengikuti Pertemuan Konsolidasi Penyusunan dan Evaluasi SAKIP ongoing Tahun 2025 pada tanggal 12 s.d 15 Agustus 2025.
- Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di daerah dalam rangka tindaklanjut akuntabilitas kinerja di BKK Kelas I Bandung pada tanggal 25 s.d 27 september 2025.

Gambar 4.69 Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di daerah dalam rangka tindaklanjut akuntabilitas kinerja di BKK Kelas I Bandung



- Kegiatan Rapat Identifikasi dan Pengumpulan Data Inovasi SAKIP pada tanggal 25 November 2025

c) Penyusunan Perjanjian Kinerja Satker Ditjen P2P

Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024 dan penyerahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada bulan

Januari 2025 diserahkan melalui surat kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit.

11) 4815.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan

- a) Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025

Proses verifikasi dan rekonsiliasi Laporan Keuangan (LK) tingkat UAPPA-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I) serta Satuan Kerja (Satker) untuk tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 dilakukan berbasis aplikasi terintegrasi SAKTI dan MonSAKTI (E-Rekon&LK). Laporan Keuangan Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Bandung Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kegiatan Verifikasi dan rekonsiliasi Laporan keuangan di BKK Kelas I Bandung meliputi :

- Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited 21 sd 24 Januari 2025 di Hotel Horison Bekasi adapun pertemuan yang di bahas yaitu :
 - Materi Kebijakan Penyusunan LK BMN TA dan Telaak LK TA 2024 (Dit.APK DJPB)
 - Pendampingan Troubleshooting SAKTI modul persediaan dan Aset tetap (Dit. SITP)
 - Penyusunan Wasdal Aplikasi SIMAN V2 (Dit.TSI DJKN)
 - Pelaksanaan Desk BKK Bandung oleh TIM 8 terdiri dari Ruly Wahyuni (Keuangan) dan Nurfi'ah Rofidah (BMN)
 - Pengumpulan Telaah Laporan Keuangan dan BMN
 - Pengecekan CALK
 - Laporan Realisasi Anggaran
 - Neraca
 - Laporan Operasional
 - Laporan Perubahan Ekuitas
 - Catatan Atas Laporan Keuangan

Gambar 4.70 Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited



- Reviu SKI laporan keuangan semester 1 TA 2025 tanggal 14 sd 15 Juli 2025
Tidak ditemukan permasalahan pada LRA, Neraca, LO dan LPE, pada CALK perbaikan pada halaman table dan sudah ditindaklanjuti
- Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 TA 2025 dan Desk dengan Eselon 1 dilaksanakan secara daring pada tanggal 15 sd 18 Juli 2025

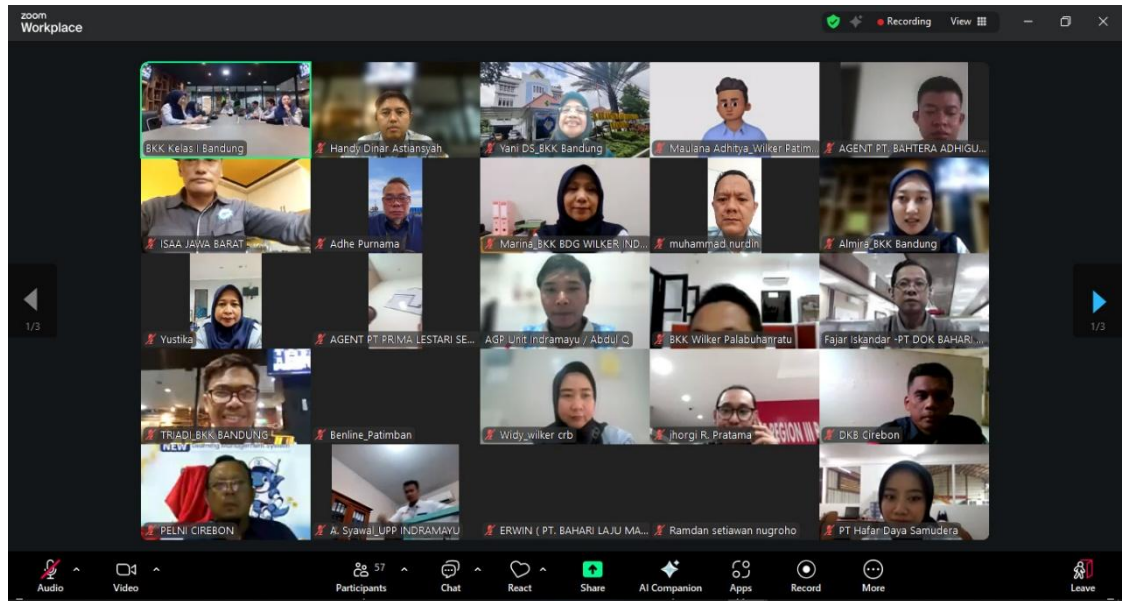
b) Rekonsiliasi Pengelolaan PNB

- Kegiatan rekonsiliasi PNB merupakan proses pencocokan data realisasi penerimaan negara antara catatan Satuan Kerja (Satker) dengan data pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), khususnya untuk PNB yang dikelola terpusat atau transaksi per bulan/akun. Kegiatan rekonsiliasi PNB di BKK Kelas I Bandung meliputi :
 - Menyusun Buku Kas Umum Penerimaan PNB Tahun 2025
 - Menyusun BAST Penerimaan PNB, persediaan dokumen kapal dan persediaan vaksin
 - Koordinasi dengan Pengelola PNB Wilker BKK Kelas I Bandung terkait pencocokan data PNB

A screenshot of a WhatsApp chat conversation. The background is a blue and white abstract pattern. At the top, the status bar shows the time 09.43, signal strength, Wi-Fi, and battery at 26%. The chat header shows a back arrow, the number 23, a profile picture of a person with glasses, the name PNPB 2025, and the status 2 online. There is a video call icon in the top right. The chat history shows three messages. The first message is from 'Mas Teguh KKP' (green bubble) saying 'Meningatkan kembali utk Menyelesaikan BKU dan rekap PNPB sesuai dengan link yang telah di bagikan sebelumnya sampai dengan 31 Januari 2025. Hatur nuhun' with three smiley faces and a prayer hands emoji, timestamped 07.44. The second message is from 'Bu Yeni Kkp' (white bubble) saying 'Meningatkan kembali utk Menyelesaikan BKU dan rekap PNPB sesuai dengan link yang telah di bagikan sebelumnya sampa...' and 'Saya sudah ya ceu vany vani tivani', timestamped 07.44. The third message is from 'Bu Yeni Kkp' (white bubble) saying 'semoga ga ada se cintah buat koreksi' with three smiley faces and a prayer hands emoji, timestamped 07.55. At the bottom is the standard Android navigation bar with a plus icon, a search bar, and icons for voice search, camera, and gallery.

- 120

Gambar 4.72 Sosialisasi Peraturan dan Koordinasi Pengelolaan PNPB Pada Pihak Internal dan Eksternal UPT



d) Konsultasi Permasalahan Pengelolaan/Pelaporan PNPB Ke Pusat

Kegiatan Konsultasi Permasalahan Pengelolaan/Pelaporan PNPB dilaksanakan melalui Aplikasi Whatsap terkait permasalahan Keputusan Menteri kesehatan nomor 898 Tahun 2025.

Gambar 4. 73 Konsultasi Permasalahan Pengelolaan/Pelaporan PNPB Ke Pusat



a) Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Coaching SKI serta SPIPT Kegiatan di Tahun 2025 yang dilaksanakan meliputi :

- Rapat Persiapan Penilaian PIPK tanggal 6 November 2025 secara daring
Persiapan penilaian PIPK dengan membagi tugas dan mengunggah dokumen yang diperlukan
- Rapat Penyusunan Penilaian PIPK tgl 29 November 2025
 - Identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya

- Semua Risiko utama telah diidentifikasi, semua Risiko telah dimitigasi, simpulan PIPK tidak berdampak
 - Perbaikan Identifikasi Risiko dan pengendaliannya:
Tim penilai telah Menyusun perbaikan identifikasi Risiko dan pengendaliannya dengan baik simpulan tidak berdampak
 - Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas
Tim Penilai telah menguji PITE dan membuat penilaian secara wajar, simpulan PIPK tidak berdampak
 - Pengujian PUTIK
Simpulan PIPK tidak berdampak
 - Pengujian Atribut Pengendalian
Simpulan PIPK tidak berdampak
 - Pengujian Pengendalian aplikasi:
Simpulan PIPK tidak berdampak
- b) Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Melaksanakan rekonsiliasi eksternal setiap bulan mulai Januari sd Desember 2025 dengan dibuktikan Surat Hasil rekonsiliasi tanpa adanya TDK COA atau Rupiah pada aplikasi MONSAKTI
- c) Penyusunan Realisasi Anggaran
Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 yaitu Pertemuan Penggunaan Aplikasi Coretax dan Prosedur Pembayaran Pajak, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21/26 Orang Pribadi dan Instansi Pemerintah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025 dengan mengundang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying, kegiatan dilaksanakan

Gambar 4. 74 Penyusunan Realisasi Anggaran



12) 4815.EBD.961. Layanan Reformasi Kinerja

a) Pembangunan Zona Integritas menuju satker WBK Satker WBK/WBBM

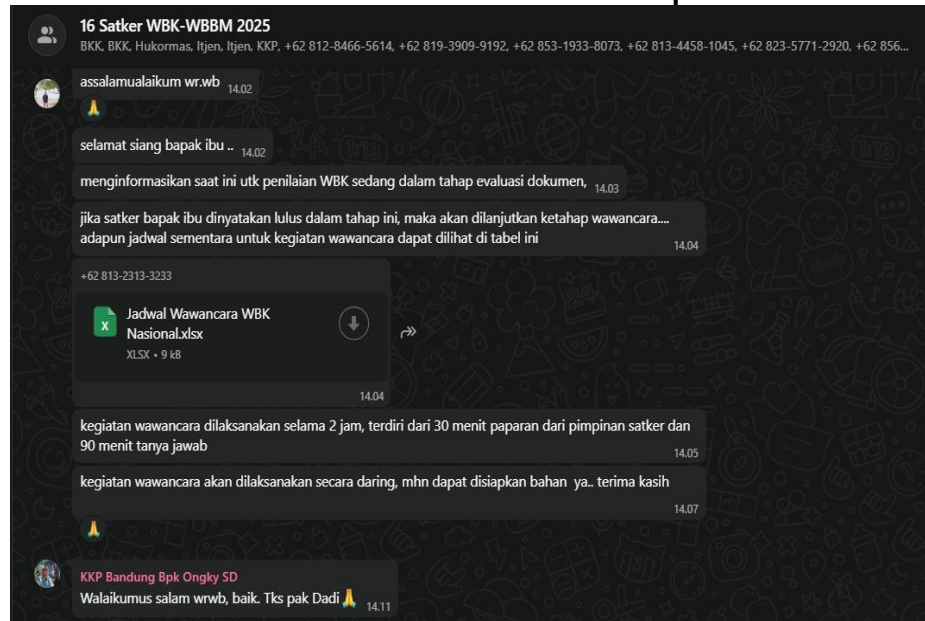
Telah dilakukan pencetakan media KIE WBK berupa 3 buah x banner terkait anti korupsi dan 3 buah x banner terkait pelaporan WBS. X banner tersebut telah didistribusikan pada 6 November 2026 dengan distribusi sebagai berikut; x banner anti korupsi didistribusikan ke kantor wilayah kerja Patimban, Kertajati, dan Palabuhanratu. Sedangkan x banner pelaporan WBS didistribusikan ke kantor induk, kantor wilker Indramayu, dan Patimban

Gambar 4.75 Pencetakan media KIE WBK



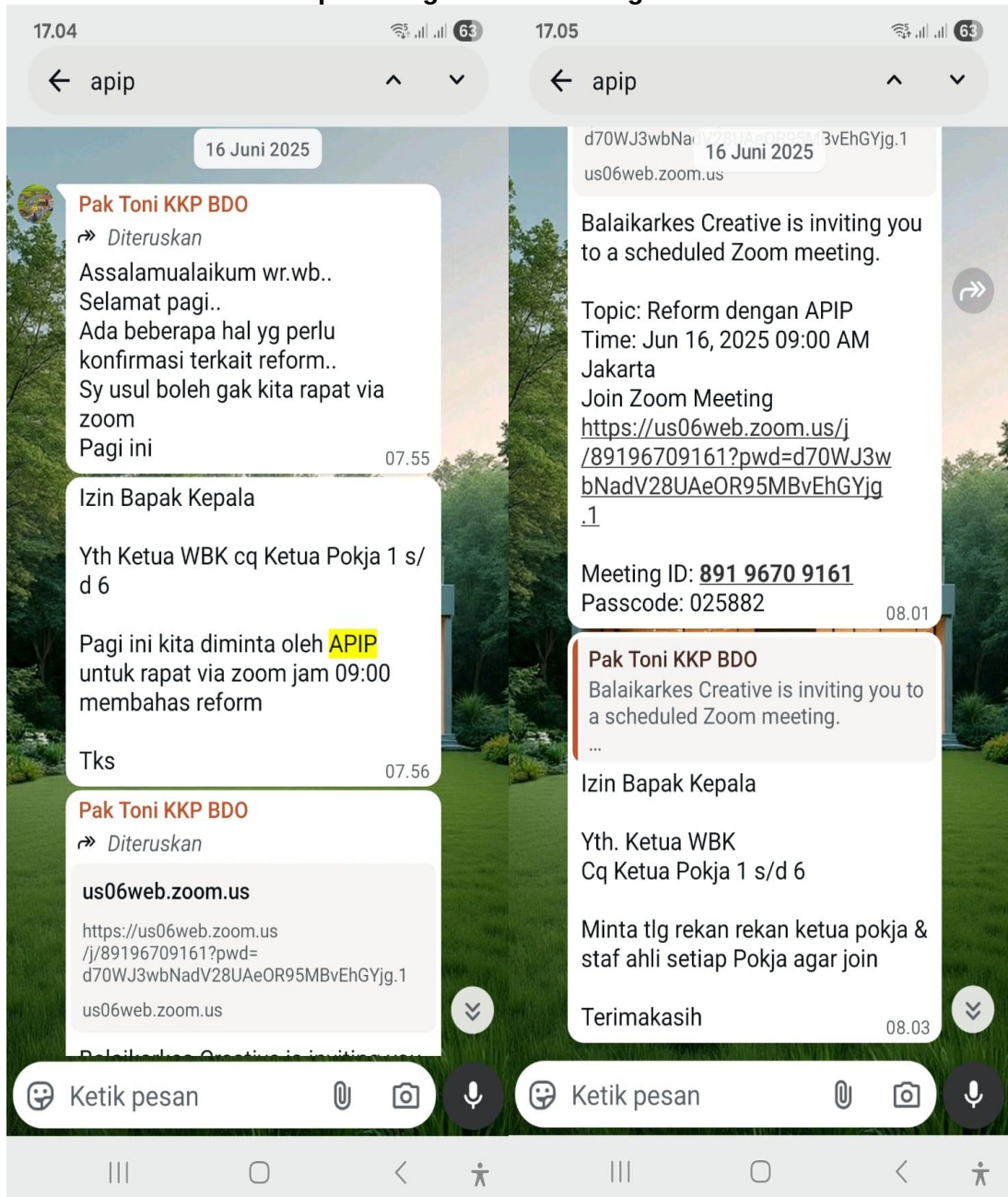
Untuk efisiensi dan efektivitas, maka persiapan pendampingan assesment penilaian satker WBK/WBBM dilakukan berkala secara daring dengan berkoordinasi via WA grup. Hal ini tidak mengurangi esensi dan nilai yang didapat dalam mendapatkan informasi dan bimbingan dari pusat.

Gambar 4.76 Koordinasi via WA Grup Pusat



Adapun kegiatan Koordinasi/ konsultasi ke Pusat dalam rangka pembangunan zona integritas juga dilakukan berkala secara online. Salah satu yang diikuti adalah pendampingan Reform dalam rangka meraih WBK/WBBM yang diselenggarakan secara online pada 16 Juni 2025. Dengan ini BKK tetap mendapatkan arahan dan bimbingan dari pusat

Gambar 4.77 Kegiatan Koordinasi/ konsultasi ke Pusat dalam rangka pembangunan zona integritas



b) Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pengelola pengaduan, khususnya pengelolaan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di lingkungan Kemenkes. Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes menyelenggarakan bimbingan teknis serta sosialisasi pengelolaan pengaduan dan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan pada tanggal 6 - 8 Agustus 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Ayu Retno Setyowati selaku anggota Tim Kerja 5

Gambar 4.78 Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System



c) Program Pengendalian Gratifikasi

Kegiatan bimbingan teknis tentang pelaporan bulanan UPG dilakukan pada saat kegiatan penyusunan rencana kerja UPG tahun 2025 yakni pada tanggal 14 Februari 2025 di kantor induk BKK Kelas I Bandung. Kegiatan ini dilakukan secara daring, dengan sasaran perwakilan UPG di wilayah kerja. Sebanyak 11 orang yang mengikuti rapat ini dan diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin. Dengan adanya bimtek ini diharapkan para pegawai di wilayah kerja memahami pembuatan laporan bulanan untuk kondisi penerimaan maupun penolakan Gratifikasi serta melakukan penyaluran jika terdapat penerimaan yang terindikasi gratifikasi kepada yang berhak (Yayasan yatim piatu, duafa) untuk jenis makanan dan minuman. Adapun hal-hal yang disampaikan sehubungan dengan pembuatan pelaporan bulanan gratifikasi adalah sebagai berikut:

Gambar 4.79 Program Pengendalian Gratifikasi



Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (PPG) Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kesehatan pada bulan Juli 2025 lalu, maka diadakanlah kegiatan Sosialisasi Hasil e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (PPG) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 2 September 2025 secara daring di Ruang Badami Lantai 4 Balai Karkes Kelas I Bandung dan luring via zoom

Gambar 4.80 Sosialisasi Hasil e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (PPG) Tahun 2025



Kegiatan Sosialisasi tentang 7 (Tujuh) Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi yang Wajib dan Tidak Wajib Dilaporkan yang akan dilaksanakan pada 03 Oktober 2025 secara daring di Ruang Tamu Lantai 1 Balai Karkes Kelas I Bandung dan luring via zoom. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Kerja 5, Tim UPG kantor induk dan wilker, serta tenaga alih daya kantor induk dan wilker

Gambar 4.81 Kegiatan Sosialisasi tentang 7 (Tujuh) Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi yang Wajib dan Tidak Wajib Dilaporkan



d) Penguatan Budaya Anti korupsi

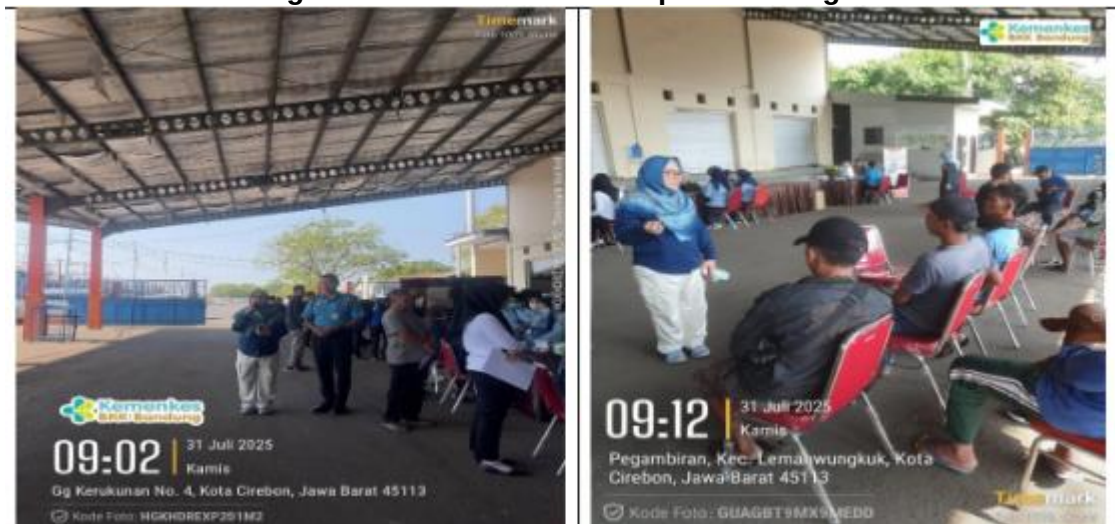
Kegiatan sosialisasi Antikorupsi dan UPG dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembekalan pengetahuan hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan yang tergabung dalam Catering layanan haji di Asrama Haji Kertajati Indramayu Jawa Barat yakni pada tanggal 30 April 2025.

Gambar 4.82 Kegiatan sosialisasi Antikorupsi dan UPG



Kegiatan sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan skrining TB HIV dan PTM juga pada saat memberikan desiminasi informasi tentang deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara. Dilakukan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 di Wilker Pelabuhan Cirebon, bekerjasama dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Sebanyak 122 orang yang menghadiri acara skrining tersebut, tercapai 152% dari target sebanyak 80 orang. Acara dihadiri oleh : PPN Kejawanan, Puskesmas Penggambiran, dan masyarakat Pelabuhan setempat.

Gambar 4.83 Kegiatan sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi



Sosialisasi Anti Korupsi pada saat Kedatangan Jemaah Calon Haji Jawa Barat di Asrama Haji Embarkasi. Setiap dilakukan penerimaan Jemaah calon haji Jawa Barat dan akan dilakukan penyampaian pesan kesehatan sekaligus penyampaian pesan bahwa Balai Karkes Bandung menolak segala bentuk Gratifikasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di Asrama Haji Embarkasi. Pada saat penerimaan jemaah juga dibagikan paket obat secara gratis yang berasal dari Kementerian Kesehatan. Penyampaian pesan ini dilakukan pada setiap kloter sebelum dilakukan pemeriksaan ketiga.

Gambar 4.84 Sosialisasi Anti Korupsi pada saat Kedatangan Jemaah Calon Haji Jawa Barat di Asrama Haji Embarkasi



13) 4815.EBD.974.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

a. Penyelenggaraan Kearsipan

Kegiatan penyelenggaraan Kearsipan di BKK Kelas I Bandung meliputi Penataan Persuratan dan Kearsipan, Pengawasan Arsip Ditjen P2 dan Bimbingan Teknis Persuratan dan Kearsipan ke wilayah kerja. Kegiatan penyelenggaraan kearsipan pada tahun 2025 yang dilaksanakan terdiri dari :

- Verifikasi Naskah Dinas

Proses pemeriksaan dan persetujuan naskah/surat keluar oleh pihak berwenang (verifikator) dalam sistem kearsipan digital, memastikan keaslian, keabsahan, dan kesesuaian isi sebelum naskah siap untuk ditandatangani secara elektronik (disposisi atau tanda tangan digital).

Tabel 4.8 Verifikasi Naskah Dinas

No	Keterangan	Jumlah
1	Verifikasi Arsip	3540
2	Ditolak	170
3	Diperbaiki (belum diperbaiki)	22

- Naskah Masuk

surat, dokumen, atau informasi tertulis yang diterima oleh suatu instansi, perusahaan, atau individu dari pihak luar (eksternal) atau bagian lain dalam organisasi yang sama, yang memerlukan pencatatan, disposisi (penerusan arahan), dan tindak lanjut untuk mendukung kelancaran tugas dan administrasi.

Tabel 4.9 Naskah Masuk

No	Keterangan	Jumlah
1	Naskah Masuk Melalui Srikandi	668
2	Naskah Masuk Berupa Fisik Surat	202

Total Keseluruhan	870
-------------------	-----

- Naskah Keluar

Surat-surat yang dikirimkan oleh suatu instansi, perusahaan, atau organisasi kepada pihak luar (eksternal) atau internal, yang berisi tanggapan, informasi, undangan, atau perintah tugas, ditandai dengan adanya nomor, tanggal, stempel, dan tanda tangan resmi yang berwenang untuk menciptakan hubungan timbal balik dan menjaga komunikasi resmi.

Surat yang telah keluar di BKK Kelas I Bandung sebanyak 3540 yang ditandatangani melalui BSrE SRIKANDI. Surat tersebut telah dilakukan verifikasi bertahap oleh tim verifikasi dan dikirimkan kepada pengguna SRIKANDI atau pihak lain di luar internal SRIKANDI.

- Pemberkasan Arsip Aktif

Pemberkasan arsip aktif adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menata arsip yang sering digunakan (frekuensi tinggi) dalam suatu organisasi ke dalam berkas-berkas yang logis dan terstruktur, menggunakan metode seperti klasifikasi subjek atau fungsi, agar mudah ditemukan, diakses, dan dikelola, serta mempersiapkan arsip tersebut untuk proses penyusutan di kemudian hari. Tujuannya adalah efisiensi kerja, keamanan informasi, dan akuntabilitas.

Tabel 4.10 Pemberkasan Arsip Aktif

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Naskah Keluar Sudah Diberkaskan	6.058 berkas	48.16
2	Naskah Masuk Sudah Diberkaskan	558 berkas	30.39

Gambar 4.85 Pemberkasan Arsip Aktif



- **Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar**

Sistem pencatatan (biasanya menggunakan buku agenda) untuk mencatat semua surat masuk dan surat keluar suatu organisasi secara sistematis, berisi detail seperti nomor surat, tanggal, pengirim/tujuan, dan perihal, agar memudahkan pengelolaan, pencarian, dan arsip persuratan agar lebih rapi dan terorganisir. Surat Masuk ini merupakan rekapitulasi dari surat masuk berupa Fisik dan Srikandi. Adapun rinciannya sebagai berikut

Tabel 4.11 Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar

Bulan	Jumlah Surat Keluar	Jumlah Surat Masuk
Januari	376	82
Februari	319	61
Maret	307	75
April	255	50
Mei	275	73
Juni	280	69
Juli	342	80
Agustus	304	55
September	262	66
Oktober	465	100
November	317	77
Desember	394	68

- **Penandatanganan Naskah Elektronik**

Naskah elektronik pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung ditandatangani oleh kepala balai untuk naskah yang akan dikirimkan ke luar instansi Kementerian Kesehatan. Naskah yang sudah di verifikasi selanjutnya

di lakukan tanda tangan digital dan dikirimkan kepenerima. Adapun jumlah naskah yang sudah ditanda tangani pada periode tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 4.12 Penandatanganan Naskah Elektronik

No	Keterangan	Jumlah
1	Naskah telah di Verifikasi	12.033
2	Naskah telah di tanda tangan	10.874
3	Naskah telah di kirimkan	10.281

- **Pengelolaan SOP Kearsipan**
SOP Kearsipan merupakan pedoman langkah demi langkah yang sistematis untuk mengelola arsip secara terstruktur, efisien, dan sesuai aturan dalam suatu organisasi, meliputi penciptaan, pengelolaan, pemeliharaan, hingga pemusnahan arsip, untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kemudahan penemuan kembali informasi penting. SOP pengelolaan kearsipan pada BKK Kelas I Bandung terdiri dari :
 - SOP Alih Media Arsip
 - SOP Pengelolaan Arsip Inaktif
 - SOP Layanan Informasi Arsip
 - SOP Pemindahan Arsip
 - SOP Surat Keluar
 - SOP Disposisi Surat
 - SOP Surat Masuk
 - SOP Pengiriman Surat
- **Pengelolaan Surat Keputusan**
Pengelolaan Surat Keputusan Kepala BKK Kelas I Bandung yang telah di terbitkan pada tahun 2025 sebanyak 39 Surat Keputusan.
- **Pengelolaan Email Kemkes**
Pengelolaan email Kemkes dimaksudkan untuk melakukan aktivasi BSRé yang selanjutnya digunakan untuk tanda tangan digital pada aplikasi SRIKANDI. Adapun jumlah pegawai yang sudah mempunyai email Kemkes sebanyak 99 orang yang terdiri dari 75 PNS, 22 P3K dan 1 PW
- **Pengelolaan Alih Media Arsip**
Merupakan proses memindahkan informasi dari satu format media ke format lain, paling umum dari fisik (kertas) ke digital, untuk tujuan pelestarian (preservasi) agar arsip awet dan mudah diakses, serta untuk modernisasi pengelolaan arsip agar lebih efisien, aman, dan dapat digunakan oleh banyak

orang secara bersamaan tanpa merusak fisik aslinya. Proses ini mencakup pemindaian (scanning) dan pengorganisasian file, menjadi langkah krusial dalam digitalisasi arsip untuk menjaga nilai historis dan legalitasnya. Adapun alih media yang telah dilakukan di BKK Kelas I Bandung dengan melakukan alih media dokumen dan surat penting lainnya seperti BPKB Kendaraan dengan disertai Berita Acara Alih Media sesuai dengan aturan yang berlaku.

Gambar 4.86 Pengelolaan Alih Media Arsip



- **Pengawasan Kearsipan IKK**
 Sesuai dengan Instrumen dan Tata Cara Penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip dan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2025 terkait Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan sebesar 55%, dan dalam rangka percepatan pemenuhan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kearsipan.
- **Penyampaian Arsip Aktif**
 Penyampaian arsip aktif setiap semester ke unit utama merupakan aspek penting dalam pengelolaan arsip yang efektif untuk memastikan informasi tersedia saat dibutuhkan, mendukung akuntabilitas, dan memenuhi persyaratan hukum serta peraturan. Proses ini dilakukan setiap 6 bulan sekali dan laporan dikirimkan ke Unit Utama Ditjen P2.
- **Bimtek dan Konsultasi terkait Pengelolaan Arsip BKK Kelas I Bandung**
 Kegiatan Konsultasi penghapusan arsip dan inventaris arsip kepada Eselon I Ditjen P2 dan Biro Umum Kementerian Kesehatan di Jakarta telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2025 dan telah dilaksanakan Bimtek sosialisasi kegiatan kearsipan meliputi tata naskah dinas, SRIKANDI dan kearsipan secara daring dengan Wilker BKK Kelas I Bandung.

Gambar 4.87 Bimtek dan Konsultasi terkait Pengelolaan Arsip BKK Kelas I Bandung



4.2 PENCAPAIAN KINERJA

Tabel 4.13 Pencapaian Kinerja BKK Kelas I Bandung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN REALISASI (%)
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN	0,96	0,97	101,04
		Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan	98%	100%	102,04
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan /Bandara/PLBN	0,97	1	103,09
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	82	99,32	121,12
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	100	107,53
		Kinerja implementasi WBK satker	84	84,25	100,30
		Persentase ASN yang Ditingkatkan kompetensinya	80%	98,97%	123,72
		Persentase realisasi anggaran	96%	77,76%	81
Rata - Rata			104,98		

4.3 REALISASI ANGGARAN

Sumber dana Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung berasal dari APBN Kementerian Kesehatan RI Tahun 2025. pada awal tahun BKK Kelas I Bandung memperoleh dana sebesar Rp. 27.314.205.000,- (DIPA No. SP DIPA-024.05.2.415712/2025). Pada tahun 2025 adanya efisiensi pada anggaran yang bersumber dari RM dan PNPB sebesar Rp. 6.254.085.000,- namun pada bulan Juli terdapat relaksasi Blokir anggaran sehingga blokir terakhir sebesar Rp. 6.170.995.000,- dan pada bulan Oktober ada revisi penambahan anggaran atas kelebihan target penerimaan PNPB untuk belanja modal dan belanja jasa sebesar Rp. 789.191.000,- sehingga pagu keseluruhan tahun 2025 bertambah menjadi Rp. 28.103.396.000,- sehingga Pagu Efektif sebesar Rp. 21.932.401.000,- dan realisasi akhir tahun 2025 sejumlah Rp. 21.854.117.027,-

4.4 UPAYA UNTUK MERAH WTP DAN REFORMASI BIROKRASI

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini audit dimana auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu faktor utama yang turut berperan serta dalam perwujudan pemerintahan yang bersih, transparansi, dan akuntabel.

Strategi yang telah dilaksanakan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung tahun 2025 dalam mendukung upaya WTP dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. BKK Kelas I Bandung telah membentuk SK Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada BKK Kelas I Bandung Tahun 2025.
2. Penyetoran PNPB dilakukan langsung oleh wajib bayar ke bank persepsi atau PT POS
3. Pengelolaan kegiatan yang dibiayai dari Rupiah Murni dan PNPB dilaksanakan secara transparan.
4. Bagi pejabat struktural dan pengelola keuangan beserta pejabat pengadaan melakukan pengisian LHKPN.
5. Telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal untuk penilaian calon satker berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tingkat Nasional pada BKK Kelas I Bandung pada tahun 2025 sebesar 84,25 (syarat minimal 75).

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Jumlah Sumber Daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh BKK Kelas I Bandung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 70 orang PNS, 5 orang CPNS dan 24 PPPK sehingga total menjadi 99 orang yang tersebar baik di induk maupun wilayah kerja.
2. BKK Kelas I Bandung memiliki sarana prasarana barang tidak bergerak berupa tanah seluas 5.973 m² dan bangunan seluas 3.594 m² serta sarana prasarana berupa barang bergerak sebanyak 49 unit yang terdiri dari 26 unit roda 4 dan 20 unit roda 2.
3. Realisasi anggaran untuk Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sebesar 77,76% (realisasi sebesar Rp. 21.854.117.027,- dari pagu anggaran keseluruhan termasuk pagu blokir sejumlah Rp. 28.103.396.000,-)
4. Dari 27 rincian output yang terdapat dalam DIPA di BKK Kelas I Bandung, semuanya telah mencapai target.

5.2 SARAN

1. Untuk tahun yang akan datang akan menghadapi adanya beberapa ASN pensiun, BKK Kelas I Bandung perlu menyiapkan strategi regenerasi dengan memetakan jabatan yang ditinggalkan, mengajukan formasi baru sesuai kebutuhan, serta memperkuat peran CPNS dan PPPK melalui pelatihan dan mentoring agar siap mengambil alih tugas penting. Selain itu, rotasi jabatan dan digitalisasi proses kerja dapat membantu menjaga efisiensi, sementara proyeksi pensiun jangka panjang akan memastikan kesinambungan SDM sehingga pelayanan tetap optimal meski terjadi pengurangan pegawai.
2. Pelaksanaan kegiatan diharapkan mengikuti Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah dibuat pada awal tahun sehingga penyerapan anggaran dapat lebih dimaksimalkan dan tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun.
3. Pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran agar dapat dimonitoring secara intensif mulai dari awal pelaksanaan, pertengahan pelaksanaan kegiatan serta akhir tahun sehingga dapat segera diperoleh tindakan korektif apabila dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan mengalami hambatan baik dari teknis pelaksanaan kegiatan, maupun penyerapan anggaran.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut di atas, maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kinerja dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih akuntabel dan bermanfaat.